

METADATA

INDIKATOR PEMBANGUNAN



**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2023**

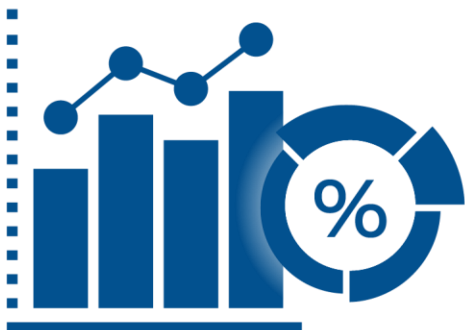


METADATA

INDIKATOR PEMBANGUNAN

**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2023**

**METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2023**



PENGARAH

**Rudy Suprihadi Prawiradinata
Alex Oxtavianus
Afwandi
Bambang Triyono**

TIM PENYUSUN

**Nuzula Anggeraini
Ladislau Ryanniro Tumanggor
Ultamas Eka Rahmawan**

KOORDINATOR PENYUSUN

Chairul Rijal

TIM TATA LETAK DAN DESAIN

Aris Kadarisman

TIM PENDUKUNG TEKNIS

**Rahadian Febry Maulana
Yossi Anandia Putri
Sefty Fidanarsih
Ismail Yusuf
Aliza**

KONTRIBUTOR

**Penanggung Jawab Prioritas Nasional pada Kementerian PPN/Bappenas
Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB**

KATA PENGANTAR

Sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Penyusunan RKP juga dilakukan sebagai upaya memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Serta berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 pasal 7, dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2023 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi Prioritas Nasional (PN) pada RKP Tahun 2023. Masing-masing PN dijabarkan lebih lanjut ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan, ditetapkan pula indikator (dan targetnya) pada setiap PN, PP, KP dan ProP. Seperti pada RKP pada tahun sebelumnya, RKP Tahun 2023 terdapat lebih dari 2.000 indikator.

Untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama terhadap indikator yang terdapat dalam RKP Tahun 2023, serta respons yang baik dari rekan-rekan sektor, kami melanjutkan penyusunan Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023. Tersedianya metadata indikator



pembangunan diharapkan juga mendukung penyusunan perencanaan yang relevan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian RKP Tahun 2023 yang efektif. Metadata ini juga dapat dijadikan acuan oleh seluruh *stakeholders* terkait dalam memahami indikator RKP Tahun 2023 sebagai barometer pencapaian pembangunan. Melanjutkan edisi sebelumnya, Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023 mencakup indikator PN dan PP pada RKP Tahun 2023.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, berperan, dan berpartisipasi dalam penyusunan Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023. Kami menyadari bahwa beberapa bagian dari dokumen ini masih perlu dikembangkan. Masukan dan kritik membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dokumen serupa di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat.

Alex Oxtavianus

Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	3
LATAR BELAKANG.....	3
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	4
Tujuan	4
Ruang Lingkup	4
MANFAAT METADATA.....	4
METODE DAN SUMBER DATA.....	4
Metode.....	4
Sumber Data.....	5
METADATA SASARAN PEMBANGUNAN	9
Pertumbuhan Ekonomi	10
Tingkat Kemiskinan.....	10
Tingkat Pengangguran Terbuka	11
Rasio Gini.....	11
Indeks Pembangunan Manusia	12
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13
Nilai Tukar Petani (NTP)	14
Nilai Tukar Nelayan.....	14
METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 1	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	19
INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 1	
Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	19
Skor Pola Pangan Harapan (PPH).....	20
Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan.....	21
Rasio kewirausahaan nasional	21
Pertumbuhan PDB pertanian	21
Pertumbuhan PDB perikanan.....	22
Pertumbuhan PDB industri pengolahan	23
Kontribusi PDB industri pengolahan.....	23
Nilai devisa pariwisata.....	24

Kontribusi PDB pariwisata.....	24
Penyediaan lapangan kerja per tahun.....	25
Pertumbuhan investasi (PMTB)	26
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan.....	26
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa.....	27
Rasio perpajakan terhadap PDB	27

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL 1

Kapasitas terpasang pembangkit EBT.....	28
Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik.....	28
Produktivitas air (<i>water productivity</i>).....	29
Nilai Tukar Petani (NTP)	29
Angka Kecukupan Energi (AKE).....	30
Angka Kecukupan Protein (AKP)	30
<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	31
<i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>	32
Konservasi Kawasan Kelautan	33
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.....	34
Produksi perikanan	34
Produksi garam	35
Nilai tukar nelayan.....	35
Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	36
Pertumbuhan wirausaha.....	36
Kontribusi koperasi terhadap PDB.....	37
Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	37
Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas.....	38
Nilai tambah ekonomi kreatif.....	38
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan.....	39
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	39
Jumlah tenaga kerja pariwisata.....	40
Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif.....	40
Nilai realisasi PMA dan PMDN.....	41
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan.....	41
Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian.....	42
Neraca perdagangan barang	43
Pertumbuhan ekspor nonmigas.....	43

Jumlah wisatawan mancanegara.....	44
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	44
Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi	45
Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	45
Skor <i>Logistic Performance Index</i>	46
Rasio M2/PDB	46
Peringkat <i>travel and tourism development index</i>	46
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>).....	47
Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara	47
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	48
Penyediaan Data Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	48

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 2

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	53
---	-----------

INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 2

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI.....	53
IPM KTI.....	54
Persentase penduduk miskin KTI	55
Laju pertumbuhan PDRB KBI.....	55
IPM KBI	56
Persentase penduduk miskin KBI	57

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL 2

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera	57
IPM Provinsi di Wilayah Sumatera.....	58
Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera	59
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali.....	59
IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali.....	60
Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali	61
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara.....	61
IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara.....	62
Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara	63
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan	63
IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan	64
Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan.....	65
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi.....	65
IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi.....	66

Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi.....	67
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku	67
IPM Provinsi di Wilayah Maluku.....	68
Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku	69
Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua.....	69
IPM Provinsi di Wilayah Papua.....	70
Persentase penduduk miskin Wilayah Papua	71

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	75
---	-----------

INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 3

Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	75
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)....	76
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial.....	76
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	77
Angka Kematian Ibu (AKI)	78
Angka Kematian Bayi (AKB)	78
Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita.. ..	79
Insidensi <i>Tuberculosis</i>	81
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.. ..	81
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta	82
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun.....	83
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.....	83
Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca.....	84
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	85
Nilai rata-rata hasil PISA: Sains.....	85
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas.....	86
Harapan lama sekolah.....	87
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	87
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).....	89
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	90
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas... ..	91
Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University: Top 200</i>	92
Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University: Top 300</i>	93
Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University: Top 500</i>	93

Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi.....	94
Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	95

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL 3

Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.....	95
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	96
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan.....	97
Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun.....	97
Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan.....	98
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas	99
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia.....	99
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif	100
Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja formal.....	100
Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja informal.....	101
Persentase persalinan di fasyankes	102
Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern Contraceptive Prevalance Rate</i> (mCPR)	103
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>).....	103
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	104
Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan.....	105
Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita	105
Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (<i>TBC Treatment Coverage</i>)	107
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.....	107
Insidensi HIV.....	108
Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu.....	108
Jumlah kabupaten/kota sehat.....	109
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).....	109
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	110

Persentase rumah sakit terakreditasi	110
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar..	111
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	111
Persentase obat memenuhi syarat	112
Persentase makanan memenuhi syarat	112
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA Sederajat	113
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi.....	113
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Membaca.....	114
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Matematika	115
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Sains.....	115
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi	116
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi.....	117
Tingkat penyelesaian pendidikan: SD/MI/ sederajat.....	117
Tingkat penyelesaian pendidikan: SMP/MTs/ sederajat.....	118
Tingkat penyelesaian Pendidikan: SMA/SMK/MA/ sederajat	119
Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini.....	119
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT).....	120
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	121
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.....	121
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	122
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	123
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir.....	123
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir.....	124
Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	124
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	125

Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun.....	125
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha.....	126
Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah.....	126
Jumlah lulusan pelatihan vokasi	127
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	128
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	128
Jumlah prototipe dari perguruan tinggi.....	129
Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	129
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	130
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik	130
Jumlah paten <i>granted</i> (domestik).....	131
Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3	131
Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan.....	131
Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	132
Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi.....	132
Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi	133
Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	133
Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	134
Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.....	134
Peringkat pada Asian Games	135
Peringkat pada Asian Para Games	135

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	139
---	-----

INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 4

Indeks Capaian Revolusi Mental	139
Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.....	140

Indeks Pembangunan Kebudayaan	140
Indeks Pembangunan Masyarakat	142
Indeks Kerukunan Umat Beragama	143
Indeks Pembangunan Keluarga	144
Median Usia Kawin Pertama Perempuan	145
Nilai Budaya Literasi.....	146

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL 4

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	146
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	147
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib.....	148
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	149
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	150
Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa.....	150
Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.....	151
Nilai Dimensi Persatuan Indonesia.....	151
Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.....	152
Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia....	152
Indeks Kerentanan Keluarga.....	153
Indeks Karakter Remaja	154
Nilai Dimensi Warisan Budaya	154
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya.....	155
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	155
Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	156
Indeks Kepuasan Layanan KUA.....	157
Nilai Dimensi Toleransi.....	157
Nilai Dimensi Kesetaraan.....	158
Nilai Dimensi Kerja Sama	158
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	159

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 5

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar.....	162
---	-----

INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 5

Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau.....	163
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010.....	164
Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi....	164

Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	165
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	165
Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>).....	166
Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2.....	166
Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara	167
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	167
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan	168
Rasio elektrifikasi	168
Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik	169
Penurunan emisi GRK sektor energi.....	170
Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)	170

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL 5

Rasio <i>outstanding</i> KPR terhadap PDB.....	171
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita.....	172
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)	172
Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan	173
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak.....	173
Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan.....	175
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	175
Persentase PDAM dengan kinerja sehat	176
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.....	176
Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	177
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	177
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	177
Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan.....	178
Volume tampungan air per kapita	179
Persentase luas sawah beririgasi.....	179

Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi.....	180
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota....	180
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi.....	180
Panjang jalan baru yang terbangun	181
Panjang jaringan KA yang terbangun	181
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	182
Jumlah rute subsidi tol laut.....	182
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun	183
Jumlah bandara baru yang dibangun.....	183
Jumlah rute jembatan udara.....	184
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass	184
Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan	185
Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	185
Jumlah produksi tenaga listrik.....	186
Penurunan emisi CO ₂ pembangkit.....	186
Jumlah pengguna listrik.....	187
Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota.....	187
Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif.....	188
Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK.....	188
Persentase pengguna internet.....	189
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	189

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	193
---	------------

INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 6

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	193
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.....	194
Persentase penurunan emisi GRK	194
Persentase penurunan intensitas emisi GRK.....	195

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL 6

Indeks Kualitas Air (IKA)	196
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).....	197
Indeks Kualitas Udara (IKU)	197
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	198

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana.....	199
Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim.....	199
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.....	200
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi.....	200
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan.....	201
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor Limbah.....	203
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU.....	203
Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan	204

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	209
---	------------

INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 7

Indeks Demokrasi Indonesia	209
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	210
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	211
Indeks Pembangunan Hukum.....	212
Indeks Pelayanan Publik Nasional	212
Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya	213

INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL 7

IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	214
IDI Aspek Kebebasan	214
IDI Aspek Kesenjangan	215
Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik.....	216
Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral.....	217
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional.....	217
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	218
Indeks Perilaku Anti Korupsi.....	219
Indeks Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga	220
Indeks Pelayanan Publik Provinsi.....	221
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota.....	222
Indeks Kekuatan Militer	223
Indeks Terorisme Global	223
Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	224
Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	224

PENUTUP	229
----------------------	------------

PENDAHULUAN

Ruang Lingkup Indikator

PN



Ruang Lingkup Indikator





PENDAHULUAN

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023



PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan metadata indikator pembangunan, tujuan dan ruang lingkup, metode dan sumber data yang digunakan, serta manfaat dari metadata indikator pembangunan.

LATAR BELAKANG

Bagi pemerintah pusat, RKP memiliki arti penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bagi pemerintah daerah, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

RKP Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMN 2020-2024. Dalam setiap tahunnya, RKP memiliki tema yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. RKP Tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (ProP). Dari penjabaran tersebut, ditetapkan lebih dari 2.000 indikator sebagai tolak ukur pencapaian PN, PP, KP, dan ProP.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan informasi indikator RKP serta mendukung kelengkapan seperangkat dokumen RKP, maka dilanjutkan penyusunan kompilasi metadata indikator pembangunan. Pada edisi tahun 2022, disusun Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023. Metadata merupakan informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menempatkan, atau sebaliknya membuat data tersebut untuk mudah didapatkan kembali, digunakan, atau mengelola suatu sumber informasi. Sering kali metadata disebut sebagai data mengenai data atau informasi

mengenai informasi. Dalam hal ini metadata indikator pembangunan merupakan identifikasi dan pengelompokan data indikator dalam RKP Tahun 2023.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan

Metadata indikator pembangunan disusun sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 untuk memberikan deskripsi dan gambaran pengelompokan data indikator pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2023. Selain itu, metadata menjadi instrumen penting sebagai informasi indikator dan acuan dalam menentukan indikator RKP tahun berikutnya. Terakhir, metadata pembangunan berfungsi secara signifikan dalam mendukung evaluasi pembangunan yang lebih akurat dan berkualitas.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup metadata indikator pembangunan disusun berdasarkan indikator pada sasaran pembangunan dan indikator di tingkat PN dan PP pada RKP Tahun 2023.

MANFAAT METADATA

Manfaat untuk pemangku kebijakan yaitu untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas indikator dalam RKP Tahun 2023 guna mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pencapaian rencana pembangunan.

Manfaat untuk kalangan publik yaitu menjadi acuan dalam memahami indikator RKP Tahun 2023 sebagai ukuran pencapaian pembangunan pemerintah.

METODE DAN SUMBER DATA

Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan metadata indikator pembangunan yakni:

1. Informasi eksisting metadata indikator yang termuat pada RKP Tahun 2022 dan dilanjutkan pada RKP Tahun 2023.
2. Pencarian, pengolahan dan pendefinisian informasi berdasarkan dokumen, literatur publik, dan laman *website* Instansi Pemerintahan dan/atau BPS.
3. Konfirmasi dan penyempurnaan oleh Penanggung Jawab PN RKP.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan metadata indikator pembangunan adalah dokumen dan literatur publik yang dapat diakses secara daring seperti Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, serta Publikasi Statistik seperti Publikasi BPS. Selanjutnya data yang tersedia juga dikonfirmasi dan disempurnakan oleh Penanggung Jawab PN RKP, serta didukung oleh reviu oleh BPS.

SASARAN PEMBANGUNAN

Indikator Sasaran Pembangunan 1 - 4



Pertumbuhan Ekonomi



Tingkat Kemiskinan



Tingkat Pengangguran Terbuka



Rasio Gini

Indikator Sasaran Pembangunan 5 - 8



Indeks Pembangunan Manusia



Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



Nilai Tukar Petani



Nilai Tukar Nelayan



METADATA SASARAN PEMBANGUNAN

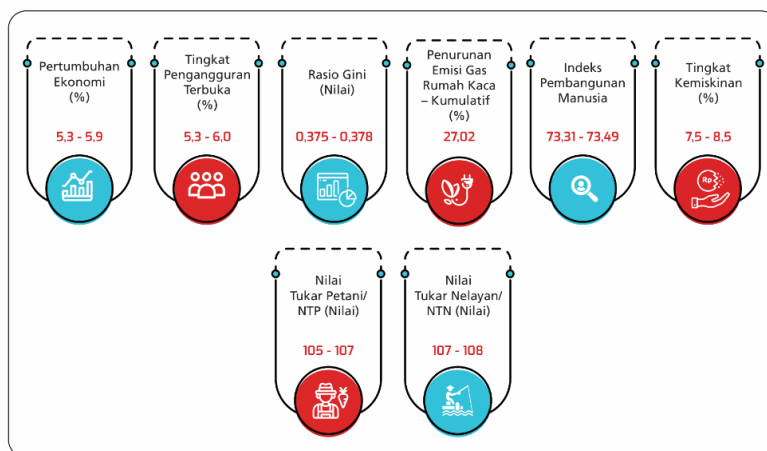
Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023

METADATA SASARAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan dokumen pemutakhiran RKP tahun 2023, sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:


- (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

INDIKATOR: Pertumbuhan Ekonomi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$G_t = \frac{PDB_t/PDRB_t - PDB_{t-1}/PDRB_{t-1}}{PDB_{t-1}/PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- G_t : Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulanan atau tahunan)
 $PDB_t/PDRB_t$: Produk domestik bruto periode t/Produk domestik regional bruto periode t (berdasarkan harga konstan)
 $PDB_{t-1}/PDRB_{t-1}$: Produk domestik bruto satu periode sebelumnya/Produk domestik regional bruto satu periode sebelumnya (berdasarkan harga konstan)

Tautan Publikasi

Buku Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas.

Disageragasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran atau Tahunan.

INDIKATOR: Tingkat Kemiskinan

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Keterangan:

- P_0 : Persentase penduduk miskin
 z : Garis kemiskinan
 y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : y_i/z
 q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
 n : Jumlah penduduk

Tautan Publikasi

Badan Pusat Statistik.

Disagregasi
Nasional.**Frekuensi Pengumpulan**
Semesteran atau Tahunan.**INDIKATOR: Tingkat Pengangguran Terbuka****Definisi**  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk menggambarkan ketidakterpakaian persediaan tenaga kerja akibat kurangnya lapangan kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Angkatan kerja menunjukkan kondisi besarnya jumlah persediaan (*supply*) tenaga kerja untuk melakukan aktivitas produksi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa di suatu ekonomi. Pengangguran terbuka adalah mereka yang: (1) tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$TPT = \frac{PP}{AK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT : Tingkat pengangguran (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

Tautan Publikasi

1. International Labour Organization, *Key Indicators of the Labour Market*, Edisi ke-9, 2016. (https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-anddatabases/kilm/WCMS_498929/lang--en/index.htm);
2. Badan Pusat Statistik. (<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>)

Disagregasi
Nasional.**Frekuensi Pengumpulan**
Semesteran atau Tahunan.**INDIKATOR: Rasio Gini****Definisi**  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

- GR : *Gini Ratio*/Rasio Gini
 f_i : Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke- i
 Y_i : Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- i


Tautan Publikasi

Badan Pusat Statistik.

Disagregasi
 Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
 Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Pembangunan Manusia

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di KTI dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks.

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$; 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$; 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$;
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$


Tautan Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. Badan Pusat Statistik. 2021.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah nilai penurunan emisi GRK terhadap *baseline* yang terjadi dengan melakukan kegiatan pembangunan rendah karbon seperti mengganti sumber energi dari energi fosil yang beremisi karbon menjadi energi baru terbarukan, peningkatan serapan karbon dengan melakukan penanaman, dan lain-lain. Indikator ini mengacu terhadap metadata indikator Prioritas Nasional 6 dengan nomenklatur (persentase penurunan emisi GRK).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Secara umum, penghitungan nilai persentase penurunan emisi dilakukan dengan cara membagi nilai potensi penurunan emisi yang tercatat dengan nilai *baseline* (BAU). Nilai emisi sendiri didapat dari Data Aktivitas dikalikan dengan Faktor Emisi.

$$E = DA \times FE$$

Keterangan:

E : Emisi GRK (ton)
DA : Data Aktivitas (T_j)
FE : Faktor Emisi (ton/T_j)

Catatan:

- *Activity unit* (atau Data Aktivitas) adalah besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya penanaman pohon 1 juta ha/tahun.
- Faktor Emisi adalah rata-rata emisi GRK suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 13,99 ton C/ha.


Tautan Publikasi

Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai Tukar Petani (NTP)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$NTP = \frac{I_t}{I_b}$$

Keterangan:

NTP	:	Nilai Tukar Petani
I_t	:	Indeks harga yang diterima petani
I_b	:	Indeks harga yang dibayar petani


Tautan Publikasi

Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai Tukar Nelayan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara Indeks Harga yang Diterima Nelayan (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (I_b) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

$$NTN = \frac{I_t}{I_b}$$

Keterangan:

NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
I_t	:	Indeks harga yang diterima nelayan
I_b	:	Indeks harga yang dibayar nelayan

Tautan Publikasi

1. Badan Pusat Statistik;
2. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

PRIORITAS NASIONAL 1

Jumlah Indikator PN

15



39

Jumlah Indikator PP



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 1

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan



SASARAN 1: Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

INDIKATOR: Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bauran energi terbarukan (%) adalah persentase antara total pasokan energi terbarukan terhadap total pasokan energi primer.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$BET = \frac{PET}{PEP} \times 100\%$$

Keterangan:

- BET : Bauran Energi Terbarukan
- PET : Total Pasokan Energi Terbarukan
- PEP : Total Pasokan Energi Primer

Sumber Data/Publikasi

Kementerian ESDM.


Tautan Publikasi

<https://www.esdm.go.id/en/publication/handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia-heesi>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pola Pangan Harapan merupakan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Artinya kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH ideal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi penduduk.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Skor PPH dihitung berdasarkan komposisi konsumsi pangan menggunakan Angka Kecukupan Energi berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018, yaitu 2.100 kkal/kap/hari. AKE di tingkat konsumsi adalah 2.150 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2018). Bobot kelompok pangan digunakan untuk perhitungan skor PPH. Skor maksimal diolah oleh GMSK-IPB dan Pusat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, 2004. Skor PPH diperoleh dari perkalian %AKG dengan bobot, dibandingkan dengan skor maksimal. Skor PPH jika melebihi skor maksimal, skor PPH yang digunakan adalah skor maksimal.

No	Kelompok Pangan	Bobot	Skor Maksimal
1	Padi-padian	0,5	25
2	Umbi-umbian	0,5	2,5
3	Pangan hewani	2	24
4	Minyak dan lemak	0,5	5
5	Buah/biji berminyak	0,5	1
6	Kacang-kacangan	2	10
7	Gula	0,5	2,5
8	Sayur dan buah	5	30
9	Lain-lain	0	0
	Jumlah		100

Sumber Data/Publikasi

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.


Tautan Publikasi

<http://bkp.pertanian.go.id/informasi-berkala>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Perhitungan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI.

Satuan

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Metode Penghitungan

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dilakukan pendataan estimasi Sumber Daya Ikan (SDI) yang ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan serta dilakukan penataan pengelolaan/pemanfaatannya.

Sumber Data/Publikasi

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50 Tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan).

Tautan Publikasi

<https://jdih.kkp.go.id/peraturan/50%20KEPMEN-KP%202017.pdf>.


Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Minimal dilakukan secara berkala setiap 5 tahun.



SASARAN 2: Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian

INDIKATOR: Rasio kewirausahaan nasional

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Perhitungan rasio kewirausahaan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap dibagi dengan jumlah angkatan kerja.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap dibagi jumlah angkatan kerja.

Sumber Data/Publikasi

Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS).


Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/08/b547a5642aeb04d071cb83d4/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2021.html>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Semesteran (Februari dan Agustus).

INDIKATOR: Pertumbuhan PDB pertanian

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pertanian pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor pertanian.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$PDB = \frac{C + I + G + (X - M)}{100}$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian.

Tautan Publikasi

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=16>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Pertumbuhan PDB perikanan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB perikanan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor perikanan dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor perikanan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$PDB = \frac{C + I + G + (X - M)}{100}$$

Keterangan:

- PDB : Produk Domestik Bruto
- C : Konsumsi Rumah Tangga
- I : Total Investasi
- G : Total Pengeluaran Pemerintah
- X-M : Selisih Ekspor dan Impor

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Berita Resmi Statistik 5 Februari 2021, Badan Pusat Statistik (BPS).

Sumber Data/Publikasi

1. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20\(2\)%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20(2)%20(1).pdf);
2. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

PDB industri pengolahan pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan. Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDB industri dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun ke-t terhadap nilai tambah industri pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri pada tahun t-1, dikalikan 100 persen.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur (Pengolahan)} \\ &= \frac{(NTSIM_t - NTSIM_{t-1})}{NTSIM_{t-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

NTSIM_t : Nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun ke-t

NTSIM_{t-1} : Nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun tahun sebelumnya

Tautan Publikasi

1. Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS).

Sumber Data/Publikasi

1. <https://kemenperin.go.id/dokumen-kinerja/>;
2. <https://www.bps.go.id/pressrelease/>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Kontribusi PDB industri pengolahan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\text{Kontribusi PDB Industri Manufaktur (Pengolahan)} = \frac{(NTSIM_t)}{PDB_t} \times 100\%$$

Keterangan:

NTSIM_t : Nilai tambah industri manufaktur (pengolahan) pada tahun ke-t

PDB_t : Nilai PDB nasional pada periode sama

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS).


Tautan Publikasi

1. <https://kemenperin.go.id/dokumen-kinerja/>;
2. <https://www.bps.go.id/pressrelease/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai devisa pariwisata

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah (nilai) devisa sektor pariwisata adalah penerimaan devisa dari sektor pariwisata yang berasal dari kunjungan wisatawan mancanegara. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata mencakup, namun tidak terbatas pada penerimaan dari jasa perjalanan (*travel*) dan jasa transportasi penumpang (*passenger transport*).

Satuan

Miliar US\$.

Metode Penghitungan

$$PDJP = KW_n \times RPW_n$$

Keterangan:

- PDJP : Nilai penerimaan devisa jasa perjalanan (miliar US\$)
- KW_n : Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut negara asal dan tujuan kunjungan (orang)
- RPW_n : Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan menurut negara asal dan tujuan kunjungan (US\$)

Sumber Data/Publikasi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik.


Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Kontribusi PDB pariwisata

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kontribusi pariwisata terhadap PDB didefinisikan sebagai: (a) dari sisi produksi merupakan persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku) dan (b) dari sisi pengeluaran merupakan persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total PDB (harga berlaku). Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB merupakan pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB dari periode t-1 ke periode t.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Rumus 1:

$$TDGDP = \frac{(C_{winus} + E_{wisnas} + E_{pemerintah} + I_{pariwisata} + NX_{perjalanan})}{PDB} \times 100\%$$

Rumus 2:

$$LPTDGP = \frac{(TDGDP_t - TDGDP_{t-1})}{TDGDP_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

TDGDP	: Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (<i>tourism direct gross domestic product</i>) (%)
LTDGDP	: Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB (%)
TDGDP _t	: Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode ke-t (%)
TDGDP _{t-1}	: Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB pada periode tahun sebelumnya (%)
PDB	: PDB pada periode sebelumnya (%)
C _{winas}	: Nilai konsumsi wisatawan nusantara (rupiah)
E _{winas}	: Nilai pengeluaran wisatawan nasional di domestik (termasuk <i>pre</i> dan <i>post trip</i>) (rupiah)
E _{pemerintah}	: Nilai pengeluaran pemerintah untuk pariwisata (rupiah)
I _{pariwisata}	: Nilai investasi pariwisata (rupiah)
NX _{perjalanan}	: Nilai ekspor <i>netto</i> jasa perjalanan (ekspor jasa perjalanan dikurangi impor jasa perjalanan) (rupiah)

Sumber Data/Publikasi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Penyediaan lapangan kerja per tahun

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penyediaan lapangan kerja per tahun merupakan jumlah tambahan lapangan kerja yang tercipta setiap tahun. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur ekspansi ekonomi dan dapat menggambarkan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Satuan

Juta orang.

Metode Penghitungan

$$\text{Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun} = \text{PB}_t - \text{PB}_{t-1}$$

Keterangan:

PB _t	: Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun t (juta orang)
PB _{t-1}	: Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun sebelumnya t-1 (juta orang)
t	: Tahun pengukuran

Sumber Data/Publikasi

1. International Labour Organization, *Key Indicators of the Labour Market*, Edisi ke-9, 2016;
2. Survei Angkatan Kerja Nasional/Keadaan Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

1. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_498929/lang--en/index.htm;
2. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab4>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

INDIKATOR: Pertumbuhan investasi (PMTB)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Pertumbuhan investasi (PTMB) didefinisikan sebagai kenaikan atau penurunan investasi pada suatu periode.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$Y_t = \frac{(PMTB_t - PMTB_{t-1})}{PMTB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Y_t : Pertumbuhan Investasi (PMTB)
 $PMTB_t$: Pembentukan Modal Tetap Bruto tahun ke t
 $PMTB_{t-1}$: Pembentukan Modal Tetap Bruto tahun ke t-1 (sebelumnya)

Sumber Data/Publikasi

Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan dan triwulanan.

INDIKATOR: Pertumbuhan ekspor industri pengolahan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pertumbuhan ekspor industri pengolahan dapat diperoleh dengan mengurangi nilai ekspor industri pengolahan pada tahun ke-t terhadap nilai ekspor industri pengolahan pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai ekspor industri pada tahun t-1, dikalikan 100 persen.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\text{Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan} = \frac{(NEIP_t - NEIP_{t-1})}{NEIP_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $NEIP_t$: Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun ke-t
 $NEIP_{t-1}$: Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun ke t-1 (sebelumnya)

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS).


Tautan Publikasi

1. <https://kemenperin.go.id/dokumen-kinerja/>;
2. <https://www.bps.go.id/pressrelease/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (non residen). Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa didefinisikan sebagai kenaikan atau penurunan ekspor barang dan jasa Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada suatu periode. Penghitungan estimasi ekspor barang dan jasa ADHK diperoleh dengan metode deflasi, yaitu membagi ekspor Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan indeks harga (deflator) yang bersesuaian. Deflator ekspor impor barang adalah Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) ekspor dan impor menurut HS 2 digit, sedangkan deflator ekspor impor jasa adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) domestik dan internasional.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$Y_t = \frac{(X_t - X_{t-1})}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t : Ekspor barang dan jasa ADHK tahun ke t

X_{t-1} : Ekspor barang dan jasa ADHK tahun ke t-1 (sebelumnya)

Sumber Data/Publikasi

Statistik Indonesia/Laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan (BRS), Badan Statistik Indonesia.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan dan triwulanan.

INDIKATOR: Rasio perpajakan terhadap PDB

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan perbandingan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto nominal. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan perpajakan suatu negara. Komponen penerimaan perpajakan di Indonesia mencakup penerimaan pajak pemerintah pusat dan penerimaan kepabeanan dan cukai.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\text{Rasio Perpajakan terhadap PDB} = \frac{\text{TPDN}}{\text{PDB}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.

Disagregasi
Nasional.


Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

SASARAN 1: Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

INDIKATOR: Kapasitas terpasang pembangkit EBT

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Satuan

Gigawatt.

Metode Penghitungan

Kumulatif kapasitas pembangkit masing-masing PLT EBT meliputi panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian ESDM.

Tautan Publikasi

<https://www.esdm.go.id/id/publikasi/laporan-kinerja>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Biofuel secara umum adalah bahan bakar dari biomassa (materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan). Utamanya jenis *biofuel* yang umum digunakan yaitu biodiesel dan bioetanol. Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik didefinisikan sebagai konsumsi domestik atas pemakaian jenis *biofuel* tersebut (B20, B30, B40).

Satuan

Juta kilo liter.

Metode Penghitungan

Pemanfaatan *biofuel* untuk domestik didasarkan pada pemanfaatan biodiesel baik dari pengadaan biodiesel dalam kerangka pembiayaan BDPKS maupun konsumsi *end user*.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM.

Tautan Publikasi

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-2020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 2: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN 1: Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

INDIKATOR: Produktivitas air (*water productivity*)

Definisi (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah air yang digunakan untuk budi daya tanaman.

Satuan

kg/m³.

Metode Penghitungan**

$$\text{Produktivitas Air} = \frac{\text{Jumlah panen (kg)}}{\text{Jumlah debit irigasi (m}^3\text{)}}$$

**Sampai saat ini perhitungan produktivitas air di Indonesia belum ada data dan laporan resmi ter-*update*. Data yang ada hanya berupa produktivitas air di daerah irigasi tertentu (*case study*) dan belum dapat merepresentasikan produktivitas air secara nasional. Sumber data untuk perhitungan tersebut tidak bisa merepresentasikan produktivitas air nasional. (*usul BPS: perubahan nama indikator diditilkan sesuai penggunaannya menjadi: "Produktivitas Air di Sektor Pertanian"*)

Sumber Data/Publikasi

-

Tautan Publikasi

-

Disagregasi

-

Frekuensi Pengumpulan

-



PROGRAM PRIORITAS 3: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan

SASARAN 1: Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan

INDIKATOR: Nilai Tukar Petani (NTP)

Definisi (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$NTP = \frac{I_t}{I_b}$$

Keterangan:

NTP : Nilai Tukar Petani

I_t : Indeks harga yang diterima petani

I_b : Indeks harga yang dibayar petani

Sumber Data/Publikasi

Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Angka Kecukupan Energi (AKE)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Angka Kecukupan Energi (AKE) merupakan angka minimum yang perlu dipenuhi untuk kebutuhan sehari berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018.

Satuan

Kkal/kapita/hari.

Metode Penghitungan

Total konsumsi energi penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi energi setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi energi masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan energi setiap jenis pangan tersebut. Penghitungan konsumsi energi menggunakan standar Angka Kecukupan Energi adalah 2.100 kkal/kapita/hari menurut rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018.

Sumber Data/Publikasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Tautan Publikasi

http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__28_Th_2019_ttg_Angka_Kecukupan_Gizi_Yang_Dianjurkan_Untuk_Masyarakat_Indonesia.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Semesteran (Maret dan September).

INDIKATOR: Angka Kecukupan Protein (AKP)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Angka Kecukupan Protein (AKP) merupakan angka minimum yang perlu dipenuhi untuk kebutuhan sehari sesuai rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018.

Satuan

Gram/kapita/hari.

Metode Penghitungan

Total konsumsi protein penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi protein setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi protein dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi protein masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan protein setiap jenis pangan tersebut. Penghitungan konsumsi protein menggunakan standar Angka Kecukupan Protein adalah 57 gram/kapita/hari menurut rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018.

Sumber Data/Publikasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Tautan Publikasi

http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__28_Th_2019_ttg_Angka_Kecukupan_Gizi_Yang_Dianjurkan_Untuk_Masyarakat_Indonesia.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Semesteran (Maret dan September).

INDIKATOR: *Prevalence of Undernourishment (PoU)*

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, di mana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Dalam mengukur PoU memperhitungkan 4 empat parameter yaitu (1) *Dietary Energy Consumption/DEC*, (2) *Coefficient of Variation/CV*, dan (3) *Skewness* yang ketiganya menggambarkan distribusi tingkat konsumsi energi biasanya dari suatu populasi, serta (4) *Minimum Dietary Energy Requirement/MDER* yang menentukan batas terendah dari kisaran kebutuhan energi normal rata-rata individu. Pada umumnya distribusi konsumsi energi dari suatu populasi dapat dianalisis secara statistik dari data konsumsi makanan, sedangkan MDER dapat dianalisis berdasarkan data tinggi badan populasi suatu negara; indeks massa tubuh dan *weight gain* menurut

kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan referensi FAO/WHO/UNU *joint expert consultation*.

$$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$$

Keterangan:

- PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal.
 MDER : Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietary Energy Requirement*).
 f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita

Sumber Data/Publikasi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini mengukur persentase individu di pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan terakhir. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Experience Scale/FIES*) berdasarkan skala referensi global. Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrem merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Kondisi seperti ini menjadi dasar untuk membuat skala pengukuran kerawanan pangan berdasarkan pengalaman. Dengan metode statistik tertentu, skala ini memungkinkan untuk menganalisis prevalensi kerawanan pangan secara konsisten antarnegara. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat langsung menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Data pada tingkat individu atau rumah tangga dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner skala pengalaman kerawanan pangan melalui 8 pertanyaan modul FIES. Data dapat dianalisis menggunakan *Rasch Model*. Terdapat tiga kategori FIES: (a) tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan; (b) rawan pangan sedang atau parah; dan (c) rawan pangan parah.

Rumus 1:

$$FI_{mod+sev} = \sum_i p_{imod+sev} \times w_i$$

Rumus 2:

$$FI_{sev} = \sum_i p_{isev} \times w_i$$

Keterangan:

$FI_{mod+sev}$: Prevalensi rawan pangan sedang atau parah.

FI_{sev} : Rawan pangan parah.

w_i : Berat badan

i : Individu

Estimasi probabilitas rawan pangan sedang atau parah adalah $p_{mod+sev}$ dan probabilitas rawan pangan parah adalah p_{sev} , di mana $0 < p_{sev} < p_{mod+sev} < 1$. Probabilitas tidak rawan pangan atau rawan pangan ringan diperoleh $p_{fs} = 1 - p_{mod+sev}$.

Sumber Data/Publikasi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.

Disagregasi
Nasional.


Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 4: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan

SASARAN 1: Meningkatkan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan

INDIKATOR: Konservasi Kawasan Kelautan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Luas kumulatif Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN dan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan daerah (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau dicadangkan oleh Kepala Daerah.

Satuan

Juta ha.

Metode Penghitungan

Jumlah luas kawasan konservasi perairan *existing* ditambah dengan penambahan luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Menteri yang diatur melalui beberapa tahapan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tautan Publikasi

[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20\(2\)%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20(2)%20(1).pdf).

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah Total Hasil Tangkapan dalam satu tahun (THTIT) terhadap jumlah potensi sumber daya ikan (*maximum sustainable yield* -MSY) dalam tahun yang sama, dinyatakan dalam persentase.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Total hasil tangkapan jenis ikan dalam periode waktu tertentu (THTIT) dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (*maximum sustainable yield* -MSY) dalam periode waktu yang sama dikali dengan seratus persen dan dinyatakan dengan satuan persen (%).

$$\begin{aligned} &\text{Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman} \\ &= \frac{\text{THTIT}}{\text{MSY}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

THTIT : Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan dalam Periode Waktu Tertentu.

MSY : *Maximum Sustainable Yield*/jumlah potensi sumber daya ikan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Tautan Publikasi

[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20\(2\)%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20(2)%20(1).pdf).

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Produksi perikanan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budi daya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budi daya.

Satuan

Juta ton.

Metode Penghitungan

Jumlah volume produksi perikanan setiap tahun, terdiri dari perikanan hasil tangkapan, perikanan hasil budidaya, dan rumput laut.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Tautan Publikasi

[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20\(2\)%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20(2)%20(1).pdf).

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Produksi garam

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan jumlah produksi garam yang dihitung dalam satuan ton.

Satuan

Juta ton.

Metode Penghitungan

Jumlah volume produksi garam setiap tahun.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Tautan Publikasi

[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20\(2\)%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20(2)%20(1).pdf).

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai tukar nelayan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara Indeks Harga yang Diterima Nelayan (I_t) dengan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (I_b) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

$$NTN = \frac{I_t}{I_b}$$

Keterangan:

- NTN : Nilai Tukar Nelayan
- I_t : Indeks harga yang diterima nelayan
- I_b : Indeks harga yang dibayar nelayan

Sumber Data/Publikasi

1. Badan Pusat Statistik;
2. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tautan Publikasi

[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20\(2\)%20\(1\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/LKJ%20KKP%202020%20Revisi%20(2)%20(1).pdf).

Disagregasi
Nasional.


Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 5: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi

SASARAN 1: Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi

INDIKATOR: Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Perhitungan rasio (persentase) kredit UMKM terhadap total kredit perbankan dihitung pada setiap akhir tahun.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Rasio ini didapat dari membagi jumlah penyaluran kredit yang dikategorikan dalam penyaluran sektor UMKM dengan jumlah penyaluran kredit perbankan.

Sumber Data/Publikasi

Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia.

Tautan Publikasi

<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx>

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Bulanan (data Bank Indonesia).

INDIKATOR: Pertumbuhan wirausaha

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pertumbuhan wirausaha digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan jumlah orang berwirausaha. Pertumbuhan wirausaha dihitung berdasarkan perubahan jumlah orang berwirausaha antarperiode tahunan (wirausaha = penduduk usia di atas 15 tahun yang berusaha sendiri dan dibantu buruh tetap).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Pertumbuhan wirausaha

$$= \frac{\text{Jumlah wirausaha tahun } n - \text{jumlah wirausaha tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wirausaha tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Survei Angkatan Kerja Nasional a.k.a Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

www.bps.go.id/publication.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semester (Februari dan Agustus).

INDIKATOR: Kontribusi koperasi terhadap PDB

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor koperasi.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

PDB yang disumbangkan oleh koperasi dan UKM dibagi total PDB.

$$\text{Kontribusi koperasi terhadap PDB} = \frac{\text{PDB yang disumbangkan oleh koperasi}}{\text{Total PDB}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tautan Publikasi

https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1600168154_2019_LAKIP_Kementerian.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan


2019 (per 6 September 2021).



PROGRAM PRIORITAS 6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi

SASARAN 1: Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi

INDIKATOR: Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

PDB industri pengolahan nonmigas pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan nonmigas dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan nonmigas. Perhitungan menggunakan atas dasar harga konstan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Pertumbuhan PDB industri nonmigas dapat diperoleh dengan mengurangi nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun ke-t terhadap nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun t-1, dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan PDB industri nonmigas =

$$\frac{\text{Nilai tambah industri pengolahan nonmigas tahun } t - \text{nilai tambah industri pengolahan nonmigas } (t-1)}{\text{Nilai tambah industri pengolahan nonmigas } (t-1)} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Kinerja 2021, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik.


Tautan Publikasi

1. <https://kemenperin.go.id/dokumen-kinerja>.
2. <https://www.bps.go.id/pressrelease/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor industri pengolahan nonmigas.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Perhitungan kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas dilakukan dengan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas dibagi nilai PDB nasional dikalikan 100 persen.

$$\text{Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas} = \frac{\text{nilai tambah industri pengolahan nonmigas}}{\text{nilai PDB nasional}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Kinerja 2021, Kementerian Perindustrian;
2. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

1. <https://kemenperin.go.id/dokumen-kinerja>;
2. <https://www.bps.go.id/pressrelease/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai tambah ekonomi kreatif

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai tambah ekonomi kreatif terdiri dari 17 subsektor ekonomi kreatif, yaitu: (1) Arsitektur; (2) Desain Interior; (3) Desain Komunikasi Visual; (4) Desain Produk; (5) Fashion; (6) Film, Animasi, Video; (7) Fotografi dan Periklanan; (8) Kriya; (9) Kuliner; (10) Musik; (11) Aplikasi; (12) Pengembangan Permainan; (13) Penerbitan; (14) Periklanan; (15) TV dan Radio; (16) Seni Pertunjukan; dan (17) Seni Rupa.

Satuan

Triliun rupiah.

Metode Penghitungan

Total nilai yang bersumber dari 17 subsektor ekonomi kreatif.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tautan Publikasi

https://s3-kemenparekraf.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/LAKIN_Kemenparekraf_2020_UPDATE_UPLOAD_20082021_da6e5232c6.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah tenaga kerja industri pengolahan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Tenaga kerja di sektor industri pengolahan menggambarkan kemampuan sektor industri pengolahan untuk menyediakan lapangan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan.

Satuan

Juta orang.

Metode Penghitungan

$PB_{\text{industri_pengolahan}}$ = Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan (juta orang).

Sumber Data/Publikasi

Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab4>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

INDIKATOR: Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kontribusi tenaga kerja di sektor industri pengolahan terhadap total tenaga kerja menunjukkan peran sektor industri pengolahan kepada keseluruhan lapangan kerja.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\%PB_{\text{industri_pengolahan}} = \frac{PB_{\text{industri_pengolahan}}}{PB} \times 100\%$$

Keterangan:

- $\%PB_{\text{industri_pengolahan}}$: Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja (%)
- $PB_{\text{industri_pengolahan}}$: Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan (juta orang)
- PB : Jumlah penduduk yang bekerja (juta orang)

Sumber Data/Publikasi

Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab4>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

INDIKATOR: Jumlah tenaga kerja pariwisata

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Tenaga kerja di sektor pariwisata menggambarkan kemampuan sektor pariwisata untuk menyediakan lapangan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam jumlah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata. Sektor pariwisata terdiri dari subsektor jasa restoran; jasa hiburan, rekreasi dan kebudayaan; jasa angkutan udara; dan jasa perhotelan.

Satuan

Juta orang.

Metode Penghitungan

$$PB_{\text{pariwisata}} = \text{Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata (juta orang)}$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tautan Publikasi

https://s3-kemenparekraf.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/LAKIN_Kemenparekraf_2020_UPDATE_UPLOAD_20082021_da6e5232c6.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Tenaga kerja di sektor pariwisata menggambarkan kemampuan sektor ekonomi kreatif untuk menyediakan lapangan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif terdiri dari subsektor pengembang permainan; kriya; desain interior; musik; seni rupa; desain produk; fesyen; kuliner; film, animasi dan video; fotografi; desain komunikasi visual; televisi dan radio; arsitektur; periklanan; seni pertunjukan; penertiban; dan aplikasi.

Satuan

Juta orang.

Metode Penghitungan

$$PB_{\text{ekonomi_kreatif}} = \text{Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan (juta orang)}$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Tautan Publikasi

https://s3-kemenparekraf.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/LAKIN_Kemenparekraf_2020_UPDATE_UPLOAD_20082021_da6e5232c6.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai realisasi PMA dan PMDN

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Satuan

Triliun rupiah.

Metode Penghitungan

Nilai realisasi PMA dan PMDN dihitung dari PMA dikalikan (Kurs) ditambah dengan PMDN.

$$\text{Nilai realisasi PMA dan PMDN} = \text{PMA} \times (\text{kurs}) + \text{PMDN}$$

*Catatan: Kurs yang digunakan mengacu pada kurs APBN sebagaimana dalam rilis realisasi investasi triwulanan dari BKPM.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020.

Tautan Publikasi

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/ppid/file_upload/Laporan_Kinerja_2019-com.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan dan triwulanan.

INDIKATOR: Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. PMA dan PMDN Industri Pengolahan adalah total PMA PMDN pada 12 sektor industri berdasarkan 23 sektor ekonomi (dalam rilis data BPS) atau sama dengan PMA PMDN sektor sekunder (istilah yang digunakan dalam rilis BKPM).

Satuan

Triliun rupiah.

Metode Penghitungan

Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan dihitung dari PMA 12 sektor industri dikalikan (Kurs) ditambah dengan total PMDN 12 sektor industri.

Nilai realisasi PMA dan

PMDN industri pengolahan = PMA 12 sektor industri × (kurs) + total PMDN 12 sektor industri

*Catatan: Kurs yang digunakan mengacu pada kurs APBN sebagaimana dalam rilis realisasi investasi triwulanan dari Kementerian Investasi/BKPM.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020.

Tautan Publikasi

https://www.bkpm.go.id/images/uploads/ppid/file_upload/Laporan_Kinerja_2019-com.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan dan triwulanan.

INDIKATOR: Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian merupakan sub dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada komponen penyusun PDB.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dihitung dari perbandingan antar periode (Q to Q dan Y on Y) PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian atas dasar harga konstan.

$$= \frac{\text{Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian periode (Q to Q dan Y on Y) PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian}}{\text{dasar harga konstan}}$$

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2016-2020, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/10/16/54be7f82b7d3aa22f5e2c144/pdb-indonesia-triwulanan-2016-2020.html>.

Disagregasi
Nasional.


Frekuensi Pengumpulan
Triwulanan.



PROGRAM PRIORITAS 7: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

SASARAN 1: Meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

INDIKATOR: Neraca perdagangan barang

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu.

Satuan

Miliar US\$.

Metode Penghitungan

Neraca Perdagangan = Ekspor – Impor

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Perdagangan, 2021.

Tautan Publikasi

https://www.kemendag.go.id/storage/article/content_upload/transparansi_kerja/15-Lapkin_Kemendag_2020_compressed.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Pertumbuhan ekspor nonmigas

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Ekspor nonmigas merupakan agregasi ekspor barang di luar komoditas minyak dan gas. Kelompok ekspor barang nonmigas dicatat berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Satuan

(%).

Metode Penghitungan

$$Y_t = \frac{XNM_t - XNM_{t-1}}{XNM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Y_t : Pertumbuhan ekspor nonmigas
 XNM_t : Nilai ekspor nonmigas tahun ke t
 XNM_{t-1} : Nilai ekspor nonmigas tahun ke t-1

Sumber Data/Publikasi

1. Situs web Badan Pusat Statistik (sub situs Ekspor-Impor), Badan Pusat Statistik;
2. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia bulanan, Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik;
3. Laporan Kinerja, Kementerian Perdagangan.

Tautan Publikasi

1. <https://www.bps.go.id/indicator/8/1261/1/pertumbuhan-ekspor-produk-nonmigas.html>;
2. https://www.kemendag.go.id/storage/article/content_upload/transparansi_kerja/15-Lapkin_Kemendag_2020_compressed.pdf.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Bulanan (Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik), tahunan.

INDIKATOR: Jumlah wisatawan mancanegara

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah kunjungan dari wisatawan yang berasal dari mancanegara atau luar wilayah daerah kekuasaan Indonesia.

Satuan

Juta kunjungan.

Metode Penghitungan

Jumlah orang/wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021.

Tautan Publikasi

https://s3-kememparekraf.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/LAKIN_Kememparekraf_2020_UPDATE_UPLOAD_20082021_da6e5232c6.pdf.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Bulanan (Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik).

INDIKATOR: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah kunjungan dari wisatawan yang berasal dari dalam negeri atau dalam wilayah daerah kekuasaan Indonesia, bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja serta secara sukarela kurang dari 6 bulan.

Satuan

Juta perjalanan.

Metode Penghitungan

Jumlah orang/atau wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021.

Tautan Publikasi

https://s3-kememparekraf.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/LAKIN_Kememparekraf_2020_UPDATE_UPLOAD_20082021_da6e5232c6.pdf.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Industri berteknologi tinggi adalah industri yang intensitas penelitian dan pengembangan (*Research and Development* (R&D)) tinggi untuk menghasilkan suatu produk. Industri ini ditandai dengan rasio pengeluaran untuk R&D terhadap nilai tambah bruto tinggi. Klasifikasi produk industri berteknologi tinggi mengacu pada UNCTAD (<https://unctadstat.unctad.org/en/Classifications.html>).

Satuan

(%).

Metode Penghitungan

$$Y_t = \frac{XHT_t - XHT_{t-1}}{XHT_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Y_t : Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi.
 XHT_t : Nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi tahun ke t.
 XHT_{t-1} : Nilai ekspor produk industri berteknologi tinggi tahun ke t-1.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Perdagangan, 2021.

Tautan Publikasi

https://www.kemendag.go.id/storage/article/content_upload/transparansi_kerja/15-Lapkin_Kemendag_2020_compressed.pdf.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Bulanan (*lag* 2-3 bulan), tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 8: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi****SASARAN 1: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi****INDIKATOR: Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kontribusi sektor jasa keuangan yang merupakan komponen penyusun PDB.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Nilai persentase kontribusi PDB yang bersumber dari sektor jasa keuangan.

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2016-2020, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/10/16/54be7f82b7d3aa22f5e2c144/pdb-indonesia-triwulanan-2016-2020.html>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Triwulanan.

INDIKATOR: Skor Logistic Performance Index

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

LPI mengukur efisiensi *on-the-ground* rantai suplai perdagangan atau kinerja logistik. Rantai suplai merupakan tulang punggung perdagangan dan bisnis internasional. Sementara biaya logistik meliputi biaya transportasi, pergudangan, *clearance* perbatasan, sistem pembayaran dan fungsi-fungsi terkait lain.

Satuan
Skor.

Metode Penghitungan
Skor LPI yang didapatkan berdasarkan data Bank Dunia.


Sumber Data/Publikasi
Full LPI Dataset, The World Bank.

Tautan Publikasi
<https://lpi.worldbank.org>

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
2-3 tahun sekali.

INDIKATOR: Rasio M2/PDB

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

M2 adalah uang beredar dalam arti luas, yang sering juga disebut sebagai likuiditas perekonomian, terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D), dan uang kuasi (T).

Satuan
persen (%).

Metode Penghitungan
$$\text{Rasio M2/PDB} = \frac{\text{Nilai proporsi M2}}{\text{Nilai PDB}} \times 100\%$$

Sumber Publikasi
-

Tautan Publikasi
-

Tahun Data
-

Disagregasi
-

Frekuensi Pengumpulan
-

INDIKATOR: Peringkat *travel and tourism development index*

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

*Travel and Tourism Competitiveness Index (TTDI) atau dulu dikenal dengan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang terdapat pada Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) setiap 2 tahun sekali, memberikan gambaran posisi Indonesia di pasar global terkait daya saing kepariwisataannya. Indeks ini dikeluarkan oleh WEF, yang di dalamnya terdapat indikator-indikator kebijakan suatu negara yang memungkinkan pengembangan berkelanjutan dari sektor perjalanan (*travel*) dan pariwisata, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pengembangan dan daya saing suatu negara. TTCI menyediakan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 subindeks yang membentuk nilai TTCI. Subindeks pertama yaitu *enabling environment*, subindeks kedua yaitu *travel and tourism policy and enabling conditions*, subindeks ketiga yaitu *infrastructure*, dan subindeks keempat yaitu *natural and cultural resources*.*

Satuan
Peringkat.

Metode Penghitungan

Nilai peringkat yang didapatkan dari World Economic Forum (WEF) setiap 2 tahun sekali.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021.

Tautan Publikasi

https://s3-kememparekraf.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/LAKIN_Kememparekraf_2020_UPDATE_UPLOAD_20082021_da6e5232c6.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

2 tahun sekali.

INDIKATOR: Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini mengukur progres pencapaian penyelesaian *core tax* yang dilaksanakan oleh Ditjen Pajak dengan mengacu pada progres penyelesaian rangkaian aktivitas pembangunan *core tax* dari tahun 2021-2024. Rumusan ini telah memperhatikan metode baru pembangunan *core tax* di mana pembangunan *core tax* tidak lagi dilaksanakan per modul, namun per tahapan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode Penghitungan yang digunakan yaitu (total bobot penyelesaian aktivitas tahun 20xx dibagi dengan total bobot seluruh aktivitas tahun 2021- 2024) x 100%.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Keuangan, 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18240/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2020.pdf>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

-

INDIKATOR: Imbal hasil (*yield*) surat berharga negara

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dalam rangka melaksanakan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 yang menetapkan target berupa penurunan atas *yield* SBN pemerintah. Pada tahun 2021, ditetapkan target IKU adalah sebesar 7,29% (lebih rendah 0,01% dari *baseline* tahun 2019 sebesar 7,3% dan lebih rendah 0,82% dari target *yield* tahun 2020 sebesar 8,11%).

Tenor SBN yang menjadi objek pengukuran IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. SUN: 5, 10, 15 dan 20 tahun
- b. SBSN: 2, 4, 13 dan 25 tahun

Realisasi WAY diukur dari hasil penerbitan dengan metode lelang selama satu tahun.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\text{Imbal hasil (yield) surat berharga negara} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi WAY SBN}}{\text{Target WAY SBN}} \right) \right] \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Keuangan, 2021.


Tautan Publikasi

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18240/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
-

INDIKATOR: Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Mengukur rasio TKDD berbasis kinerja tahun berjalan yang diukur berdasarkan realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja atas 5 (lima) jenis dana, yaitu:

1. DAK Fisik; 2. DAK Non Fisik; 3. DBH CHT; 4. DID; dan 5. Dana Desa

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat =

$$\left[\frac{\text{Alokasi TKDD berbasis kinerja tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKDD}} \times 50\% \right] + \left[\frac{\text{Realisasi penyaluran TKDD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan}}{\text{Alokasi TKDD}} \times \text{bobot } 50\% \right]$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Keuangan, 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18240/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
-

INDIKATOR: Penyediaan Data Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Mengukur jumlah publikasi/laporan tahunan terkait statistik bidang ekonomi dan sosial:

1. *Database* atau publikasi statistik wisatawan nusantara;
2. *Database* atau publikasi statistik wisatawan mancanegara;
3. *Database* atau publikasi *tourism satellite account*;
4. *Database* atau publikasi statistik ekonomi kreatif;
5. *Database* atau publikasi statistik *e-commerce*;
6. *Database* atau publikasi statistik tanaman pangan;
7. *Database* atau publikasi statistik tanaman pangan dengan KSA;
8. *Database* atau publikasi sensus pertanian (2022-2024);

9. *Database* atau publikasi disagregasi PMTB (2023).

Satuan

Database.

Metode Penghitungan

Jumlah publikasi tahunan beserta *data set* yang dipublikasikan oleh BPS dan atau Kemenparekraf/Baparekraf.

Sumber Data/Publikasi

1. Badan Pusat Statistik;
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf.

Tautan Publikasi

1. <https://www.bps.go.id/publication.html>;
2. <https://kemenparekraf.go.id/publikasi-statistik-ekonomi-kreatif>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

PRIORITAS NASIONAL 2

Jumlah Indikator PN

6



21

Jumlah Indikator PP



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 2

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023

METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 2

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan



SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

INDIKATOR: Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Kawasan Timur Indonesia (Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua) dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Satuan

persen (%)/tahun.

Metode Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t : PDRB KTI tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB KTI tahun sebelumnya

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2016-2020. BPS. 2021.


Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/07/5f082ed36ac6601d2ac04e05/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2016-2020.html>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: IPM KTI

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di KTI dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks.

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi,
nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase penduduk miskin KTI

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penduduk miskin KTI adalah penduduk KTI yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Satuan**Metode Penghitungan**

persen (%).
$$\text{Persentase penduduk miskin KTI} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin KTI}}{\text{Jumlah penduduk KTI}} \times 100\%$$

Tautan Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. BPS. 2020.

Sumber Data/Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.


Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



SASARAN 2: Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)

INDIKATOR: Laju pertumbuhan PDRB KBI

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KBI menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Kawasan Barat Indonesia (Sumatera, Jawa-Bali) dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Satuan

persen (%)/tahun.

Metode Penghitungan

$$\text{Laju pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t : PDRB KBI tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB KBI tahun sebelumnya

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2016-2020. BPS. 2021.


Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/07/5f082ed36ac6601d2ac04e05/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2016-2020.html>.

Disagregasi
Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: IPM KBI

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Barat Indonesia (KBI) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di KBI dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks.

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\text{min}}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\text{min}}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.


Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi, nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase penduduk miskin KBI

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia (KBI) adalah penduduk KBI yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\text{Persentase penduduk miskin KBI} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin KBI}}{\text{Jumlah penduduk KBI}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. BPS. 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 1: Pembangunan Wilayah Sumatera**

SASARAN 1: Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera

INDIKATOR: Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Sumatera dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Satuan

persen (%)/tahun.

Metode Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Sumatera tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Sumatera tahun sebelumnya

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2016-2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/07/5f082ed36ac6601d2ac04e05/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2016-2020.html>.


Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: IPM Provinsi di Wilayah Sumatera

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Sumatera adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Sumatera dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks. (*catatan BPS: tanpa nilai satuan*)

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\text{min}}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\text{min}}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.

INDIKATOR: IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Jawa-Bali adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Jawa-Bali dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks. (*catatan BPS: nilai tanpa satuan*)

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\text{min}}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\text{min}}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.


Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.

Disagregasi
Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Nusa Tenggara adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Nusa Tenggara dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks. (*catatan BPS: nilai tanpa satuan*)

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi, nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara adalah penduduk Wilayah Nusa Tenggara yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara} \\ &= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Nusa Tenggara}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber Data/Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. BPS. 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 4: Pembangunan Wilayah Kalimantan**

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan

INDIKATOR: Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Kalimantan dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Satuan

persen (%)/tahun.

Metode Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Kalimantan tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Kalimantan tahun sebelumnya

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2016-2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/07/5f082ed36ac6601d2ac04e05/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2016-2020.html>.


Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Kalimantan adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Kalimantan dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks. (*catatan BPS: nilai tanpa satuan*)

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi, nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penduduk miskin Wilayah Kalimantan adalah penduduk Wilayah Kalimantan yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\text{Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Kalimantan}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Kalimantan}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. BPS. 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 5: Pembangunan Wilayah Sulawesi**

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi

INDIKATOR: Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Sulawesi dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Satuan

persen (%)/tahun.

Metode Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Sulawesi tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Sulawesi tahun sebelumnya

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2016-2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/07/5f082ed36ac6601d2ac04e05/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2016-2020.html>.


Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Wilayah Sulawesi adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Sulawesi dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks. (*catatan BPS: nilai tanpa satuan*)

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\min}}{\text{HLS}_{\max} - \text{HLS}_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\min}}{\text{RLS}_{\max} - \text{RLS}_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $\text{IPM} < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq \text{IPM} < 70$
- 3) Tinggi: $70 \leq \text{IPM} < 80$
- 4) Sangat tinggi: $\text{IPM} \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.


Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi,
nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penduduk miskin Wilayah Sulawesi adalah penduduk Wilayah Sulawesi yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\begin{aligned} \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi} \\ = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Sulawesi}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Sulawesi}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber Data/Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. BPS. 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.


Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 6: Pembangunan Wilayah Maluku**

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku

INDIKATOR: Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Maluku dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Satuan

persen (%)/tahun.

Metode Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Maluku tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Maluku tahun sebelumnya

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2016-2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/07/5f082ed36ac6601d2ac04e05/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2016-2020.html>.


Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: IPM Provinsi di Wilayah Maluku

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Maluku adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Maluku dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks. (*catatan BPS: nilai tanpa satuan*)

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\text{maks}} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1) Rendah: $IPM < 60$

2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$

- 3) Tinggi: $70 \leq \text{IPM} < 80$
 4) Sangat tinggi: $\text{IPM} \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi, nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penduduk miskin Wilayah Maluku adalah penduduk Wilayah Maluku yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku} \\ &= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Maluku}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Maluku}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber Data/Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. BPS. 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 7: Pembangunan Wilayah Papua

SASARAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua

INDIKATOR: Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa Wilayah Papua dalam selang waktu satu tahun terakhir.

Satuan

%/tahun.

Metode Penghitungan

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

PDRB_t : PDRB Wilayah Papua tahun tertentu

PDRB_{t-1} : PDRB Wilayah Papua tahun sebelumnya

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2016-2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/06/07/5f082ed36ac6601d2ac04e05/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2016-2020.html>.


Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: IPM Provinsi di Wilayah Papua

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Papua adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia di Wilayah Papua dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Satuan

Nilai min-maks. (*catatan BPS: nilai tanpa satuan*)

Metode Penghitungan

- Indeks Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

- Indeks Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

- Indeks Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

- IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}} \times 100}$$

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

- 1) Rendah: $IPM < 60$
- 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$

- 3) Tinggi: $70 \leq \text{IPM} < 80$
 4) Sangat tinggi: $\text{IPM} \geq 80$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia 2020. BPS. 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>.


Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi, nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase penduduk miskin Wilayah Papua

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penduduk miskin Wilayah Papua adalah penduduk Wilayah Papua yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penduduk miskin Wilayah Papua} \\ &= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Wilayah Papua}}{\text{Jumlah penduduk Wilayah Papua}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber Data/Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. BPS. 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html>.

Disagregasi

Kabupaten/kota, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

PRIORITAS NASIONAL 3

Jumlah Indikator PN

27



70

Jumlah Indikator PP



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 3

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing



SASARAN 1: Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan

INDIKATOR: Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Satuan

Per wanita usia subur usia 15-49 tahun.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

$ASFR_i$: ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke -i

i : kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

Sumber Data/Publikasi

1. Penduduk Indonesia, hasil Sensus Penduduk 2010, BPS, Tahun Publikasi: 2012.
2. Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015, BPS, Tahun Publikasi: 2016.
3. Survei Demografi Kesehatan Indonesia, BKBN dan BPS. 2018.

Tautan Publikasi

1. <https://www.bps.go.id/publication/2013/03/05/becb3c0fa2dbec4af7a24430/pendudukindonesia-hasil-sp-2010.html>;
2. <https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>;
3. https://rhknowledge.ui.ac.id/uploads/resource_file/file/8/SDKI_2017.pdf.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

SP dan SUPAS : 10 tahunan, SDKI: 5 tahunan.

INDIKATOR: Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Perbandingan antara jumlah penduduk berusia 17 tahun ke atas dengan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas dikali 100%.

$$\text{Persentase cakupan NIK} = \frac{\text{jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{jumlah penduduk berusia 17 ke atas}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik. 2020.

Tautan Publikasi

https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1573/sdgs_1/1.


Disagregasi

Provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**SASARAN 2: Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk****INDIKATOR: Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program jaminan sosial.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100.

$$\text{Proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial} = \frac{\text{jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)}}{\text{jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$$

Tautan Publikasi

1. Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2020, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 2020;
2. Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020, Badan Pusat Statistik, 2020.

Sumber Data/Publikasi

1. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/1757>;
2. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Rumah tangga miskin adalah mereka yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Sedangkan rumah tangga rentan adalah mereka sudah di atas garis kemiskinan namun pendapatannya masih berada di bawah 40%. Bantuan sosial pemerintah rumah tangga miskin dan rentan bersumber pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan PBI JKN.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang setidaknya mendapatkan 1 jenis bantuan sosial pemerintah dibagi dengan total rumah tangga miskin dan rentan (40% rumah tangga terbawah) dikalikan 100 persen.

$$\text{Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah} = \frac{\text{jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang setidaknya mendapatkan 1 jenis bantuan sosial pemerintah}}{\text{total rumah tangga miskin dan rentan (40\% rumah tangga terbawah)}} \times 100$$

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Tautan Publikasi

-

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



SASARAN 3: Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan

INDIKATOR: Angka Kematian Ibu (AKI)

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Satuan

Per 100.000 kelahiran hidup.

Metode Penghitungan

Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.

$$AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$$

Keterangan

AKI	:	Angka Kematian Ibu (AKI)
JKI	:	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu
JLH	:	Jumlah kelahiran

Sumber Data/Publikasi

Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Badan Pusat Statistik. Tahun Publikasi: 2018, 2011, dan 2016.

Tautan Publikasi

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1349/sdgs_3.

Disagregasi

1. Nasional dan regional/pulau;
2. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota menggunakan "jumlah kasus kematian ibu".

Frekuensi Pengumpulan

1. Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan;
2. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan.

INDIKATOR: Angka Kematian Bayi (AKB)

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Angkatan Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:

- 70 sangat tinggi,
- 40-70 tinggi,

- 20-39 sedang,
- dan <20 rendah.

Satuan

Per 1.000 kelahiran hidup.

Metode Penghitungan

Cara perhitungan (1)

- (1) Metode langsung: Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.

$$AKB = \frac{JK < 1th}{JLH} \times 1.000$$

Keterangan

- AKB : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
 JK<1th : Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu
 JLH : Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Cara perhitungan (2)

- (2) Metode tidak langsung: menggunakan model *life table*.

Sumber Data/Publikasi

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun publikasi 2018.

Tautan Publikasi

<https://archive.org/details/LaporanSDKI2017/page/n1/mode/2up>.

Frekuensi Pengumpulan

5 tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Regional/pulau;
3. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran);
5. Pendidikan terakhir ibu.

INDIKATOR: Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.

- a. Sangat pendek: $Zscore < -3,0$
- b. Pendek: $Zscore \geq -3,0$ s/d $Zscore < -2,0$

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Cara perhitungan (1)

- (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$$

Keterangan

- PAB(5) P *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (*stunting*)
 JAB(5) P *stunting* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu
 JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara perhitungan (2)

- (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$$

Keterangan

- PAB(5) SP *stunting* : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (*stunting*)
 JAB(5) SP *stunting* : Jumlah anak balita sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu
 JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Cara perhitungan (3)

$$\text{Prevalensi } stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP$$

Sumber Data/Publikasi

1. Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJM dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
2. Studi Status Gizi Balita Indonesia Terintegrasi Susenas 2019; dan
3. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan, Tahun Publikasi 2020, 2019 .

Tautan Publikasi

Tautan atau sumber data publikasi dapat diakses melalui:

- a. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaa660ebb724caf1c534a24.pdf>;
- b. <https://persi.or.id/wp-content/uploads/2020/11/event8-02.pdf>;
- c. http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.

Disagregasi


1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
3. Jenis kelamin;

4. Kelompok umur: 0-2 tahun dan 0-4 tahun;
5. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan, 5 tahunan.

INDIKATOR: Insidensi Tuberculosis

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Tuberculosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologi (mikroskopis, kultur, atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB. Insidensi Tuberculosis (ITB) adalah jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk.

Satuan

Per 100.000 penduduk.

Metode Penghitungan

Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode yang sama kemudian dikali 100.000.

$$ITB = \frac{JKTB}{JP} \times 100.000$$

Keterangan

- ITB : Insidensi Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
- JKTB : Jumlah kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu
- JAB(5) : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Sumber Data/Publikasi

Profil Kesehatan Indonesia 2019, Kementerian Kesehatan, 2020.

Tautan Publikasi

<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis kelamin;
3. Kelompok umur: balita dan dewasa.

INDIKATOR: Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada *vector* malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Eliminasi malaria di Indonesia dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Satuan

kabupaten/kota.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satuan tahun.

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Eliminasi merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan. Eliminasi kusta berarti angka prevalensi <1/ 10.000 penduduk. Secara nasional, Indonesia telah mencapai eliminasi sejak tahun 2000, sedangkan eliminasi tingkat provinsi ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2019.

Satuan

kabupaten/kota.

Metode Penghitungan

Eliminasi Kusta dihitung melalui Prevalensi Kusta. Prevalensi kusta adalah jumlah penderita kusta PB dan MB terdaftar atau yang mendapatkan pengobatan pada saat tertentu per 10.000 penduduk.

$$\frac{\text{Jumlah kasus kusta terdaftar pada suatu saat tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada tahun yang sama}} \times 10.000$$

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 27 .

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah penduduk ≥ 18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥ 27 , dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Prevalensi penduduk >18 tahun obesitas =

$$PO_{bes} = \frac{JP_{\geq 18y}O_{bes}}{JP_{\geq 18}} \times 100\%$$

Keterangan

PO_{bes} : Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.

$JP_{\geq 18y}O_{bes}$: Jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun yang hasil pengukuran IMT ≥ 27 pada waktu tertentu.

$JP_{\geq 18}$: Jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun pada periode waktu yang sama

Sumber Data/Publikasi

Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2019.

Tautan Publikasi

http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.

Frekuensi Pengumpulan

5 tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur.

INDIKATOR: Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 10-18 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-18 tahun. Definisi merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari maupun kadang-kadang.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$PM_{10-18} = \frac{JP_{10-18y}M}{JP_{10-18}} \times 100\%$$

Keterangan

- PM10 – 18 : Persentase merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun
- JP10 – 18yM : Jumlah penduduk umur 10 – 18 tahun yang merokok pada waktu tertentu
- JP10 – 18 : Jumlah penduduk umur 10 – 18 tahun pada periode waktu yang sama

Sumber Data/Publikasi

Laporan Nasional Riskesdas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 2018.

Tautan Publikasi

http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.

Frekuensi Pengumpulan

5 tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
3. Jenis kelamin;
4. Kelompok umur.

INDIKATOR: Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca merupakan nilai rata-rata hasil asesmen peserta didik berusia 15 tahun yang dilakukan secara global oleh OECD (Organization Economic Council Development) yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali untuk mengukur performa akademik pada aspek membaca anak-anak usia 15 tahun yang sampelnya dilakukan dengan metode *random sampling*.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indikator ini melihat dari segi nilai membaca pada PISA. Setiap tiga tahun, siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak, untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Tema survei digilir setiap 3 tahun.

Sumber Data/Publikasi

PISA 2018 *Result What Student Know and Can do*, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019.

Tautan Publikasi

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5f07c754-en.pdf?expires=1630878762&id=id&accname=guest&checksum=A52EEC828D15334E2B7822205D8E751C>.


Disagregasi

Global.

Frekuensi Pengumpulan

3 tahun sekali.

INDIKATOR: Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika merupakan nilai rata-rata hasil asesmen peserta didik berusia 15 tahun yang dilakukan secara global oleh OECD (Organization Economic Council Development) yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali untuk mengukur performa akademik pada aspek matematika anak-anak usia 15 tahun yang sampelnya dilakukan dengan metode *random sampling*.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indikator ini melihat dari segi aspek matematika pada PISA. Setiap tiga tahun, siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak, untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Tema survei digilir setiap 3 tahun.

Sumber Data/Publikasi

PISA 2018 *Result What Student Know and Can do*, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019.

Tautan Publikasi

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5f07c754-en.pdf?expires=1630878762&id=id&accname=guest&checksum=A52EEC828D15334E2B7822205D8E751C>.


Disagregasi

Global.

Frekuensi Pengumpulan

3 tahun sekali.

INDIKATOR: Nilai rata-rata hasil PISA: Sains

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai rata-rata hasil PISA: Sains merupakan nilai rata-rata hasil asesmen peserta didik berusia 15 tahun yang dilakukan secara global oleh OECD (Organization Economic Council Development) yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali untuk mengukur performa akademik pada aspek sains anak-anak usia 15 tahun yang sampelnya dilakukan dengan metode *random sampling*.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indikator ini melihat dari segi nilai sains pada PISA. Setiap tiga tahun, siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak, untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Tema survei digilir setiap 3 tahun.

Sumber Data/Publikasi

PISA 2018 *Result What Student Know and Can do*, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019.

Tautan Publikasi

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5f07c754-en.pdf?expires=1630878762&id=id&accname=guest&checksum=A52EEC828D15334E2B7822205D8E751C>.

Disagregasi

Global.

Frekuensi Pengumpulan

3 tahun sekali.

INDIKATOR: Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Rata-rata jumlah waktu dalam satuan tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Satuan

Tahun.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$RLS\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$$

Keterangan:

- a. P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
- b. Tahun konversi ijazah
 - Tidak punya ijazah = 0
 - SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun
 - D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun
 - S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun
- c. Lama sekolah penduduk ke-i:
 - Tidak pernah sekolah = 0
 - Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1
 - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
 - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1180>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Harapan lama sekolah

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.

Satuan

Tahun.

Metode Penghitungan

Metode Penghitungan yang digunakan adalah:

$$HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

- HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
- E_i^t = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
- i = usia (a, a+1, ... , n)
- FK = Faktor koreksi pesantren

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1016>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**SASARAN 4: Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda****INDIKATOR: Indeks Perlindungan Anak (IPA)**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, yaitu:

- Klaster 1: Hak sipil dan kebebasan;
- Klaster 2: Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- Klaster 3: Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Klaster 4: Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan
- Klaster 5: Perlindungan khusus.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Penghitungan IPA dilakukan dalam dua tahap. Penghitungan dimulai dengan menghitung nilai indeks kluster menggunakan indikator yang sudah dinormalisasi. Indeks kluster dihitung dengan bobot indikator yang sama (*equal weight*) untuk setiap indikator dalam kluster yang sama. Kemudian, nilai IPA dan IPHA diperoleh dengan mengalikan bobot kluster dengan indeks kluster.

$$\text{Indeks } K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Indeks K_j : nilai indeks kluster ke-j
- SX_{ji} : nilai indikator ke-i pada kluster ke-j yang telah dinormalisasi
- N_j : banyaknya indikator pada kluster ke-j

$$\text{IPA} = \sum_{j=1}^s (W_j \times \text{Indeks } K_j)$$

Keterangan:

- IPA : Indeks Perlindungan Anak
- W_j : Bobot kluster ke-j

Sumber Data/Publikasi

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indonesia, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c8621-ipa-ipha-ipka-2018-2019.pdf>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

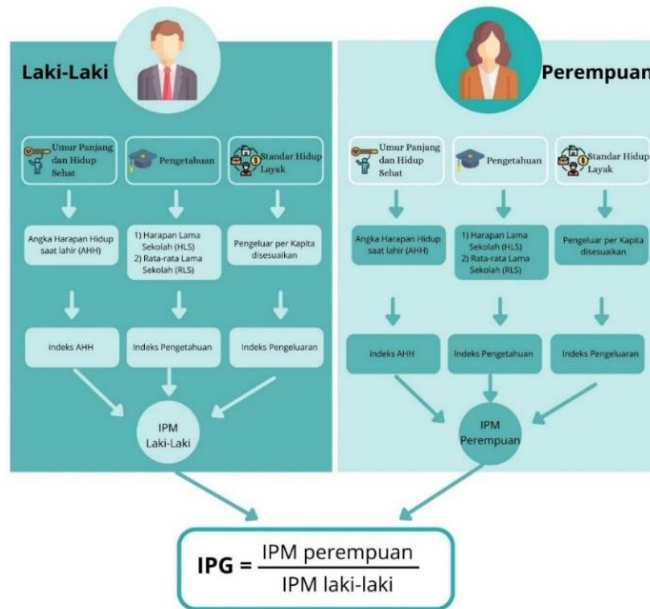
IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Metode Penghitungan yang digunakan adalah:



Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Gender (IPG), Badan Pusat Statistik, 2021.

Tautan Publikasi

<https://bps.go.id/indikator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-igp-.html>

Disagregasi

Nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Definisi (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Kelima domain tersebut adalah (1) domain pendidikan, (2) domain kesehatan dan kesejahteraan, (3) domain lapangan dan kesempatan kerja, (4) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (5) domain gender dan diskriminasi.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Perhitungan IPP dilakukan melalui tahapan:

1. Menetapkan nilai skor/nilai subindeks setiap indikator (nilai transformasi indikator)

$$a. \text{ Skor indikator}_{ji} = \frac{\text{Nilai indikator } y_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{Batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$$

$$b. \text{ Skor indikator}_{ji} = 1 - \frac{\text{Nilai indikator } y_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}{\text{Batas maksimum}_{ji} - \text{batas minimum}_{ji}}$$

2. Menghitung nilai indeks domain

$$\text{Indeks Domain}_j = \frac{\text{skor } X_1 + \text{skor } X_2 + \dots + \text{skor } X_n}{n} \times 10$$

3. Menghitung nilai IPP

$$\text{IPP} = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks Domain 2} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$$

Keterangan:

n : jumlah indikator setiap domain

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019, Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, divalidasi oleh Badan Pusat Statistik, 2020.

Tautan Publikasi

https://www.bappenas.go.id/files/3516/1582/2931/Laporan_IPP_2019.pdf.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan (publikasi dua tahunan).



SASARAN 5: Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan

INDIKATOR: Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki rumah milik sendiri dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan aset lain seperti kepemilikan aset emas (min 10 gr), sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, dan tanah/lahan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki rumah milik sendiri dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan aset lain seperti kepemilikan aset emas (min 10 gr), sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, dan tanah/lahan.

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif =

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga di bawah 40% yang dapat memperoleh aset produktif}}{\text{Total rumah tangga 40% terbawah}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Tautan Publikasi

-


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**SASARAN 6: Meningkatnya produktivitas dan daya saing****INDIKATOR: Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dapat menggambarkan kualitas persediaan tenaga kerja dengan asumsi bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas lapangan kerja yang dapat dimasukinya dan semakin tinggi nilai tambah ekonomi yang dihasilkannya. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas dengan jumlah total angkatan kerja dikalikan 100 persen. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pendidikan menengah ke atas didasarkan pada pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah) pada tingkat sekolah menengah atas umum/kejuruan dan perguruan tinggi (diploma dan sarjana).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\%PAK_{\text{pendidikan menengah ke atas}} = \left(\frac{\sum_{i=4}^7 PAK_i}{\sum_{i=0}^7 PAK_i} \right) \times 100\%; i = 0, 1, 2, 3, \dots, 7$$

Keterangan:

PAK_i : Jumlah angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi i (juta orang)

i = 0 : Tidak/belum pernah sekolah

i = 1 : Tidak/belum tamat SD

i = 2 : Sekolah Dasar

i = 3 : Sekolah Menengah Pertama

i = 4 : Sekolah Menengah Atas (Umum)

i = 5 : Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)

i = 6 : Diploma I/II/III/Akademi

i = 7 : Universitas

Sumber Data/Publikasi

1. International Labour Organization, *Key Indicators of the Labour Market*, Edisi ke-9, 2016;
2. Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

1. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_498929/lang--en/index.htm;
2. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab4>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

INDIKATOR: Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University: Top 200*

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat teratas *world class university* (WCU) atau universitas kelas dunia dalam rentang peringkat di atas 200 (0-200). Reputasi akademik perguruan tinggi dalam bentuk akreditasi internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap universitas yang memiliki desain dan kemampuan mencetak lulusan berdaya saing tinggi secara internasional.

Satuan

PT.

Metode Penghitungan

Terdapat 8 indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program WCU yaitu meliputi beberapa aspek: (a) *Academic Reputation*, (b) *Employer Reputation*, (c) *Citations per Faculty*, (d) *Faculty Student Ratio*, (e) *International Faculty Ratio*, (f) *International Student Ratio*, (g) *International Research Network*, dan (h) *Employment Outcomes*. Kedelapan indikator tersebut diukur secara agregat di tingkat perguruan tinggi.

Sumber Data/Publikasi

QS World University Ranking 2023: Top Global Universities oleh QS Quacquarelli Symonds.

Tautan Publikasi

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University: Top 300*

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat teratas *world class university* (WCU) atau universitas kelas dunia dalam rentang peringkat 201-300. Reputasi akademik perguruan tinggi dalam bentuk akreditasi internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap universitas yang memiliki desain dan kemampuan mencetak lulusan berdaya saing tinggi secara internasional.

Satuan

PT.

Metode Penghitungan

Terdapat 8 indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program WCU yaitu meliputi beberapa aspek: (a) *Academic Reputation*, (b) *Employer Reputation*, (c) *Citations per Faculty*, (d) *Faculty Student Ratio*, (e) *International Faculty Ratio*, (f) *International Student Ratio*, (g) *International Research Network*, dan (h) *Employment Outcomes*. Kedelapan indikator tersebut diukur secara agregat di tingkat perguruan tinggi.

Sumber Data/Publikasi

QS World University Ranking 2023: Top Global Universities oleh QS Quacquarelli Symonds.

Tautan Publikasi

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah PT yang masuk ke dalam *World Class University: Top 500*

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam peringkat teratas *world class university* (WCU) atau universitas kelas dunia dalam rentang peringkat 301-500. Reputasi akademik perguruan tinggi dalam bentuk akreditasi internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap universitas yang memiliki desain dan kemampuan mencetak lulusan berdaya saing tinggi secara internasional.

Satuan

PT.

Metode Penghitungan

Terdapat 8 indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program WCU yaitu meliputi beberapa aspek: (a) *Academic Reputation*, (b) *Employer Reputation*, (c) *Citations per Faculty*, (d) *Faculty Student Ratio*, (e) *International Faculty Ratio*, (f) *International Student Ratio*, (g) *International Research Network*, dan (h) *Employment Outcomes*. Kedelapan indikator tersebut diukur secara agregat di tingkat perguruan tinggi.

Sumber Data/Publikasi

QS World University Ranking 2023: Top Global Universities oleh QS Quacquarelli Symonds.


Tautan Publikasi

<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dengan jabatan atau okupasi yang membutuhkan keahlian tingkat menengah dan tinggi. Tenaga kerja berkeahlian tinggi (*skilled labor*) adalah tenaga kerja yang pada umumnya berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya, sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Tenaga kerja berkeahlian menengah (*semi-skilled labor*) adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah pekerja dalam jabatan: (1) tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis; (2) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; (3) tenaga tata usaha dan yang sejenis; (4) tenaga usaha penjualan; dan (5) tenaga usaha jasa dengan jumlah total pekerja dikali 100%.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\%PB_{\text{keahlian menengah ke atas}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^5 PB_i}{\sum_{i=1}^8 PB_i} \right) \times 100\%; i = 1,2,3, \dots, 8$$

Keterangan:

PB_i : Jumlah penduduk yang bekerja dengan jabatan (juta orang)

i = 1 : Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis

i = 2 : Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan

i = 3 : Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis

i = 4 : Tenaga Usaha Penjualan

i = 5 : Tenaga Usaha Jasa

i = 6 : Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

i = 7 : Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan dan Pekerja Kasar

i = 8 : Lainnya

Sumber Data/Publikasi

1. International Labour Organization, *Key Indicators of the Labour Market*, Edisi ke-9, 2016;
2. Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

1. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_498929/lang--en/index.htm
2. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab4>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

INDIKATOR: Peringkat *Global Innovation Index*

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Global Innovation Index (GII) merupakan peringkat tahunan kinerja ekosistem inovasi di seluruh dunia dengan menyoroti kekuatan dan kelemahan inovasi serta kesenjangan tertentu dalam metrik inovasi. Untuk mendapatkan gambaran inovasi selengkap mungkin indeks ini menggunakan sekitar 80 indikator, termasuk lingkungan, politik, pendidikan, infrastruktur, dan penciptaan pengetahuan dari setiap sektor ekonomi.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Nilai GII didapatkan dengan meratakan-ratakan dari skor dari dua sub indeks, yaitu *Innovation Input Sub-Index* dan *Innovation Output Sub-Index*.

Sumber Data/Publikasi

Global Innovation Index 2021 *Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis*, 2021.

Tautan Publikasi

https://www.wipo.int/global_innovation_index.

Disagregasi

Nasional.


Frekuensi Pengumpulan

-

**PROGRAM PRIORITAS 1: Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**

SASARAN 1: Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.

INDIKATOR: Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan persentase daerah (kabupaten/kota) di Indonesia yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan. Layanan terpadu penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang meliputi 9 (sembilan) program sektor yakni:

- Kesehatan, seperti Program Indonesia Sehat;
- Pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar;
- Sosial dan Ekonomi, seperti Program Keluarga Harapan;

- Pangan, seperti Program Sembako;
- Energi, antara lain subsidi listrik, subsidi gas;
- Pertanian, seperti subsidi pupuk;
- Perikanan, antara lain asuransi bagi budi daya ikan;
- Perumahan, seperti rumah tinggal layak huni (rutilahu); dan
- Administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, KTP, dan seterusnya.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan.

Sumber Data/Publikasi

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesmas, Kementerian Sosial, 2020.

Tautan Publikasi

<https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/15951551894315.pdf>.

Disagregasi

Kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan *monitoring* evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan. Sistem yang dimaksud dalam konteks ini adalah sistem SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu), yaitu perangkat untuk melakukan diagnosis secara mandiri untuk memperoleh solusi pengentasan kemiskinan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Kabupaten/kota yang telah memanfaatkan SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu), yaitu perangkat analisis kemiskinan di tingkat daerah untuk menghasilkan bukti empiris agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Sumber Data/Publikasi

Kementerian PPN/Bappenas, (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Tautan Publikasi

<https://sepakat.bappenas.go.id/>.

Disagregasi
Kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan persentase daerah (kabupaten/kota) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan. Data terpadu yang dimaksud yaitu data masyarakat yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS meliputi profil/data dasar warga yang nantinya digunakan sebagai dasar penetapan penerima program bantuan sosial.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sumber Data/Publikasi

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Puskesmas, Kementerian Sosial, 2020.

Tautan Publikasi

<https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/15951551894315.pdf>.

Disagregasi
Kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0–17 tahun

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator yang mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode Penghitungan yang digunakan adalah:

$$P\ AKK = \frac{JAAK}{JA} \times 100\%$$

Keterangan:

- P AAK : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran;
- JAAK : Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran;
- JA : Jumlah anak umur 0-17 tahun.

Sumber Data/Publikasi


Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik, 2020.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1922>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan**Definisi**  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan persentase Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan. Pendampingan pembangunan diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Kementerian/Lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan.

Sumber Data/Publikasi

Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi

<https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/2486>.

Disagregasi

-

Frekuensi Pengumpulan

-

**PROGRAM PRIORITAS 2: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**

SASARAN 1: Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan

INDIKATOR: Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**Definisi**  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.

$$\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2020, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 2020;
2. Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020, Badan Pusat Statistik, 2020.

Tautan Publikasi

1. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/arsip/detail/1757>;
2. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *(perlu menjelaskan maksud indikator terhadap penduduk penyandang disabilitas)*

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total penduduk penyandang disabilitas dikalikan 100 persen.

Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas =

$$\frac{\text{Jumlah penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan}}{\text{Total penduduk penyandang disabilitas}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat).


Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Lanjut usia merupakan penduduk yang memiliki usia 60 tahun atau lebih.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang usianya 60 tahun ke atas (≥ 60 tahun).

Metode perhitungannya adalah jumlah penduduk lanjut usia yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi dengan total penduduk lanjut usia dikalikan 100 persen.

Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia =

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lanjut usia yang hidup di bawah garis kemiskinan}}{\text{Total penduduk}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator diambil berdasar hasil Peraturan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip inklusif (seperti ramah disabilitas). (*prinsip inklusif yang dimaksud perlu dijelaskan*)

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan*

Jumlah Peraturan Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang terbit dimulai tahun 2019 yang menerapkan prinsip inklusif (sudah mengakomodasi ramah disabilitas).

Persentase dihitung dari jumlah Peraturan Daerah yang terbit dari tahun 2019 dibagi total provinsi dan kabupaten/kota (34 + 514) kemudian dikali 100 persen.

Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif =

$$\frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang terbit dari tahun 2019}}{\text{Total provinsi dan kabupaten/kota (34+514)}} \times 100\%$$

*masukan BPS: persentase daerah yang menerapkan prinsip inklusi = jumlah daerah yang menerbitkan peraturan / jumlah provinsi + kabupaten/kota

Sumber Data/Publikasi

Database Peraturan JDIH BPK RI, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Tahun publikasi dari sumber yang digunakan berasal dari berbagai tahun.

Tautan Publikasi

<https://peraturan.bpk.go.id/>.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

Disagregasi

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

INDIKATOR: Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja formal

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Cakupan peserta pekerja formal merupakan setiap pekerja formal (pekerja penerima upah dan pekerja jasa konstruksi) yang memiliki paling tidak program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dihitung dari basis kepesertaan semesta pekerja formal. Definisi pekerja formal pada perhitungan adalah segmen peserta Pekerja Penerima Upah dan jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan sedangkan semesta pekerja formal adalah proporsi dari jumlah penduduk Indonesia yang ditetapkan sebagai target yang memenuhi syarat yang ditetapkan dari status pekerjaan, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan*

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta segmen PPU dan Jasa Konstruksi BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah semesta pekerja formal dikali 100%.

Persentase cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Formal =

$$\frac{\text{Jumlah peserta PPU} + \text{jumlah peserta Jasa Konstruksi}}{\text{Jumlah semesta pekerja formal}} \times 100\%$$

**masukan BPS: perlu menjelaskan definisi PPU yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan*

*Rekomendasi BPS: persentase kepesertaan BPJS PPU = (Jumlah PPU memiliki BPJS / Jumlah PPU) * 100%*

Sumber Data/Publikasi

BPJS Ketenagakerjaan.

Tautan Publikasi

[https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Kuangan_dan_Laporan_Pengelolaan_Program_Tahun_2020-BPJAMSOSTEK_\(1\).pdf](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Kuangan_dan_Laporan_Pengelolaan_Program_Tahun_2020-BPJAMSOSTEK_(1).pdf).


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan: Pekerja informal

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Cakupan peserta pekerja informal merupakan setiap pekerja informal (pekerja bukan penerima upah) yang memiliki paling tidak program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dihitung dari basis kepesertaan semesta pekerja informal. Definisi pekerja informal pada perhitungan adalah segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan semesta pekerja informal adalah proporsi dari jumlah penduduk Indonesia yang ditetapkan sebagai target yang memenuhi syarat yang ditetapkan dari status pekerjaan, jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah semesta pekerja informal dikali seratus.

Persentase cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal =

$$\frac{\text{Jumlah peserta PBPU}}{\text{Jumlah semesta pekerja informal}} \times 100 \%$$

**masukan BPS: perlu menjelaskan definisi PBPU yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan*

*Rekomendasi BPS: persentase kepesertaan BPJS PPU = (Jumlah PPU memiliki BPJS / Jumlah PBPU) * 100%*

Sumber Data/Publikasi

BPJS Ketenagakerjaan.

Tautan Publikasi

[https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Kuangan_dan_Laporan_Pengelolaan_Program_Tahun_2020-BPJAMSOSTEK_\(1\).pdf](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/laporan_keuangan/Laporan_Kuangan_dan_Laporan_Pengelolaan_Program_Tahun_2020-BPJAMSOSTEK_(1).pdf).

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan


Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 3: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

SASARAN 1: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah

INDIKATOR: Persentase persalinan di fasyankes

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti: rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktik swasta/praktik dokter, dan puskesmas/pustu/polindes.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dibagi jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$P \text{ Salifaskes} = \frac{JPSalifaskes}{JPM15-49} \times 100\%$$

Keterangan:

- P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
 JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses
 JPM15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan pada periode waktu yang sama

Sumber Data/Publikasi

1. Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Riset dan Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

1. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaae60ebb724caf1c534a24.pdf>;
2. http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.


Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
2. Daerah tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan;
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran)
4. Pendidikan terakhir ibu.

INDIKATOR: Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok I yang menggunakan sedikitnya satu jenis metode kontrasepsi modern dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15- 49 tahun) pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode Penghitungan yang digunakan adalah:

$$mCPRi = \frac{JPeKMi}{JPei} \times 100\%$$

Keterangan:

- mCPRi : Angka prevalensi kontrasepsi modern pada kelompok i
- JPeKMi : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern
- JPei : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama

Sumber Data/Publikasi

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), BKKBN, dan Badan Pusat Statistik, 2018.

Tautan Publikasi

https://rhknowledge.ui.ac.id/uploads/resource_file/file/8/SDKI_2017.pdf.

Frekuensi Pengumpulan

5 tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan;
3. Kelompok umur;
4. Status kawin;
5. Tingkat pendidikan;
6. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

INDIKATOR: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok I yang tidak ingin memiliki anak lagi (*limiting*) atau ingin menunda anak (*spacing*) tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\text{Unmet Need KBi} = \frac{\text{JPURi unmet need}}{\text{JPURi}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Unmet need* KBi : Persentase perempuan usia reproduksi pada kelompok i yang kebutuhan keluarga berencana tidak terpenuhi.
- JPURi unmet need* : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi.
- JPURi : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama.

Sumber Data/Publikasi

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), BKKBN, dan Badan Pusat Statistik, 2018.

Tautan Publikasi

https://rhknowledge.ui.ac.id/uploads/resource_file/file/8/SDKI_2017.pdf.

Frekuensi Pengumpulan

5 tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan;
3. Kelompok umur;
4. Status kawin;
5. Tingkat pendidikan;
6. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

INDIKATOR: Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)*

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Angka kelahiran remaja/*Age Specific Fertility Rate (ASFR)* 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode.

Satuan

Per 1.000 perempuan di kelompok umur 15-19.

Metode Penghitungan

$$\text{ASFR}_{15-19} = \frac{\text{JK}_{15-19}}{\text{JP}_{15-19}} \times 1.000$$

Keterangan:

- ASFR_{15-19} : *Age Specific Fertility Rate (ASFR)*/Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun;
- JK_{15-19} : Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada periode tertentu;
- JP_{15-19} : Jumlah penduduk perempuan umur 15-19 tahun pada periode waktu yang sama.

Sumber Data/Publikasi

1. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), BKKBN dan Badan Pusat Statistik, 2018;
2. Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Badan Pusat Statistik. Tahun publikasi: 2018, 2011, 2016.

Tautan Publikasi

1. https://rhknowledge.ui.ac.id/uploads/resource_file/file/8/SDKI_2017.pdf;
2. <https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>.


Frekuensi Pengumpulan

5 tahunan, 10 tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan;
3. Tingkat pendidikan;
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

INDIKATOR: Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi satu dosis imunisasi HB-0, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HiB, empat kali imunisasi polio atau tiga kali imunisasi IPV, dan satu kali imunisasi campak. Bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi satu dosis imunisasi HB-0, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB/DPT-HB-HiB, empat kali imunisasi polio atau tiga kali imunisasi IPV, dan satu kali imunisasi campak.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan =

$$\frac{\text{Jumlah bayi umur 12-23 yang mendapat IDL di satu wilayah tertentu selama satu periode}}{\text{Jumlah bayi umur 12-23 bulan yang ada di wilayah dan periode yang sama}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf

Disagregasi

Nasional, provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

5 tahun sekali.

INDIKATOR: Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

- a. sangat kurus: $Z \text{ score} < -3,0$
- b. kurus: $Z \text{ score} \geq -3,0$ s/d $Z \text{ score} < -2,0$.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Cara perhitungan kurus/*wasting* (1)

- (1) Jumlah anak balita yang menderita kurus dibagi dengan jumlah anak balita dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

$$\text{PAB(5)K } \textit{wasting} = \frac{\text{JAB(5)K } \textit{wasting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Keterangan

- PAB(5) K *wasting* : Prevalensi anak balita yang menderita kurus (*wasting*)
- JAB(5) K *wasting* : Jumlah anak balita yang menderita kurus (*wasting*) pada waktu tertentu
- JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

Cara perhitungan sangat kurus/*wasting* (2)

- (2) Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus dibagi dengan jumlah anak balita dalam satuan persen (%).

$$\text{PAB(5)SK } \textit{wasting} = \frac{\text{JAB(5)SK } \textit{wasting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Keterangan

- PAB(5) SK *wasting* : Prevalensi anak balita yang menderita sangat kurus (*wasting*)
- JAB(5) SK *wasting* : Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus (*wasting*) pada waktu tertentu
- JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

Cara perhitungan (3)

$$\textit{Wasting total} = \text{PAB(5) K } \textit{wasting} + \text{PAB(5) SK } \textit{wasting}$$

Sumber Data/Publikasi

1. Kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Riset Kesehatan Dasar, Litbang, Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

1. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaae60ebb724caf1c534a24.pdf>;
2. http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf.

Frekuensi Pengumpulan


5 tahunan.

Disagregasi

1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi;
2. Daerah tempat tinggal, perkotaan dan pedesaan;
3. Jenis kelamin;

4. Kelompok umur: 0-2 tahun dan 0-4 tahun;
5. Kelompok pendapatan (pengeluaran).

INDIKATOR: Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (*TBC Treatment Coverage*)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama. *Treatment Coverage* menggambarkan banyaknya kasus TBC yang terjangkau oleh program.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC =

$$\frac{\text{Jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu}}{\text{Perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

<https://tbindonesia.or.id/pustaka-tbc/dashboard-tb/>


Disagregasi

Provinsi, nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada *vector* malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Eliminasi malaria di Indonesia dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Satuan

Kabupaten/kota.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah absolut kumulatif kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dalam satuan tahun.

Sumber Data/Publikasi

Profil Kesehatan Indonesia 2019, Kementerian Kesehatan, 2020.

Tautan Publikasi

<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Insidensi HIV

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur di atas 15 tahun selama periode waktu tertentu. Angka ini menggambarkan jumlah infeksi baru yang terjadi di populasi, baik pada orang yang menyadarinya, maupun yang tidak menyadarinya dan tidak hanya yang datang ke pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program.

Satuan

Per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur di atas 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun yang terkena dan belum terinfeksi HIV (jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun).

$$\text{Insidensi HIV} = \frac{\text{Jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur di atas 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun}}$$

Sumber Data/Publikasi

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia, Kementerian Kesehatan, 2020.

Tautan Publikasi

https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Buku_RAN_AIDS_2024_REV_12_1_21.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Triwulanan, tahunan, dan 5 tahunan.

INDIKATOR: Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini penting untuk menilai kualitas tata laksana penderita dan kepatuhan penderita kusta dalam minum obat. Penyelesaian Pengobatan Kusta Tepat Waktu disebut juga *Relapse From Treatment* (RFT). RFT dapat dinyatakan setelah dosis dipenuhi tanpa diperlukan pemeriksaan laboratorium.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Terdapat dua perhitungan RFT yang meliputi

(1) RFT Penderita MB*

Jumlah penderita kusta MB dari periode *kohort* satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (12 dosis dalam 12-18 bulan).

$$\frac{\text{Jumlah kasus baru MB yan menyelesaikan 12 dosis dalam 12-18 bulan}}{\text{Jumlah seluruh kasus baru MB yang memulai MDT pada periode kohort tahun yang sama}} \times 100\%$$

(2) RFT Penderita PB*

Jumlah kasus baru PB dari periode *kohort* satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan).

$$\frac{\text{Jumlah kasus baru PB yang menyelesaikan 12 dosis dalam 12-18 bulan}}{\text{Jumlah seluruh kasus baru PB yang memulai MDT pada periode kohort tahun yang sama}} \times 100\%$$

*perlu dijelaskan akronim dari MB dan PB

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>.


Frekuensi Pengumpulan

5 tahunan sekali.

Disagregasi

Berdasarkan wilayah: Nasional, provinsi; berdasarkan tipe pengobatan: PB, MB.

INDIKATOR: Jumlah kabupaten/kota sehat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Satuan

(tanpa satuan). *masuk BPS: satuan berupa wilayah kab/kota.*

Metode Penghitungan

Jumlah yang menerapkan tatanan kabupaten/kota sehat.

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

KTR itu meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

Satuan

(tanpa satuan). *masuk BPS: satuan berupa wilayah kab/kota.*

Metode Penghitungan

Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok.

Sumber Data/Publikasi

P2PTM Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi


<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>

Disagregasi

-

Frekuensi Pengumpulan

-

INDIKATOR: Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi**Definisi**  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase puskesmas dan klinik pratama yang memenuhi standar akreditasi.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah puskesmas dan klinik pratama terakreditasi pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah seluruh puskesmas dan klinik pratama x 100%.

Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi =

$$\frac{\text{Jumlah puskesmas dan klinik pertama terakreditasi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah seluruh puskesmas dan klinik pertama}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.


Tautan Publikasi<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase rumah sakit terakreditasi**Definisi**  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase RS yang terakreditasi oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah kumulatif rumah sakit yang terakreditasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan x 100%.

Persentase rumah sakit terakreditasi =

$$\frac{\text{Jumlah kumulatif rumah sakit yang terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-2021.pdf>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (nakes) sesuai standar yaitu dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dihitung melalui jumlah puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah puskesmas dikalikan 100 persen.

Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar =

$$\frac{\text{Jumlah puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/PROFIL_KESEHATAN_2018_1.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (dokter spesialis obsetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter bedah) & 3 dokter spesialis (dokter spesialis radiologi, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis patologi klinik) lainnya sebagai rangka pemenuhan dan peningkatan ketersediaan serta mutu SDM sesuai standar pelayanan kesehatan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya dihitung melalui jumlah RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya dibagi dengan jumlah RSUD kabupaten/kota dikalikan 100 persen.

Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya =

$$\frac{\text{Jumlah RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya}}{\text{Jumlah RSUD kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Kesehatan.


Tautan Publikasi

https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/PROFIL_KESEHATAN

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase obat memenuhi syarat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal, (2) tidak kedaluwarsa, (3) tidak rusak, (4) memenuhi ketentuan label/penandaan, dan (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase obat memenuhi syarat} = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2020.


Tautan Publikasi

https://www.pom.go.id/new/files/2021/LAPKIN2020/LAPORAN%20KINERJA%20BADAN%20PENGAWAS%20OBAT%20DAN%20MAKANAN%20TAHUN%202020_final.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase makanan memenuhi syarat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

Persentase makanan memenuhi syarat =

$$\left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan acak memenuhi syarat}}{\text{Total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \right) \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 2020.

Tautan Publikasi

https://www.pom.go.id/new/files/2021/LAPKIN2020/LAPORAN%20KINERJA%20BADAN%20PENGAWAS%20OBAT%20DAN%20MAKANAN%20TAHUN%202020_final.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 4 : Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

SASARAN 1: Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

INDIKATOR: Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: SMA/SMK/MA Sederajat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Rasio APK SMA/MA/SMK 20 persen penduduk termiskin dengan APK SMA/MA/SMK 20 persen penduduk terkaya di mana APK SMA/MA/SMK merupakan jumlah penduduk yang masih sekolah di jenjang SMA/MA/SMK dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Satuan

Rasio.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio APK} = \frac{\text{APK}_{Ri}}{\text{APK}_{Ti}}$$

Keterangan:

- Rasio APK : Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (nilai) SMA/SMK/MA Sederajat
- APK_{Ri} : APK termiskin (kuintil terendah) di jenjang pendidikan i
- APK_{Ti} : APK terkaya (kuintil tertinggi) di jenjang pendidikan i

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2020.

Tautan Publikasi

<https://file.bpmvt.kemdikbud.go.id/RENSTRA%20KEMENDIKBUD%202020-2024/Definisi%20Operasional%20Indikator%20Kemendikbud%202020-2024.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya: Pendidikan Tinggi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi (APK PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tinggi dengan jumlah penduduk yang berusia 19 - 23 tahun. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya merupakan perbandingan APK jenjang pendidikan tinggi antara 20 persen penduduk termiskin dan terkaya. Semakin rasio APK mendekati nilai 1 maka kesenjangan terhadap akses layanan pendidikan tinggi antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya semakin mengecil.

Satuan

Rasio.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio APK} = \frac{\text{APK}_{\text{Ri}}}{\text{APK}_{\text{Ti}}}$$

Keterangan:

1. Rasio APK = Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (nilai) Pendidikan Tinggi
2. APK_{Ri} = APK termiskin (kuintil terendah) di jenjang pendidikan i
3. APK_{Ti} = APK terkaya (kuintil tertinggi) di jenjang pendidikan i

Sumber Data/Publikasi

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik;
2. Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas.

(catatan: BPS hanya menyajikan data APK PT pada masing-masing kelompok 20% penduduk termiskin dan kelompok 20% penduduk terkaya, perhitungan rasio diolah oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek, Kementerian PPN/Bappenas)

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/indicator/28/1444/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-kelompok-pengeluaran.html>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Membaca

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini berguna untuk mengetahui proporsi anak yang mencapai nilai kompetensi PISA di atas batas minimum untuk kriteria membaca. Programme for International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains. Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Proporsi ketercapaian Tes PISA} = \frac{N_i}{N_T}$$

Keterangan:

Proporsi ketercapaian Tes PISA : Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA pada aspek membaca

N_i	:	Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek membaca
N_T	:	Jumlah anak yang mengikuti tes PISA pada aspek membaca

Sumber Data/Publikasi

OECD.

Tautan Publikasi<https://www.oecd.org>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
3 tahun sekali.

INDIKATOR: Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Matematika

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini berguna untuk mengetahui proporsi anak yang mencapai nilai kompetensi PISA di atas batas minimum untuk kriteria matematika. Programme for International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains. Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Proporsi ketercapaian Tes PISA} = \frac{N_i}{N_T}$$

Keterangan :

Proporsi ketercapaian Tes PISA : Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA pada aspek matematika

N_i : Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek matematika

N_T : Jumlah anak yang mengikuti tes PISA pada aspek matematika

Sumber Data/Publikasi


OECD.

Tautan Publikasi<https://www.oecd.org>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
3 tahun sekali.

INDIKATOR: Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA: Sains

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini berguna untuk mengetahui proporsi anak yang mencapai nilai kompetensi PISA di atas batas minimum untuk kriteria sains. Programme for

International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains. Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Proporsi ketercapaian Tes PISA} = \frac{N_i}{N_T}$$

Keterangan:

Proporsi ketercapaian Tes PISA	:	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA pada aspek sains
N_i	:	Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimum PISA pada aspek sains
N_T	:	Jumlah anak yang mengikuti tes PISA pada aspek sains

Sumber Data/Publikasi

OECD.

Disagregasi Nasional.

Tautan Publikasi

<https://www.oecd.org>.

Frekuensi Pengumpulan

3 tahun sekali.

INDIKATOR: Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Literasi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator yang merupakan bagian dari AKM untuk penilaian asesmen kompetensi literasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek literasi dihitung dengan cara jumlah anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek literasi dibagi dengan jumlah anak dikalikan 100 persen.

$$\text{Proporsi ketercapaian AK} = \frac{N_i}{N_T}$$

Keterangan:

Proporsi ketercapaian AK	:	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek literasi
N_i	:	Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen kompetensi pada aspek literasi

N_T : Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek literasi

Sumber Data/Publikasi

BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Tautan Publikasi

<https://pusmendik.kemdikbud.go.id/an/>.


Disagregasi

-

Frekuensi Pengumpulan

-

INDIKATOR: Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi: Numerasi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator yang merupakan bagian dari AKM untuk penilaian asesmen kompetensi numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek numerasi dihitung dengan cara jumlah anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek numerasi dibagi dengan jumlah anak dikalikan 100 persen.

$$\text{Proporsi ketercapaian AK} = \frac{N_i}{N_T}$$

Keterangan:

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Proporsi ketercapaian AK | : | Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek numerasi |
| N_i | : | Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen kompetensi pada aspek numerasi |
| N_T | : | Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek numerasi |

Sumber Data/Publikasi

BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Tautan Publikasi

<https://pusmendik.kemdikbud.go.id/an/>.

Disagregasi

-

Frekuensi Pengumpulan

-

INDIKATOR: Tingkat penyelesaian pendidikan: SD/MI/ sederajat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini dihitung untuk memantau banyaknya anak-anak dan remaja yang dapat menyelesaikan serta melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya tanpa kendala yang menyebabkan penundaan untuk waktu yang lama (jenjang SD/MI/ sederajat). Apabila tingkat penyelesaian pendidikan rendah, maka hal ini dapat mengindikasikan tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, rendahnya angka partisipasi, atau kombinasi di antaranya. Usia yang digunakan merupakan *school age*, yaitu usia anak di saat awal tahun pembelajaran. Rentang usia

perhitungan dimulai sejak 1 sampai 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. SD/MI/ sederajat yaitu umur 13-15 tahun.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$TP_i = \frac{N_{TPi}}{N_i} \times 100\%$$

Keterangan:

TP_i : Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i

N_{TPi} : Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan pendidikan tersebut

N_i : Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i

Sumber Data/Publikasi

Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1904>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Tingkat penyelesaian pendidikan: SMP/MTs/ sederajat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini dihitung untuk memantau banyaknya anak-anak dan remaja yang dapat menyelesaikan serta melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya tanpa kendala yang menyebabkan penundaan untuk waktu yang lama (jenjang SD/MI/ sederajat). Apabila Tingkat Penyelesaian Pendidikan rendah, maka hal ini dapat mengindikasikan tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, rendahnya angka partisipasi, atau kombinasi di antaranya. Usia yang digunakan merupakan *school age*, yaitu usia anak di saat awal tahun pembelajaran. Rentang usia perhitungan dimulai sejak 1 sampai 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. SMP/MTs/ sederajat yaitu umur 16-18 tahun.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$TP_i = \frac{N_{TPi}}{N_i} \times 100\%$$

Keterangan:

TP_i : Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i

N_{TPi} : Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan pendidikan tersebut

N_i : Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i

Sumber Data/Publikasi

Badan Pusat Statistik.


Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1905>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Tingkat penyelesaian Pendidikan: SMA/SMK/MA/ sederajat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini dihitung untuk memantau banyaknya anak-anak dan remaja yang dapat menyelesaikan serta melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya tanpa kendala yang menyebabkan penundaan untuk waktu yang lama (jenjang SD/MI/sederajat). Apabila Tingkat Penyelesaian Pendidikan rendah, maka hal ini dapat mengindikasikan tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, rendahnya angka partisipasi, atau kombinasi di antaranya. Usia yang digunakan merupakan *school age*, yaitu usia anak di saat awal tahun pembelajaran. Rentang usia perhitungan dimulai sejak 1 sampai 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. SMA/sederajat yaitu umur 19-21 tahun.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$TP_i = \frac{N_{TPi}}{N_i} \times 100\%$$

Keterangan:

TP_i : Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i

N_{TPi} : Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan pendidikan tersebut

N_i : Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i

Sumber Data/Publikasi

Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1906>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase siswa yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti TK/BA/RA terhadap seluruh anak yang sedang duduk di kelas 1 SD.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$Y = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

- Y : Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini
- a : Jumlah siswa kelas 1 SD yang pernah mengikuti TK/BA/RA
- b : Jumlah siswa kelas 1

Sumber Data/Publikasi

Penyusunan Publikasi Potret Pendidikan Indonesia Statistik, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1890>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 – 23 tahun. Tingginya APK mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi pendidikan tinggi. APK dapat lebih dari 100 persen karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 – 23 tahun. Oleh karena itu, tercapainya angka 100 persen adalah sesuatu yang patut diupayakan namun tidak cukup, karena belum tentu seluruh remaja dengan rentang usia tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$APK_{PT} = \frac{JM_{PT}}{JP(19-23)} \times 100\%$$

Keterangan:

- APK_{PT} : Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
- JM_{PT} : Jumlah murid pada jenjang Pendidikan D1/D2/D3/D4/S1/S2 pada periode tertentu
- JP(19-23) : Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/indikator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>.

Disagregasi
Nasional.


Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 5: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

SASARAN 1: Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha.

INDIKATOR: Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi perkawinan perempuan dalam rentang umur 20-24 tahun yang telah menikah sebelum 18 tahun (perkawinan anak). Indikator ini juga sebagai perwujudan Indonesia dalam upaya menghapuskan perkawinan anak pada tahun 2030. Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menangkap informasi status perkawinan atau hidup bersama maka dapat diperoleh informasi indikasi awal kemungkinan untuk hamil dan tingkatan risiko menjadi hamil, sebagai contoh usia pertama kali melakukan hubungan seksual, dan frekuensi hubungan seksual yang terakhir serta untuk mempelajari perubahan pola fertilitas di Indonesia. Perkawinan dini selain memiliki risiko dalam kesehatan perempuan, juga memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 6.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$PHB < 18 = \frac{JPBH < 18}{JP (20 - 24)} \times 100\%$$

Keterangan:

- PHB<18 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun
- JPBH<18 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun
- JP (20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

Sumber Data/Publikasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kesetaraan Gender, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase terjadinya minimal satu kekerasan terhadap anak usia 13-17 tahun, baik itu kekerasan seksual, fisik, atau emosional.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$PKtAL = \frac{JALK}{JAL} \times 100\% \quad PKtAP = \frac{JAPK}{JAP} \times 100\%$$

Keterangan:

- PKtAL/PKtAP : Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki/perempuan
- JALK/JAPK : Jumlah anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JAL/JAP : Jumlah anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun pada periode yang sama

Sumber Data/Publikasi

Kompilasi Data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1953>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
3 tahunan.

INDIKATOR: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung dari rata-rata aritmatik tiga indikator yaitu, proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan, proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan, serta upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan.

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Badan Pusat Statistik, 2021.

Tautan Publikasi

1. <https://bps.go.id/indikator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>;
2. <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab2>.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

Disagregasi

Nasional, provinsi, kabupaten/kota.

INDIKATOR: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan menggambarkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) perempuan yang masuk ke pasar kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan besarnya tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap penduduk usia kerja perempuan di suatu negara/wilayah. TPAK perempuan yang semakin tinggi menunjukkan semakin besarnya peran perempuan dalam memberikan nilai tambah ke ekonomi.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$TPAK_{\text{perempuan}} = \frac{PAK_{\text{perempuan}}}{P_{\text{perempuan}}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PAK_{\text{perempuan}}$ = Jumlah angkatan kerja perempuan (juta orang)

$P_{\text{perempuan}}$ = Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) perempuan (juta orang)

Sumber Data/Publikasi

1. International Labour Organization, *Key Indicators of the Labour Market*, Edisi ke-9, 2016
2. Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

1. https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/WCMS_498929/lang--en/index.htm;
2. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab4>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.

INDIKATOR: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir adalah prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun yang dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan selama 12 bulan terakhir.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun dihitung dengan jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik dan/atau seksual) yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah perempuan umur 15-64 tahun pada periode yang sama dikalikan 100%.

Sumber Data/Publikasi

Berita Resmi Statistik Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Hasil SPHPN 2016, KemenPPPA dan Badan Pusat Statistik, 2017.

Tautan Publikasi

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/41/4000/infografis-snphar-2021>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

5 tahunan.

INDIKATOR: Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir sebagai tolak ukur kepedulian pemuda terhadap lingkungan sosial.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019, Kementerian PPN/Bappenas, KemenkoPMK, Kemenpora, 2019.

Tautan Publikasi

https://www.bappenas.go.id/files/3516/1582/2931/Laporan_IPP_2019.pdf.


Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir.

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir sebagai tolak ukur pemuda dalam berkontribusi kepada masyarakat dalam kegiatan organisasi.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019, Kementerian PPN/Bappenas, KemenkoPMK, Kemenpora, 2019.

Tautan Publikasi

https://www.bappenas.go.id/files/3516/1582/2931/Laporan_IPP_2019.pdf.


Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang berusaha dengan jenis jabatan } white\ collar}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemenpora, 2019.

Tautan Publikasi

https://www.bappenas.go.id/files/3516/1582/2931/Laporan_IPP_2019.pdf.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase penduduk berusia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan keluhan tersebut mengganggu aktivitas sehari – hari}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 30 tahun}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemenpora, 2019.

Tautan Publikasi

https://www.bappenas.go.id/files/3516/1582/2931/Laporan_IPP_2019.pdf.

Disagregasi


Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 6: Pengentasan Kemiskinan****SASARAN 1: Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan**

INDIKATOR: Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang dapat mengakses pendanaan usaha dalam meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Rumah tangga miskin dan rentan yang dapat mengakses salah satu dari KUR, kredit bank, BPR, koperasi, perorangan dengan bunga, pegadaian, perusahaan *leasing*, KuBe, Bundes dan layanan keuangan lainnya.

Metode perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga di bawah 40\% yang dapat mengakses pendanaan aset}}{\text{Total rumah tangga 40\% terbawah}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat).

Tautan Publikasi

-

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang dapat memperoleh akses kepemilikan lahan dalam meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Satuan

Rumah tangga.

Metode Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah/lahan baik dari Program Reforma Agraria dan akses penggunaan lahan dari Perhutanan Sosial.

Sumber Data/Publikasi

Data Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tautan Publikasi

-

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

Disagregasi

Nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan spasial lokasi tanah.

**PROGRAM PRIORITAS 7: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing****SASARAN 1: Meningkatkan produktivitas dan daya saing****INDIKATOR: Jumlah lulusan pelatihan vokasi****Definisi**  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah lulusan pelatihan vokasi dalam satu tahun anggaran. Pelatihan vokasi adalah proses pembekalan angkatan kerja dengan keahlian (*skills*) umum dan teknis spesifik yang dibutuhkan di dunia kerja. Pelatihan vokasi dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal dengan durasi pendek melalui: (1) pembekalan angkatan kerja baru dengan keahlian/kompetensi kerja tertentu (*skilling*); (2) peningkatan keahlian/kompetensi kerja di jabatan atau profesi tertentu (*upskilling*); dan (3) pembekalan angkatan kerja dengan keahlian/kompetensi kerja yang berbeda/baru untuk beralih jabatan, profesi, atau wirausaha (*reskilling*). Pelaksanaan pelatihan yang dimaksud merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dibiayai menggunakan APBN.

Satuan

Juta orang.

Metode Penghitungan

Jumlah lulusan kegiatan pelatihan vokasi yang diselenggarakan atau dibina oleh Kementerian/Lembaga, termasuk peserta penerima Kartu Prakerja.

Sumber Data/Publikasi

Aplikasi KRISNA, Aplikasi *e-monev*, Aplikasi SMART, dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kartu Prakerja, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian.

Tahun publikasi dari sumber yang digunakan dari sejak 2019, kecuali Kartu Prakerja baru sejak 2020.

Tautan Publikasi

1. <https://naker.dit.krisna.systems/rkp/2022/prioritas-matrix-pembangunan;>
2. [https://e-monev.bappenas.go.id/fe/;](https://e-monev.bappenas.go.id/fe/)
3. [https://smart.kemenkeu.go.id/;](https://smart.kemenkeu.go.id/) dan
4. [https://www.prakerja.go.id/publikasi.](https://www.prakerja.go.id/publikasi)


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan dihitung dengan memilah data berdasarkan angkatan kerja yang menyelesaikan pendidikan terakhir dalam satu tahun terakhir. Lalu, data tersebut digunakan sebagai dasar menghitung jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja dibagi dengan jumlah seluruh lulusan pendidikan vokasi yang lulus setahun terakhir. Tingkat pendidikan yang kami identifikasi sebagai pendidikan vokasi adalah lulusan SMK/MAK dan Diploma (Diploma I/II/III IV).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan = (sigma) lulusan pendidikan vokasi (SMK/MAK & D1/D2/D3/D4) yang lulus dalam 1 tahun terakhir dan bekerja dalam 1 tahun setelah kelulusan / (sigma) lulusan pendidikan vokasi (SMK/MAK & D1/D2/D3/D4) yang lulus dalam 1 tahun terakhir.

$$\frac{\text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi bekerja 1 tahun terakhir dalam 1 tahun setelah kelulusan}}{\text{Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang lulus dalam 1 tahun terakhir}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Definisi Operasional Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, Badan Pusat Statistik, 2019.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/307a288d678f91b9be362021/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2020.html>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan (rilis bulan Agustus).

INDIKATOR: Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah pada jenjang S1/S2/S3.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase LPTLB} = \frac{\sum \text{LPTLB}}{\sum \text{LPT}} \times 100\%$$

Keterangan:

LPTLB : Jumlah lulusan pendidikan tinggi (S1/S2/S3) yang lulus setahun terakhir dan mulai bekerja pada setahun terakhir

LPT : Jumlah lulusan pendidikan tinggi (S1/S2/S3) dalam setahun terakhir

Sumber Data/Publikasi

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Badan Pusat Statistik


Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah prototipe dari perguruan tinggi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Prototipe R&D adalah bentuk awal (contoh) atau standar ukuran dari sebuah riset dasar (tingkat kesiapterapan teknologi 1 s.d 3) atau riset terapan (tingkat kesiapterapan teknologi 4 s.d 6). Prototipe Industri adalah bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya (tingkat kesiapterapan teknologi 7).

Satuan

Prototipe.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah kumulatif prototipe dari perguruan tinggi yang memenuhi kriteria tingkat kesiapterapan teknologi mengacu pada Permenristekdikti No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

Sumber Data/Publikasi

Definisi Operasional Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah produk inovasi dari *tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kegiatan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) adalah program yang diberikan kepada *tenant* perusahaan pemula berbasis teknologi melalui lembaga inkubator bisnis untuk menjalankan proses inkubasi terhadap perusahaan pemula/*tenant* sehingga siap untuk menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi yang mendatangkan keuntungan (*profitable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Satuan

Produk.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh *tenant* PPBT yang dibina.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2021, LIPI/BRIN, 2020.

Tautan Publikasi

http://lipi.go.id/public/uploads/ppid/LAPORAN_KINERJA_LIPI_TAHUN_2020.pdf.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha merupakan produk hasil inovasi lembaga pemerintah maupun swasta dan telah dimanfaatkan dalam proses produksi oleh industri atau badan usaha.

Satuan

Inovasi.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah menghitung jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan oleh perusahaan atau badan usaha.

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tautan Publikasi

-

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

-

INDIKATOR: Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator yang menyatakan jumlah permohonan paten yang telah memenuhi persyaratan administrasi formalitas KI domestik.

Satuan

Paten.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah paten *granted* (domestik)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator yang menyatakan jumlah paten yang disetujui/diberikan (*granted*) dalam cakupan domestik.

Satuan

Paten.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah paten *granted*.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek yaitu dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi pendidikan S3.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah sumber daya manusia iptek terkualifikasi S3 dibagi dengan jumlah sumber daya manusia iptek pada periode sama dikalikan 100 persen.

$$\text{Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3} = \frac{\text{Jumlah sumber daya manusia iptek berkualifikasi S3}}{\text{Jumlah sumber daya manusia iptek pada periode yang sama}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, Kemendikbudristek, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah Pusat Unggulan (PUI) Iptek yang telah ditetapkan. Pusat Unggulan Iptek adalah instrumen kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang pemerintah (LPK dan LPNK), perguruan tinggi, atau badan usaha (swasta) menjadi lembaga litbang berkinerja tinggi dan bertaraf internasional di bidang spesifik dan menunjukkan relevansi, pendayagunaan, dan kemanfaatan produk litbang bagi pengguna.

Satuan

PUI.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, Kemendikbudristek, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan.

Satuan

Infrastruktur.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, BRIN, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis perguruan tinggi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah *Science Techno Park* (STP) yang ada dan dikembangkan berbasis perguruan tinggi. STP merupakan tempat pengembangan riset dasar yang kemudian dibuat alih teknologi untuk diseminasikan ke masyarakat atau industri. Sedangkan *technopark* merupakan tempat prototipe teknologi diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atau dikomersialisasi industri.

Satuan

Unit.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah STP yang ada dan dikembangkan berbasis perguruan tinggi.

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tautan Publikasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah *Science Techno Park* yang ada yang dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah *Science Techno Park* (STP) yang ada dan dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi. STP merupakan tempat pengembangan riset dasar yang kemudian dibuat alih teknologi diseminasi ke masyarakat atau industri. Sedangkan *technopark* merupakan tempat di mana prototipe teknologi diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat atau dikomersialisasi industri.

Satuan

Unit.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah STP yang ada dan dikembangkan berbasis nonperguruan tinggi.

Sumber Data/Publikasi

Judul publikasi dari sumber yang digunakan adalah Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, BRIN, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah produk inovasi dan produk Riset Nasional yang dihasilkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional 2020-2024.

Satuan

Produk.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah produk inovasi dan produk riset prioritas riset nasional yang dihasilkan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, BRIN, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Satuan

Teknologi.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, BRIN, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.

Satuan

Teknologi.

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.

Tautan Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2020, BRIN, 2020.

Sumber Data/Publikasi

<https://www.brin.go.id/informasi-publik/laporan-kinerja-2020/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Peringkat pada Asian Games

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Peringkat Indonesia pada Asian Games.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah urutan peringkat berdasarkan jumlah total perolehan medali emas, perak dan perunggu dari negara atau tim peserta Asian Games.

Sumber Data/Publikasi

Cambodia South East Asia Games Organizing Committee.

Tautan Publikasi

<https://cambodia2023.com/>.

Disagregasi

Internasional.

Frekuensi Pengumpulan

dua tahunan.

INDIKATOR: Peringkat pada Asian Para Games

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Peringkat Indonesia pada Asian Para Games.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan yang digunakan adalah urutan peringkat berdasarkan jumlah perolehan medali mulai dari medali emas, perak dan perunggu dari negara atau tim peserta Asian Para Games.

Sumber Data/Publikasi

Cambodia ASEAN Para Games Organization Committee.

Tautan Publikasi

<https://apg2022.com/>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

PRIORITAS NASIONAL 4

Jumlah Indikator PN

6



21

Jumlah Indikator PP



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 4

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023


METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 4

Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan



SASARAN 1: Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya

INDIKATOR: Indeks Capaian Revolusi Mental

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) merupakan indeks yang menyatakan sejauh mana revolusi mental telah menjadi bagian dalam kehidupan bangsa.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

ICRM tersusun dari 31 indikator yang terbagi dalam 5 dimensi, yaitu Dimensi Gerakan Indonesia Melayani, dimensi gerakan Indonesia bersih, dimensi gerakan Indonesia tertib, dimensi gerakan Indonesia mandiri, dan dimensi gerakan Indonesia bersatu (akan dijabarkan dalam indikator).

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Kinerja 2020 Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengukuran ICRM dilakukan BPS, 2020.


Tautan Publikasi

https://kemendagri.go.id/documents/FILES/2020/LAPORAN_KINERJA_KEMENTERIAN_DALAM_NEGERI_2020.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tiga tahunan (pertama 2018).

INDIKATOR: Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral serta menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luhur Pancasila telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yakni masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berlandaskan Pancasila.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila adalah ukuran sikap dan perilaku konkret berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Ukuran ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam mengembangkan upaya mengembangkan pendidikan dan pembangunan sikap dan perilaku atau implementasi nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah batasan ukuran 0-100 yang didapat dari pengelolaan hasil survei.

Sumber Data/Publikasi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi

-


Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



SASARAN 2: Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan

INDIKATOR: Indeks Pembangunan Kebudayaan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya, (2) dimensi pendidikan, (3) dimensi ketahanan sosial budaya, (4) dimensi warisan budaya, (5) dimensi ekspresi budaya, (6) dimensi budaya literasi, dan (7) dimensi kesetaraan gender.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

IPK terdiri dari 7 dimensi dan 31 indikator:

Dimensi ekonomi budaya;

- 1) Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)

Dimensi pendidikan;

- 2) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+
- 3) Harapan lama sekolah penduduk usia 7+

- 4) Angka Kesiapan Sekolah
- 5) Persentase Satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah dan ekskul kesenian
- 6) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah
- 7) Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah

Dimensi ketahanan sosial budaya;

- 8) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal
- 9) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal
- 10) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama
- 11) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku
- 12) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir
- 13) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong
- 14) Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir
- 15) Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga

Dimensi warisan budaya;

- 16) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
- 17) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
- 18) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari
- 19) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni
- 20) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
- 21) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional

Dimensi ekspresi budaya;

- 22) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
- 23) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi
- 24) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
- 25) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

Dimensi budaya literasi;

- 26) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir

- 27) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
- 28) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat

Dimensi kesetaraan gender;

- 29) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki
- 30) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat
- 31) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendikbudristek.

Tautan Publikasi

<http://repositori.kemdikbud.go.id/21197/>.

Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



SASARAN 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial

INDIKATOR: Indeks Pembangunan Masyarakat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan indeks komposit yang mengukur:

1. Dimensi Kohesi Sosial: Menggambarkan kekuatan kolektif anggota atau kelompok di dalam masyarakat untuk saling menerima, berbagi, dan berkontribusi yang dilandasi solidaritas di dalam organisasi sosial, sehingga meneguhkan daya rekat masyarakat;
2. Dimensi Inklusi Sosial: Pilihan dan kesempatan yang terbuka bagi setiap orang (individu) dan kelompok untuk terlibat, mengambil peran, dan menjadi bagian yang menyatu dalam suatu proses sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk mendapatkan hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik;
3. Dimensi Kapasitas Masyarakat Sipil: Kemampuan masyarakat mengelola sumber daya publik, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, bernegosiasi, persuasi dan proses memengaruhi, mengelola perselisihan & konflik, dan memperkuat institusi publik yang akuntabel, untuk menopang dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang demokratis.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

IPMas terdiri dari 3 dimensi dan 12 isu yang dinilai dengan skala 0-1

Dimensi Kohesi Sosial:

- 1) Kerja Sama Sosial
- 2) Jejaring Sosial
- 3) Aksi Kolektif

4) Kepercayaan Sosial

Dimensi Inklusi Sosial:

- 5) Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial
- 6) Kesetaraan Gender
- 7) Dukungan Sosial bagi Minoritas

Dimensi Kapasitas Masyarakat Sipil:

- 8) Kesadaran Hukum dan Politik
- 9) Organisasi Masyarakat Sipil
- 10) Mitigasi Risiko Sosial
- 11) Penyelesaian Kekerasan/Perkelahian Massa
- 12) Akses terhadap Informasi

Sumber data dari Susenas dan Podes

Sumber Data/Publikasi

Kementerian PPN/Bappenas dan BPS, 2021.

Tautan Publikasi

Masih dalam proses penyusunan.

Disagregasi

Provinsi dan nasional.


Frekuensi Pengumpulan

Tiga tahunan.



SASARAN 4: Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat

INDIKATOR: Indeks Kerukunan Umat Beragama

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menyatakan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Terbentuk dari 3 komponen: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Tahun 2020, Kementerian Agama, 2021.

Tautan Publikasi
<http://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/files/LKJ%20TAHUN%202020.pdf>.
Disagregasi

Provinsi dan nasional.


Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



SASARAN 5: Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa

INDIKATOR: Indeks Pembangunan Keluarga

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh (>70), berkembang (40-70) atau rentan (<40).

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Terdiri dari 3 dimensi (ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan), 11 Indikator dan 17 variabel.

Dimensi ketenteraman:

1. Kegiatan ibadah

- 1) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;

2. Legalitas keluarga

- 2) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

3. Jaminan kesehatan

- 4) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta);

4. Keharmonisan Keluarga

- 5) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/minggat, kekerasan dalam rumah tangga);
- 6) Keluarga mengalami cerai hidup;

Dimensi Kemandirian:

5. Pemenuhan kebutuhan dasar

- 7) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan;
- 8) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah, dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
- 9) Keluarga tinggal dalam rumah layak huni;

6. Jaminan keuangan

- 10) Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dan lain lain) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan;

7. Keberlangsungan pendidikan

- 11) Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat);

8. Kesehatan keluarga

- 12) Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas;

9. Akses Media *Online*

- 13) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media *online* (internet);

Dimensi Kebahagiaan:

10. Interaksi Keluarga

- 14) Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari;
- 15) Selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri;
- 16) Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah;

11. Interaksi Sosial

- 17) Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Instansi 2020, BKKBN, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP-2020-2021/LAKIP%20BKKBN%20-%20TAHUN%202020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Median Usia Kawin Pertama Perempuan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50 persen dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei.

Satuan

Tahun.

Metode Penghitungan

Nilai tengah (median) dari gugus data usia kawin pertama perempuan yang diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Instansi 2020, BKKBN, 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/LAKIP-2020-2021/LAKIP%20BKKBN%20-%20TAHUN%202020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
SDKI 5 tahunan, Susenas tahunan.



SASARAN 6: Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif

INDIKATOR: Nilai Budaya Literasi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai Budaya Literasi merupakan salah satu dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Definisi operasional dari Budaya Literasi yaitu aktivitas serta sarana/prasarana pendukung untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan.

Dimensi ini secara umum mengukur aktivitas masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang berkaitan dengan unsur literasi.

Dimensi Literasi Budaya di IPK terdiri atas indikator yang sudah ada dalam Indeks Alibaca Dimensi Kecakapan Poin 13 s.d. 16.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

- 1) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir;
- 2) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir;
- 3) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendikbudristek, 2020.

Tautan Publikasi

<http://repositori.kemdikbud.go.id/21197/>.

Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan


Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 1: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter.

SASARAN 1: Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu

INDIKATOR: Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Gerakan Indonesia Melayani merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental.

Indeks ini berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh ASN kepada rumah tangga sesuai dengan fungsi satuan kerjanya. Satuan kerja yang memperoleh tugas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus secara terus-menerus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, memiliki kepastian hukum, dan berbasis IT. Pelayanan kini didorong untuk bertransformasi menjadi *e-services*, terlebih di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Aparatur Sipil Negara harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder*, termasuk masyarakat. Sinergi dengan masyarakat antara lain dapat dijalin melalui penyediaan akses pengaduan mengenai pelayanan publik, di mana harus dapat ditangani secara cepat oleh unit kerja terkait.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani memiliki 3 indikator:

1. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat dan tidak bertele-tele;
2. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas;
3. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendagri, Pengukuran ICRM dilakukan BPS, 2021.


Tautan Publikasi

https://kemendagri.go.id/documents/FILES/2020/LAPORAN_KINERJA_KEMENTERIAN_DALAM_NEGERI_2020.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tiga tahunan (pertama 2018).

INDIKATOR: Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Gerakan Indonesia Bersih merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental. Indeks ini berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik, deregulasi, pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah, mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat dan peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih memiliki 5 indikator:

- a. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pasar tradisional di wilayah tempat tinggalnya bersih;
- b. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa terminal di wilayah tempat tinggalnya bersih;

- c. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa rumah sakit/puskesmas di wilayah tempat tinggalnya bersih;
- d. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa kantor pemerintah di wilayah tempat tinggalnya bersih;
- e. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan (sekolah/kampus) di wilayah tempat tinggalnya bersih.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendagri, Pengukuran ICRM dilakukan BPS, 2021.


Tautan Publikasi

https://kemendagri.go.id/documents/FILES/2020/LAPORAN_KINERJA_KEMENTERIAN_DALAM_NEGERI_2020.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tiga tahunan (pertama 2018).

INDIKATOR: Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Gerakan Indonesia Tertib merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental. Indeks ini mendefinisikan perilaku tertib penggunaan ruang publik, peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan, peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan, peningkatan perilaku tertib berlalu lintas, peningkatan perilaku antrai, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku, peningkatan penegakan hukum perilaku tertib dan menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib memiliki 5 indikator:

1. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa anggota masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah membuang sampah pada tempatnya;
2. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa trotoar di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah digunakan sepenuhnya untuk pejalan kaki;
3. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa jalan raya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sudah digunakan sepenuhnya untuk lalu lintas kendaraan saja;
4. Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa budaya antrai sudah diterapkan sepenuhnya pada tempat pelayanan publik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
5. Persentase penduduk 17+ yang mempunyai nomor induk kependudukan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendagri, Pengukuran ICRM dilakukan BPS, 2021.

Tautan Publikasi

https://kemendagri.go.id/documents/FILES/2020/LAPORAN_KINERJA_KEMENTERIAN_DALAM_NEGERI_2020.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tiga tahunan (pertama 2018).

INDIKATOR: Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental. Indeks ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri, pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual, peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa, deregulasi dan peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri memiliki 9 indikator:

1. Persentase rumah tangga yang menyatakan adanya peningkatan jumlah usaha baru (usaha mikro/kecil/rumah tangga dan sejenisnya) di wilayah tempat tinggalnya dalam 6 bulan terakhir.
2. Persentase penduduk 15+ yang menonton secara langsung pertunjukan seni.
3. Persentase penduduk 15+ yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya.
4. Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional.
5. Persentase penduduk 15+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.
6. Persentase masyarakat (rumah tangga) yang menyelenggarakan upacara adat.
7. Persentase penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu terakhir (dari seluruh pekerjaan).
8. Persentase penduduk 15+ yang pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/bimbingan belajar/pendidikan keterampilan dalam setahun terakhir.
9. Persentase penduduk 15+ yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di non lembaga keuangan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendagri, Pengukuran ICRM dilakukan BPS, 2021.


Tautan Publikasi

https://kemendagri.go.id/documents/FILES/2020/LAPORAN_KINERJA_KEMENTERIAN_DALAM_NEGERI_2020.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tiga tahunan (pertama 2018).

INDIKATOR: Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu merupakan salah satu dimensi yang menyusun Indeks Capaian Revolusi Mental. Indeks ini berkaitan dengan program ini fokus pada peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila, peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama, peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial, peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marginal, dan berkebutuhan khusus.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu memiliki 9 indikator:

1. Persentase penduduk 15+ yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir.
2. Persentase penduduk 15+ yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
3. Persentase penduduk 15+ yang aktif mengikuti kegiatan organisasi.
4. Persentase rumah tangga yang mengibarkan/memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
5. Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya.
6. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
7. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
8. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda agama.
9. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendagri, Pengukuran ICRM dilakukan BPS, 2021.

Tautan Publikasi

https://kemendagri.go.id/documents/FILES/2020/LAPORAN_KINERJA_KEMENTERIAN_DALAM_NEGERI_2020.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tiga tahunan (pertama 2018).

**SASARAN 2: Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila****INDIKATOR: Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha E**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dimensi pertama yang merujuk dari sila pertama Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila dalam rangka keimanan yang bersifat inklusif, toleran dan membuahkan kesalehan sosial.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

D_j : Sila ke-j

n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j

X_i : Nilai indikator ke-i

Sumber Data/Publikasi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi

Belum dipublikasikan.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan (basis data tahun 2018).

INDIKATOR: Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan dimensi kedua yang merujuk dari sila kedua Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran untuk melindungi serta memenuhi Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

D_j : Sila ke-j

n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j

X_i : Nilai indikator ke-i

Sumber Data/Publikasi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi

Belum dipublikasikan.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan (basis data tahun 2018).

INDIKATOR: Nilai Dimensi Persatuan Indonesia

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Persatuan Indonesia merupakan dimensi ketiga yang merujuk dari sila ketiga Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila dalam rangka terbentuknya kewargaan nasionalistik yang merawat persatuan nasional di tengah kemajemukan bangsa.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

D_j : Sila ke-j

n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j

X_i : Nilai indikator ke-i

Sumber Data/Publikasi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi

Belum dipublikasikan.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan (basis data tahun 2018).

INDIKATOR: Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan merupakan dimensi keempat yang merujuk dari sila keempat Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila dalam rangka demi terbentuknya etos demokratis, baik dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

D_j : Sila ke-j

n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j

X_i : Nilai indikator ke-i

Sumber Data/Publikasi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi

Belum dipublikasikan.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan (basis data tahun 2018).

INDIKATOR: Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesiamerupakan dimensi kelima yang merujuk dari sila kelima Pancasila. Dimensi ini mengukur aktualisasi Pancasila

demi tersusunnya sistem ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial, serta demi terbentuknya etos kepedulian sosial di kalangan warga negara.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$\text{Indeks } D_j = \frac{1}{n_j (\sum [X_i])}$$

Keterangan:

D_j : Sila ke-j

n_j : Banyaknya indikator di Sila ke-j

X_i : Nilai indikator ke-i

Sumber Data/Publikasi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tautan Publikasi

Belum dipublikasikan.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan (basis data tahun 2018).



SASARAN 3: Meningkatkan peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter

INDIKATOR: Indeks Kerentanan Keluarga

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Sebagai sebuah ukuran tingkat ketahanan keluarga, maka R-IKK yang merupakan indeks komposit mencakup multidimensi, multivariabel, dan multiindikator, perlu diukur dengan menggunakan skenario pembobotan dimensi, variabel, dan indikator tertentu yang dianggap cocok. Metode yang digunakan untuk penentuan besarnya bobot dimensi, variabel, dan indikator pada publikasi ini adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa berbagai dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan pada saat ini diukur menggunakan berbagai data yang memiliki satuan ukur yang berbeda-beda dan telah diagregasi ke level provinsi.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Tingkat Ketahanan Keluarga diukur secara komposit yang mencakup berbagai indikator dari berbagai data hasil survei yang relevan.

Sumber Data/Publikasi

Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga 2018, Kementerian PPPA. 2018.

Tautan Publikasi

-


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Karakter Remaja

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Karakter Remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan karakter remaja. Karakter yang dimaksud mengacu pada perilaku yang baik dan tidak baik yang berdampak buruk pada diri remaja. Indeks Karakter Remaja ini bernilai 0-100, di mana semakin tinggi nilainya, berarti semakin baik pembangunan karakter remaja.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indeks Karakter Remaja dibangun dari komposit 4 indikator terdiri dari:

- (1) tidak merokok;
- (2) tidak hamil di usia remaja;
- (3) tidak menikah di usia dini; dan
- (4) mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, BKKBN, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/lkip-uke-ii-2020/LKIP%20DITHANREM%20TA%202020.pdf>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan


Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 2: Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

SASARAN 1: Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan

INDIKATOR: Nilai Dimensi Warisan Budaya

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Warisan Budaya merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dimensi ini secara umum mengukur upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap produk budaya baik warisan budaya benda dan takbenda dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

- 1) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.
- 2) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.
- 3) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari.
- 4) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni.

- 5) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah.
- 6) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendikbudristek.

Tautan Publikasi

<http://repositori.kemdikbud.go.id/21197/>.


Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Nilai Dimensi Ekspresi Budaya

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Ekspresi Budaya merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Kebudayaan. Definisi operasional Ekspresi Budaya: Hak universal yang harus dapat dinikmati semua orang, termasuk di antaranya kebebasan setiap orang untuk mengikuti kegiatan sosial-budaya. Dimensi ini secara umum mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial-budaya.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

- 1) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir;
- 2) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi;
- 3) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni;
- 4) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendikbudristek.

Tautan Publikasi

<http://repositori.kemdikbud.go.id/21197/>.


Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Nilai Dimensi Ekonomi Budaya

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dimensi Ekonomi Budaya merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Kebudayaan. Definisi operasional Ekonomi Budaya: Aktivitas Ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Dimensi Ekonomi Budaya pada dasarnya mengukur aktivitas masyarakat di bidang kebudayaan yang memberikan nilai tambah ekonomi, dalam hal ini didekati dengan indikator banyaknya masyarakat yang menjadikan keterlibatan dalam aktivitas budayanya sebagai sumber penghasilan.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja 2020, Kemendikbud, 2020.

Tautan Publikasi

<http://repositori.kemdikbud.go.id/21197/>.

Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan


Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 3: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial

SASARAN 1: Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama

INDIKATOR: Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji merupakan indeks yang menyatakan sejauh mana tingkat kepuasan terhadap layanan Ibadah Haji.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan*

Tersusun atas komponen:

- 1) Pendaftaran;
- 2) Bimbingan manasik haji;
- 3) Pemberangkatan;
- 4) Prosesi ibadah haji;
- 5) Pemulangan.

**usulan BPS: Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari pengukuran atas 10 dimensi kualitas pelayanan publik.*

Masing-masing dimensi diukur melalui 7 (tujuh) variabel jenis pelayanan haji selama di Arab Saudi, yaitu:

1. pelayanan petugas haji,
2. pelayanan ibadah,
3. pelayanan transportasi bus,
4. pelayanan akomodasi,
5. pelayanan catering,
6. pelayanan kesehatan, dan
7. pelayanan lain-lain

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Tahun 2020, Kementerian Agama.

Tautan Publikasi

<http://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/files/LKJ%20TAHUN%202020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Kepuasan Layanan KUA

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Kepuasan Layanan KUA merupakan indeks yang menyatakan sejauh mana tingkat kepuasan terhadap layanan Kantor Urusan Agama (KUA).

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Alat ukur sesuai dengan Permenpan RB No.14/2017:

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- 3) Waktu Penyelesaian;
- 4) Biaya/Tarif;
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi Pelaksana;
- 7) Perilaku Pelaksana;
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- 9) Sarana dan Prasarana.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Tahun 2020, Kementerian Agama.


Tautan Publikasi

<http://cms.kemenag.go.id/storage/flm/files/shares/files/LKJ%20TAHUN%202020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai Dimensi Toleransi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima dan menghargai perbedaan.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel yang diambil di masing-masing provinsi sebanyak 400 responden, sehingga jumlah keseluruhan sampel 13.600 responden.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019, Kementerian Agama.

Tautan Publikasi

https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets_front/pdf/1611131137Indeks_Kerukunan_Umat_Beragama_Tahun_2019.pdf.

Disagregasi
Provinsi, nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai Dimensi Kesetaraan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel yang diambil di masing-masing provinsi sebanyak 400 responden, sehingga jumlah keseluruhan sampel 13.600 responden.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019, Kementerian Agama.

Tautan Publikasi

https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets_front/pdf/1611131137Indeks_Kerukunan_Umat_Beragama_Tahun_2019.pdf.

Disagregasi
Provinsi, nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Nilai Dimensi Kerja Sama

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator kerja sama, menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel yang diambil di masing-masing provinsi sebanyak 400 responden, sehingga jumlah keseluruhan sampel 13.600 responden.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019, Kementerian Agama.

Tautan Publikasi

https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/assets_front/pdf/1611131137Indeks_Kerukunan_Umat_Beragama_Tahun_2019.pdf.

Disagregasi
Provinsi, nasional.


Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 4: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

SASARAN 1: Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif

INDIKATOR: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indeks yang mengukur Pembangunan Literasi Masyarakat.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$\text{Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat} = \sum_{\text{ALM}}^{\text{UPLM}} \times 100$$

Keterangan:

- UPLM 1 : Pemerataan layanan perpustakaan
- UPLM 2 : Ketercukupan koleksi
- UPLM 3 : Ketercukupan tenaga perpustakaan
- UPLM 4 : Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
- UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP
- UPLM 6 : Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan
- UPLM 7 : Anggota perpustakaan
- ALM : Aspek Masyarakat

**masukan BPS:*

Rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada dasarnya terdiri atas dua (2) komponen, antara lain: komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Berikut adalah rumus pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

$$\sum_i \frac{\text{UPLM}_i}{\text{AM}} \times 100$$

Keterangan:

- UPLMi : Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM).*
- AM : Aspek Masyarakat. Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan.*

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Tahun 2020, Perpustakaan Nasional, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.perpusnas.go.id/webforms/uploads/files/210422124455boJXN6ldBH.pdf>.

Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan, 2020.

PRIORITAS NASIONAL 5

Jumlah Indikator PN

14



37

Jumlah Indikator PP



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 5

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023


METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 5

Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi Dasar



SASARAN 1: Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar

INDIKATOR: Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100$$

Keterangan:

- PHLT = Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau
- JRTHLT = Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau
- JRT = Jumlah rumah tangga

Sumber Data/Publikasi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, BPS, 2020.


Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Rasio fatalitas kecelakaan jalan diartikan sebagai tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas yang dihitung per 10.000 kendaraan, guna nantinya digunakan untuk mengukur *Road Safety Index* (RSI). Penurunan didefinisikan sebagai perbandingan antara rasio fatalitas kendaraan terhadap angka dasar periode tahun tertentu (misal tahun 2020).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah korban meninggal dari kecelakaan lalu lintas (bersumber dari Polri) dibagi jumlah kendaraan (bersumber dari BPS).

Sumber Data/Publikasi

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.

Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini merupakan luas daerah irigasi yang selesai mendapatkan intervensi program modernisasi irigasi TA. 2022 (DI. Mrican, Way Sekampung) dan TA. 2023 (DI Pamukkulu, DI Kedung Putri) dibagi luas total daerah irigasi permukaan kewenangan Pemerintah Pusat (2.376.521 Ha, berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015).

Satuan

(kumulatif, persen (%)).

Metode Penghitungan

Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi merupakan jumlah luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi dibagi dengan jumlah luas daerah irigasi premium, dinyatakan dalam persen.

Sumber Data/Publikasi

1. Peraturan PUPR Nomor 14 Tahun 2015;
2. Diolah dari data pelaksanaan modernisasi irigasi (Direktorat Irigasi dan Rawa);
3. Bahan informasi pertemuan BPK pada 9 November 2022.


Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase pemenuhan kebutuhan air baku

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini didefinisikan sebagai proporsi pemenuhan kebutuhan air baku. Air Baku didefinisikan air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. Pemenuhan kebutuhan air terbagi atas 2 macam standar kebutuhan air, yaitu penyediaan air domestik dan non domestik. Perhitungan kebutuhan air dipengaruhi oleh jumlah penduduk saat ini, dan kenaikan penduduk di masa mendatang sehingga dapat mengetahui kebutuhan air pada masa yang akan datang (domestik). Sedangkan penyediaan air non domestik ditentukan oleh banyaknya fasilitas seperti perkantoran, kesehatan, industri, komersial, umum dan lainnya.

Satuan

(kumulatif, %).

Metode Penghitungan

Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut. Perhitungan dilakukan melalui perkembangan penduduk dengan metode aritmatika: Jumlah penduduk pada tahun proyeksi (jiwa) (P_n) = jumlah penduduk pada awal tahun dasar (jiwa) (P_o) + rata-rata pertambahan penduduk (jiwa/tahun) (a) x kurun waktu proyeksi (tahun) (n). Kemudian dihitung dengan kriteria perencanaan air bersih dan kebutuhan air domestik tiap kategori.

Sumber Data/Publikasi

1. Data PDAM hingga 2010;
2. Capaian Renstra 2010-2019 pada buku Renstra Ditjen SDA 2020-2024;
3. Data capaian Renstra 2020-2022 berdasarkan data pemantauan Dit. SSPSDA;
4. Rencana capaian 2023 berdasarkan target pagu alokasi anggaran;
5. Asumsi kebutuhan domestik berdasarkan rata-rata kebutuhan air di kota menengah;
6. Asumsi kebutuhan industri 20% dari kebutuhan domestik;
7. Jumlah penduduk tahun 2023 berdasarkan Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS.

Indikator yang dipublikasikan berjudul "Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat".

Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



SASARAN 2: Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar

INDIKATOR: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas, dan lain-lain.

Satuan

Jam/100 km.

Metode Penghitungan

Waktu tempuh diperoleh dari hasil pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain. Hasil perhitungan waktu tempuh secara agregat dapat ditampilkan menurut koridor dan pulau dengan menjumlahkan hasil perkalian waktu tempuh masing-masing rute/koridor dengan masing-masing jarak dan membaginya dengan total jarak koridor atau pulau (rerata tertimbang).

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian PUPR, 2021.


Tautan Publikasi

<https://binamarga.pu.go.id/assets/js/vendor/ckeditor/uploads/Renstra/Renstra%20DJB M%202020%20-%202024.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Merupakan perbandingan antara jumlah trayek pelayaran yang membentuk *loop* dengan jumlah trayek pelayaran tetap dan teratur (linier).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase rute pelayaran yang saling terhubung =

$$\frac{\sum \text{jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop}}{\sum \text{jumlah pelayaran dengan trayek tetap teratur}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, 2021.

Tautan Publikasi

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20210507104008.LKIP_DIRJEN_HUBLA_TAHUN_2020.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Track Quality Index merupakan suatu ukuran nilai (*index*) yang digunakan untuk menyatakan tingkat kualitas keteraturan suatu rel berdasarkan beberapa parameter penyusunnya.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Parameter yang digunakan dalam menentukan nilai TQI untuk standar perkeretaapian Indonesia meliputi: lebar sepur, *profile* (angkatan), *alignment* (listringan), dan *crosslevel* (pertinggian). Nilai *Track Quality Index* adalah jumlah dari keempat parameter tersebut.

Sumber Data/Publikasi

Buku Statistik Bidang Perkeretaapian, Ditjen Perkereataapian, Kementerian Perhubungan, 2021.

Tautan Publikasi

[https://djka.dephub.go.id/uploads/202108/Buku_Statistik_Tahun_2021_\(Semester_I\)_BARU.pdf](https://djka.dephub.go.id/uploads/202108/Buku_Statistik_Tahun_2021_(Semester_I)_BARU.pdf).

Disagregasi

Nasional dan wilayah.

Frekuensi Pengumpulan

Semesteran.

INDIKATOR: Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Ketepatan waktu penerbangan (*On Time Performance/OTP*) adalah kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara =

$$\frac{\text{Jumlah Penerbangan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Total Penerbangan}} \times 100\%$$

Sumber Data/Publikasi

Renstra 2020-2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, 2020.

Tautan Publikasi

-

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



SASARAN 3: Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan

INDIKATOR: Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini mendefinisikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan dalam satuan kota.

Satuan

Kota.

Metode Penghitungan

Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan dalam satuan kota.

Sumber Data/Publikasi

-

Tautan Publikasi

-

Disagregasi

-

Frekuensi Pengumpulan

-

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di perkotaan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100$$

Keterangan:

PHLT = Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau (khusus di daerah perkotaan)

JRTHLT = Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau (khusus di daerah perkotaan)

JRT = Jumlah rumah tangga

Sumber Data/Publikasi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, BPS, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**SASARAN 4: Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan****INDIKATOR: Rasio elektrifikasi**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang

dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$RE = \frac{RT_{PLN} + RT_{NonPLN}}{RT} \times 100\%$$

Keterangan:

RE	:	Rasio elektrifikasi
RTPLN	:	Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN
RTNonPLN	:	Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN
RT	:	Jumlah rumah tangga

Sumber Data/Publikasi

1. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, BPS, 2020;
2. Kementerian ESDM.


Tautan Publikasi

1. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=3289&th=2020;>
2. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita) adalah jumlah kWh (*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun.

Satuan

kWh/kapita.

Metode Penghitungan

$$KLpk = \frac{KL_{PLN} + KL_{NonPLN}}{P}$$

Keterangan:

KLpk	:	Konsumsi listrik per kapita (penjualan listrik + pemakaian listrik sendiri)
KL PLN	:	Total konsumsi listrik PLN (perusahaan PPU = penjualan listrik + pemakaian listrik sendiri; perusahaan IO = pemakaian listrik sendiri)
KL nonPLN	:	Total konsumsi listrik Non PLN
P	:	Jumlah Penduduk

Sumber Data/Publikasi

1. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, BPS, 2020;

2. Kementerian ESDM.


Tautan Publikasi

1. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=3289&th=2020;>
2. [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf.](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/892ec-20220225-2143-lakin-djk-2021-cover-pk.pdf)

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Penurunan emisi GRK sektor energi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam sektor energi sesuai komitmen Presiden Indonesia tahun 2009 dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sesuai Perpres No. 61 tahun 2011.

Satuan

Juta ton.

Metode Penghitungan

$$\text{Emisi} = \text{EC} \cdot \text{EF}$$

Keterangan:

- EC : Kapasitas daya pembangkit listrik atau kapasitas daya pembangkit energi
- EF : Faktor emisi atas tipe teknologi tertentu (bahan bakar yang digunakan) untuk polutan jenis tertentu
- Emisi : Kapasitas pembangkit listrik atau kapasitas daya pembangkit energi (EC) + faktor emisi atas tipe teknologi tertentu (bahan bakar yang digunakan) untuk polutan jenis tertentu

Sumber Data/Publikasi

1. Kementerian ESDM;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tautan Publikasi

1. <https://drive.esdm.go.id/wl/?id=R0Gv1gFac4c5kCJoPOswES8EPq5Ubl3m;>
2. [http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/LAP_igrk_2020.pdf.](http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/LAP_igrk_2020.pdf)

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



SASARAN 5: Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

INDIKATOR: Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalabar (4G)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini berguna untuk melihat keterjangkauan jumlah penduduk yang mendapatkan akses atau terlayani fasilitas *mobile broadband* serta sebagai sarana untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan

TIK. Akses bergerak pitalebar (*mobile broadband*) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses bergerak (*mobile*). Jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Penduduk terlayani *mobile broadband* (PPMB) =

(Jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (LPMB) + Jumlah total luas pemukiman Indonesia (LP)) x 100%.

Sumber Data/Publikasi

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar

SASARAN 1: Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau

INDIKATOR: Rasio *outstanding* KPR terhadap PDB

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Indikator ini membandingkan rasio KPR dengan Pendapatan Domestik Bruto RI untuk mengetahui kontribusi KPR terhadap pendapatan negara mengingat sektor KPR terkait dengan banyak sektor seperti perumahan, ekonomi, tenaga kerja, dan sebagainya. Indikator ini menunjukkan bahwa jumlah KPR dan KPA yang dikururkan (Rp) dibagi dengan nilai PDB (Rp) pada tahun berkenaan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Perhitungan variabel kredit menurut (Hilbers et.al, 2016) yang digunakan didefinisikan sebagai variabel stok dan PDB adalah variabel *flow*, sehingga dalam menentukan pertumbuhan KPR pada bulan t dibagi dengan nilai PDB pada bulan t dan t+1.

Sumber Data/Publikasi

-

Tautan Publikasi

-

Disagregasi
-

Frekuensi Pengumpulan
-

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita**Definisi**  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*).**Satuan**

persen (%).

Metode Penghitungan

$$\text{Rumus} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Di mana:

a : Jumlah RT dengan luas lantai per kapita tertentu

b : Jumlah RT

Sumber Data/Publikasi

Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, BPS, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/31/68cf1c94411883822b83952f/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2020.html>.

Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan

2018, 2015, 2011, 2009.

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding)**Definisi**  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semen/bata merah.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Rumusan: Jumlah RT dengan bahan bangunan utama lantai rumah terluas tertentu (a) Dibagi jumlah RT dan (b) Dikalikan 100 persen.

Sumber Data/Publikasi

Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, BPS, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/31/68cf1c94411883822b83952f/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2020.html>.


Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan

2018, 2015, 2011, 2009.

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Sertifikat Hak Milik (SHM) dan selain SHM seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS) serta surat bukti lainnya seperti girik, *letter C*, dan lainnya.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah dibagi dengan jumlah rumah tangga pada periode sama dikalikan 100 persen.

Sumber Data/Publikasi

Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, BPS, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/31/68cf1c94411883822b83952f/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2020.html>.

Disagregasi

Provinsi dan nasional.


Frekuensi Pengumpulan

2018, 2015, 2011, 2009.



SASARAN 2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya dan dikali dengan 100 persen.

$$PAML = \frac{JRTAML}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

PAML : Proporsi populasi yang menggunakan sumber air minum layak.

JRTAML : Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak.

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Sumber Data/Publikasi

1. Metadata Indikator SDGs Indonesia - Pilar Pembangunan Lingkungan - Edisi II, 2020;

2. *Booklet* Meta Data Target Indikator Air Minum - Kupas Tuntas SDGs 6.1 Air Minum;
3. Kerja Sama Bappenas, Pokja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi Nasional (PPAS) dan USAID IUWASH PLUS, 2020.


Tautan Publikasi

<http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Satu kali.

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah (*on-premises*), tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah (*on-premises*), air tersedia sepanjang tahun, dan memenuhi kualitas fisik air minum dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya dan dikali dengan 100 persen.

$$PAMLST = \frac{JRTAMLST}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

- PAMLAf** : Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah (*on-premises*), air tersedia sepanjang tahun, dan memenuhi persyaratan kualitas air minum.
- JRTAMLAf** : Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah (*on-premises*), air tersedia sepanjang tahun, dan memenuhi persyaratan kualitas air minum.
- JRT** : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Sumber Data/Publikasi

1. Susenas MKP, Badan Pusat Statistik;
2. Kementerian Kesehatan.

Tautan Publikasi

<http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
satu atau tiga tahunan.

INDIKATOR: Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase rumah tangga yang sumber air utamanya berasal dari jaringan perpipaan (air keran atau air ledeng) yang dilayani oleh BUMN/BUMD Air Minum/PDAM dan lembaga non-PDAM seperti UPTD, kelompok masyarakat, serta badan usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berasal dari jaringan perpipaan (air ledeng atau air keran pada kuesioner Susenas) dibagi dengan jumlah Rumah Tangga Seluruhnya dan dikali dengan 100 persen.

Tautan Publikasi

1. Metadata Indikator SDGs Indonesia - Pilar Pembangunan Lingkungan - Edisi II, 2020;
2. *National Housing Water and Sanitation Information Services*

Sumber Data/Publikasi

1. <http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>;
2. <http://nawasis.org/portal/digilib/read/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-27-prt-m-2016-tentang-penyelenggaraan-sistem-penyediaan-air-minum/51374#:~:text=1.786%20kali-,Peraturan%20Menteri%20Pekerjaan%20Umum%20dan%20Perumahan%20Rakyat%20Nomor%2027%2FPRT,Pembinaan%20dan%20Pengawasan.>

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Satu kali.

INDIKATOR: Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Persentase rumah tangga yang sumber air utamanya bukan berasal dari jaringan perpipaan, berupa sumur pompa, sumur gali terlindung, mata air terlindung, dan air hujan; tidak termasuk air minum dari penjual keliling, dijual dari tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

100% dikurangi dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%).

Sumber Data/Publikasi

1. Metadata Indikator SDGs Indonesia - Pilar Pembangunan Lingkungan - Edisi II, 2020;
2. *Booklet Meta Data Target Indikator Air Minum - Kupas Tuntas SDGs 6.1 Air Minum*

Tautan Publikasi

<http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/>.

Disagregasi

Provinsi dan nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Satu kali.

INDIKATOR: Persentase PDAM dengan kinerja sehat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

PDAM yang sehat adalah PDAM yang memenuhi aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia, dengan nilai keseluruhan dari keempat aspek tersebut adalah lebih dari 2,8.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah PDAM yang berkinerja sehat dibagi dengan jumlah PDAM total dikali 100 persen.

Sumber Data/Publikasi

Buku Kinerja BUMD Penyelenggara SPAM, Kementerian PUPR, 2019.

Tautan Publikasi

http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/assets/assets/upload/Executive_summary_Buku_Laporan_Kinerja_PDAM_2019.pdf.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

Disagregasi

Wilayah I (Pulau Sumatera), Wilayah II (Pulau Jawa), Wilayah III (Pulau Kalimantan dan Sulawesi), Wilayah IV (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua).

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Formula SDGs dari sanitasi layak adalah fasilitas BAB sendiri/bersama; Jenis kloset: leher angsa; tempat pembuangan: septik tank/SPAL. Penyempurnaan kondef dengan menambahkan khusus di wilayah pedesaan tempat pembuangan boleh berupa lubang tanah.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

1. Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dibagi dengan jumlah rumah tangga total dikali 100 persen.
2. Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi dengan jumlah rumah tangga total dikali 100 persen.

Sumber Data/Publikasi

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, BPS, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=Indikator+Pembangunan+Berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah rumah tangga dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dikali dengan 100 (seratus), dibagi dengan jumlah rumah tangga.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah rumah tangga dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dikali dengan 100 (seratus), dibagi dengan jumlah rumah tangga.

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul Kesehatan dan Perumahan, 2019, BPS, 2019.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=14&th=2019>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

3 tahunan.

INDIKATOR: Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini berguna untuk mengetahui proporsi jumlah RT yang telah menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik dalam perkotaan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase RT yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan yaitu jumlah RT yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya dalam periode sama, dinyatakan dalam persen.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian PUPR, 2021.

Tautan Publikasi

https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Satu atau tiga tahunan.



SASARAN 3: Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi

INDIKATOR: Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Rata-rata waktu atau kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan diukur sebagai rata-rata dari total 4 indikator yang

terdiri atas (1) rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pelayaran; (2) rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan penerbangan; (3) rata-rata *response time* pada penanganan bencana; dan (4) rata-rata *response time* pada penanganan kondisi membahayakan manusia.

Satuan

Menit.

Metode Penghitungan

Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan sebagai rata-rata dari 4 indikator yang dijelaskan dalam definisi.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Basarnas 2020, Basarnas, 2021.

Tautan Publikasi

<https://basarnas.go.id/media/PPID/dokumen/Laporan%20Kinerja%20Basarnas%20Tahun%202020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



SASARAN 4: Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan

INDIKATOR: Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah kabupaten/kota yang telah terpenuhi kebutuhan air bakunya atau memiliki neraca air yang positif atau surplus.

Satuan

Kabupaten/kota.

Metode Penghitungan

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami surplus air baku.

Sumber Data/Publikasi

1. Data penyediaan air baku seluruh Kab/Kota tahun 2021;
2. Data tambahan penyediaan air tahun 2022 dan 2023;
3. Asumsi kebutuhan air baku domestik per Kab/Kota.

Tautan Publikasi

-


Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



SASARAN 5: Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi

INDIKATOR: Volume tampungan air per kapita

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menunjukkan nilai volume tampungan air terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu.

Satuan*

Kumulatif, m³/kapita.

**usulan BPS: m³/kapita/tahun*

Metode Penghitungan*

Diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dam *upgrading*, dan pemanfaatan tampungan alami) dibandingkan dengan jumlah penduduk.

**usulan BPS: nilai ketahanan air dalam satuan meter kubik per kapita per tahun, diperoleh dari rasio tampungan air dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu.*

Rasio tampungan = jumlah volume air tertampung sepanjang tahun.

Sumber Data/Publikasi

1. Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 BPS;
2. Bahan Informasi Bendungan dan Danau tanggal 1 November 2022.

Tautan Publikasi

<https://public.tableau.com/app/profile/andri.septian/viz/NeracaSumberDayaAir/Home>


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Persentase luas sawah beririgasi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Luas sawah beririgasi atau luas lahan sawah irigasi terbagi atas data tiap provinsi, kabupaten/kota, dan lain lain yang dilaporkan BPS setiap tahunan dan 3 tahunan melalui Buku Statistik Lahan Pertanian 5 tahunan.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase luas sawah beririgasi yaitu luas lahan sawah irigasi dibagi dengan total luas sawah, dinyatakan dalam persen.

Sumber Data/Publikasi

1. Data LBS (Luas Baku Sawah) oleh BPS;
2. Capaian Renstra 2010-2019 pada buku Renstra Ditjen SDA 2020-2024;
3. Data capaian Renstra 2020-2022 berdasarkan data pemantauan Dit. SSPSDA;
4. Rencana capaian 2023 berdasarkan target pagu alokasi anggaran.

Tautan Publikasi

-


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Luas daerah irigasi yang mendapatkan intervensi program modernisasi irigasi.

Satuan

Hektar.

Metode Penghitungan

Luas daerah irigasi yang selesai mendapatkan intervensi program modernisasi irigasi TA. 2022 (DI. Mrican, Way Sekampung) dan TA. 2023 (DI Pamukkulu, DI Kedung Putri).

Sumber Data/Publikasi

1. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2015;
2. Diolah dari data pelaksanaan modernisasi irigasi (Direktorat Irigasi dan Rawa, KemenPUPR);
3. Bahan informasi pertemuan BPK pada 9 November 2022.

Tautan Publikasi

-

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 2: Infrastruktur Ekonomi****SASARAN 1: Meningkatnya konektivitas wilayah****INDIKATOR: Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jalan mantap adalah jalan nasional dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan tidak mantap adalah jalan nasional dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Acuan yang digunakan untuk mengukur kemantapan jalan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011.

Sumber Data/Publikasi

Buku Kondisi Jalan Nasional 2020, Kementerian PUPR, 2021.

Tautan Publikasi

<https://binamarga.pu.go.id/assets/js/vendor/ckeditor/uploads/Buku%20Kondisi/BUKU%20KONDISI%20JALAN%20NASIONAL%202020%20Semester%20II%20FINAL.pdf>

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Semesteran.

INDIKATOR: Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan panjang jalan tol baru yang dibangun dan/atau beroperasi selama periode perwujudan target. Dinyatakan dalam kilometer (km).

Satuan

Km.

Metode Penghitungan

Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi dalam satuan kilometer (km).

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Kinerja, Kementerian PUPR,
2. Laporan Kinerja, BPJT, Kementerian PUPR, 2021.

Tautan Publikasi

1. https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf;
2. <https://bpjt.pu.go.id/assets/js/vendor/ckeditor/uploads/Renstra%20dan%20Lakip/LAKIP-SET-BPJT-2020-min.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Panjang jalan baru yang terbangun

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator yang menyatakan panjang jalan baru yang terbangun selama periode perwujudan target.

Satuan

Km.

Metode Penghitungan

Panjang jalan baru yang terbangun dalam satuan kilometer (km).

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian PUPR, 2021.


Tautan Publikasi

https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Panjang jaringan KA yang terbangun

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) merupakan indikator peningkatan konektivitas wilayah DJKA, berupa panjang jalan/rel KA yang terbangun dari periode ke periode tertentu (misal 2015-2017).

Satuan

(Kumulatif) (km).

Metode Penghitungan

Panjang rel KA yang terbangun ditotal dari periode ke periode terkini, dinyatakan dalam kilometer (kmsp).

Sumber Data/Publikasi

Buku Statistik Bidang Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, 2021.


Tautan Publikasi

[https://djka.dephub.go.id/uploads/202108/Buku_Statistik_Tahun_2021_\(Semester_I\)_BARU.pdf](https://djka.dephub.go.id/uploads/202108/Buku_Statistik_Tahun_2021_(Semester_I)_BARU.pdf).

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Semesteran.

INDIKATOR: Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Satuan*

Lokasi. **masukan BPS = pelabuhan*

Metode Penghitungan

Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar dinyatakan dalam jumlah lokasi pelabuhan yang memenuhi standar pelayanan berdasarkan kriteria.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, 2021.

Tautan Publikasi

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20210507104008.LKIP_DIRJEN_HUBLA_TAHUN_2020.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah rute subsidi tol laut

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah rute tol laut yang mendapat subsidi dalam periode tertentu. Subsidi tol laut juga membuat beberapa rute mengalami penambahan trayek sesuai dengan tambahan stimulus untuk meningkatkan pelayanan jumlah muatan kapal program tol laut.

Satuan

Rute.

Metode Penghitungan

Jumlah rute tol laut yang mendapat subsidi dinyatakan dalam banyaknya rute pada periode tertentu.

Sumber Data/Publikasi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan, 2020.


Tautan Publikasi

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20210709005225.DOKUMEN_RENSTRADITJEN_HUBLA_TAHUN_2020-_2024.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Lima tahunan.

INDIKATOR: Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah pelabuhan penyeberangan yang baru dibangun dalam periode suatu tahun dari pengembangan hingga selesai. Beberapa pelabuhan penyeberangan juga terdapat di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti KSPN Danau Toba.

Satuan

Lokasi.

Metode Penghitungan

Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun dalam periode tahun tertentu, dinyatakan dalam jumlah lokasi/tempat.

Sumber Data/Publikasi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024, Kementerian Perhubungan, 2020.

Tautan Publikasi

https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20210709005225.DOKUMEN_RENSTRA_DITJEN_HUBLA_TAHUN_2020-_2024.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Lima tahunan.

INDIKATOR: Jumlah bandara baru yang dibangun

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Bandara atau bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Permenhub No. PM39 Tahun 2019). Sebagai salah satu proksi dalam mengukur terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah, serta menunjukkan aksesibilitas, konektivitas, dan mobilitas suatu daerah.

Satuan

(Kumulatif) (lokasi).

Metode Penghitungan

Jumlah bandara yang dibangun (kumulatif) merupakan jumlah total bandara yang dibangun dalam periode tahun tertentu sampai tahun terkini, dinyatakan dalam jumlah lokasi.

Sumber Data/Publikasi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2025, Kementerian Perhubungan, 2020.


Tautan Publikasi

<http://hubud.dephub.go.id/website/RRenstra.php>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Lima tahunan.

INDIKATOR: Jumlah rute jembatan udara

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan tentang rute jembatan udara. Jembatan udara adalah pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandara ke bandara lainnya dan/atau dari bandara ke bandara di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Pembukaan rute jembatan baru merupakan kerja sama Kemendag, Kemenhub, Pemda, dan operator angkutan udara, serta otoritas bandara.

Satuan

Rute.

Metode Penghitungan

Jumlah rute jembatan udara yang dioperasikan dalam periode tahun tertentu, dinyatakan dalam jumlah rute.

Sumber Data/Publikasi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020-2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, 2020.

Tautan Publikasi

<http://hubud.dephub.go.id/website/RRenstra.php>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Lima tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 3: Infrastruktur Perkotaan

SASARAN 1: Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan

INDIKATOR: Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menyatakan jumlah kota yang dibangun *flyover/underpass* sebagai program untuk mengurangi kepadatan, penumpukan lalu lintas, dan menghindari kecelakaan di jalur rel kereta api.

Satuan

Kota.

Metode Penghitungan

Jumlah kota yang terdapat *flyover/underpass*, dinyatakan dalam jumlah kota.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian PUPR, 2021.


Tautan Publikasi

https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar pada kota yang dikembangkan. Sistem angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa digunakan untuk kepentingan umum dengan prasyarat tertentu (LPM ITB, 1997). Banyak usulan jenis angkutan umum massal yang banyak dikembangkan di kota besar, seperti model oleh Gesellschaft Technische Zusammenarbeit (GTZ), seperti dikutip Djoko Suwandono dari Undip yaitu (1) *Mass Rapid Transit*, (2) *Heavy Rail Transit*, (3) *Light Rail Transit*, (4) *Metro*, (5) *Sistem Kereta Komuter*, dan (6) *Bus Rapid Transit*. Indikator ini menjelaskan jumlah sistem angkutan umum massal yang dikembangkan dalam kota besar tertentu.

Satuan

Kota.

Metode Penghitungan

Jumlah kota besar yang terdapat sistem angkutan umum massal, dinyatakan dalam jumlah kota.

Sumber Data/Publikasi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, 2020.

Tautan Publikasi

http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepEl/2020/SK_Renstra_Ditjen_Hubdat_2020_-_2024.pdf.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Lima tahunan.

INDIKATOR: Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani pemerintah melalui peremajaan kota. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Peremajaan permukiman dilakukan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hunian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan MBR melalui penataan dan perbaikan kualitas permukiman di kawasan kumuh. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rumah, permukiman, dan lingkungan hunian di kawasan kumuh supaya lebih baik, mewujudkan subsidi silang antara pemerintah dan swasta dalam peremajaan kawasan kumuh, dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditinggal di kawasan kumuh.

Satuan

Kawasan.

Metode Penghitungan

Lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh perkotaan sebagaimana ditetapkan terakhir (per September 2021) dalam Kepmen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 167/KPTS/M/2020.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Kementerian PUPR, Kementerian PUPR, 2021.

Tautan Publikasi

https://pu.go.id/assets/media/1894659677LAKIP%20Kementerian%20PUPR%20TA%202020_upload.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 4: Energi dan Ketenagalistrikan**

SASARAN 1: Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien

INDIKATOR: Jumlah produksi tenaga listrik

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Produksi tenaga listrik atau dalam narasi lain berupa penyediaan tenaga listrik dari PLN dalam periode tahun tertentu dalam satuan *gigawatt per hour* (GWh).

Satuan

GWh.

Metode Penghitungan

Jumlah produksi tenaga listrik yang dihasilkan (*gigawatt*) setiap jamnya, dinyatakan dalam GWh.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Tahun 2020, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, 2021.

Tautan Publikasi

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Penurunan emisi CO₂ pembangkit

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan penurunan emisi CO₂ yang bersumber dari pembangkit. Penurunan emisi CO₂ pembangkit sebagai salah satu perwujudan RAN-GRK, bertujuan mengetahui jumlah emisi CO₂ yang dapat diturunkan karena operasional pembangkit (seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS).

Satuan

Juta ton.

Metode Penghitungan

Penurunan emisi oleh aksi mitigasi dalam periode y (ton CO₂) (PEy) merupakan selisih antara Emisi *Baseline* (EBy) dengan Emisi Aksi Mitigasi (EPy), dinyatakan dalam juta ton CO₂.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Tahun 2020, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, 2021.


Tautan Publikasi

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah pengguna listrik

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan jumlah pengguna listrik atau pelanggan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), secara kumulatif sampai dengan periode tahun terkini.

Satuan

Ribu rumah tangga-kumulatif.

Metode Penghitungan

Jumlah pengguna listrik (kumulatif) dinyatakan dalam jumlah pelanggan total PLN sampai dengan tahun periode terkini, dinyatakan dalam ribu Rumah Tangga (RT).

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Tahun 2020, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, 2021.

Tautan Publikasi

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1be23-20210315-1359-laporan-kinerja-2020-rev-2-paling-new-kompilasi-.pdf.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga Sambungan Rumah (SR) merupakan banyaknya jaringan distribusi gas bumi (penyaluran gas melalui jaringan pipa) untuk rumah tangga. Jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi. Merupakan indikator dalam program prioritas nasional yaitu pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih serta program komplementer konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi.

Satuan

(Kumulatif, sambungan rumah).

Metode Penghitungan

Jumlah sambungan jaringan gas kota yang dihitung secara kumulatif sampai dengan tahun terkini, yang dinyatakan dalam satuan sambungan rumah tangga.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian ESDM, 2021.


Tautan Publikasi

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-lapoan-kinerja-kesdm-2020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan jumlah kapasitas kilang minyak hingga periode tahun terkini di Indonesia. Kilang minyak atau dalam Bahasa Inggris disebut *oil refinery* adalah fasilitas industri atau pabrik yang mengolah minyak mentah hasil eksploitasi menjadi berbagai jenis produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lainnya berupa bahan baku bagi industri petrokimia.

Satuan

Barrel per Calendar Day/BPCD.

Metode Penghitungan

Jumlah kapasitas produksi kilang minyak yang dihitung secara kumulatif sampai dengan tahun terkini, yang dinyatakan dalam satuan BPCD.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian ESDM, 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kesdm-2020.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 5: Transformasi Digital

SASARAN 1: Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi

INDIKATOR: Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata total nilai tambah yang dihasilkan sektor TIK per tahunnya melalui berbagai indikator TIK.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Pertumbuhan PDB sektor informasi dan komunikasi dihitung dari perbandingan antar periode (Q to Q dan Y on Y) PDB sektor informasi dan komunikasi atas dasar harga konstan.

Sumber Data/Publikasi

Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2016-2020, BPS, 2020.


Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/10/16/54be7f82b7d3aa22f5e2c144/pdb-indonesia-triwulanan-2016-2020.html>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Triwulanan.

INDIKATOR: Persentase pengguna internet

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang menggunakan internet dalam kurun periode tertentu. Indikator ini merupakan bagian dari indikator sektor TIK.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase pengguna internet yaitu jumlah penduduk yang mengakses internet dibagi dengan jumlah total penduduk, dikalikan 100 persen.

Sumber Data/Publikasi

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019, BPS, 2020.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeee62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Telepon genggam/telepon seluler, termasuk *smartphone* adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

$$PITG = \frac{JITG_t}{JP_t} \times 100\%$$

Keterangan:

PITG : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

JITG_t : Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada periode tertentu

JP_t : Jumlah penduduk pada periode tertentu

Sumber Data/Publikasi

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, BPS, 2020.

Tautan Publikasi

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/view?kd=1558&th=2020>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

PRIORITAS NASIONAL 6

Jumlah Indikator PN

5



17

Jumlah Indikator PP



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 6

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023


METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana Dan Perubahan Iklim.



SASARAN 1: Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

INDIKATOR: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$IKLH = \sum_{i=1}^{33} IKLH_{Provinsi_i} \times \left(\frac{Populasi_{Provinsi_i}}{Populasi_{Indonesia}} + \frac{Luas_{Provinsi_i}}{Luas_{Indonesia}} \right) \div 2$$

Sumber Data/Publikasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tautan Publikasi

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4190.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.


Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



SASARAN 2: Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim

INDIKATOR: Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Nilai penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB merupakan penjumlahan antara penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dengan penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim.

Sumber Data/Publikasi

1. RPJMN 2020-2024;
2. Rencana Strategis BNPB 2020-2024; dan
3. Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim, Kementerian PPN/Bappenas dan BNPB.

Tahun publikasi dari sumber yang digunakan adalah tahun 2020.

Tautan Publikasi

1. <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4q7Cb7FBxavq3IK>;
2. <https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxmAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf>;
3. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-5_Pemantauan-Evaluasi-dan-Pelaporan.pdf.


Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
5 tahunan.



SASARAN 3: Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*

INDIKATOR: Persentase penurunan emisi GRK

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penurunan emisi GRK adalah nilai penurunan emisi GRK terhadap *baseline* yang terjadi dengan melakukan kegiatan pembangunan rendah karbon seperti mengganti sumber energi dari energi fosil yang beremisi karbon menjadi energi baru terbarukan, peningkatan serapan karbon dengan melakukan penanaman, dan lain-lain.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Secara umum, penghitungan nilai persentase penurunan emisi dilakukan dengan cara membagi nilai potensi penurunan emisi yang tercatat dengan nilai *baseline* (BAU). Nilai emisi sendiri didapat dari Data Aktivitas dikalikan dengan Faktor Emisi.

$$E = DA \times FE$$

Keterangan:

E : Emisi GRK (ton)
DA : Data Aktivitas (T)
FE : Faktor Emisi (ton/T)

Catatan:

- *Activity unit* (atau Data Aktivitas) adalah besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya penanaman pohon 1 juta ha/tahun.
- Faktor Emisi adalah rata-rata emisi GRK suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 13,99 ton C/ha.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

Tautan Publikasi

<https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase penurunan intensitas emisi GRK

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Penurunan intensitas emisi GRK adalah nilai capaian penurunan emisi GRK per satuan *output* ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Penghitungan nilai persentase penurunan intensitas emisi dilakukan dengan cara membagi nilai potensi penurunan intensitas emisi yang tercatat dengan nilai *baseline* (BAU). Nilai intensitas penurunan emisi sendiri didapat dengan cara membagi nilai potensi penurunan emisi dengan nilai PDB sebagaimana ditampilkan pada formula berikut:

$$\begin{array}{c} \text{Intensitas Emisi} \\ \downarrow \\ \frac{\text{CO}_2}{\text{GDP}} = \frac{\text{Nilai Emisi Aktual}}{\text{GDP}} \end{array}$$

Catatan:

- Intensitas emisi/karbon adalah jumlah emisi GRK per satuan *output* ekonomi, yang biasanya diukur melalui *Gross Domestic Product* (GDP) di tingkat nasional.
- Nilai emisi aktual adalah perhitungan capaian penurunan emisi pada tahun berjalan.

Sumber Data/Publikasi

Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

Tautan Publikasi

<https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf>.


Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 1: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SASARAN 1: Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut

INDIKATOR: Indeks Kualitas Air (IKA)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setiap titik pantau pada lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
- 2) Hitung indeks pencemaran (PIj) setiap sampel untuk parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform;
- 3) Penentuan IKA berdasarkan nilai dari PIj sebagai berikut:
 - i. IKA = 100, untuk $PIj \leq 1$,
 - ii. IKA = 80, untuk $PIj > 1$ dan $PIj \leq 4,67$ (4,67 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas II terhadap kelas I),
 - iii. IKA = 60, untuk $PIj > 4,67$ dan $PIj \leq 6,32$ (6,32 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas III terhadap kelas I)
 - iv. IKA = 40, untuk PIJ untuk $PIj > 6,32$ dan $PIj \leq 6,88$ (6,88 adalah nilai PIj dari baku mutu kelas IV terhadap kelas I)
 - v. IKA = 30 untuk $PIj > 6,88$
- 4) Selanjutnya nilai IKA setiap provinsi dihitung dari rata-rata IKA semua sampel dalam provinsi tersebut

Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Tautan Publikasi

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4190.


Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks ini digunakan untuk menilai kualitas air laut dan memperbaiki kualitas air laut karena tercemar.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Perhitungan nilai IKAL mengacu pada *National Sanitation Foundation Water Quality Index* (NSFWQI).

Parameter:

TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat.

Rumus:

$$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

Keterangan:

- Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i
- W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i
- n : Jumlah parameter kualitas air laut

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Tautan Publikasi

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4190.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Terbitan pertama.

INDIKATOR: Indeks Kualitas Udara (IKU)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}\right) \times (I_{EU} - 0,1)$$

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Tautan Publikasi

https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4192.


Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut atau disebut juga dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)).

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot.

Kualitas ekosistem gambut diukur menggunakan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), yang dihitung berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu keberadaan kanal, areal yang terbakar, dan tutupan lahan.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left((TL - DKK) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Keterangan:

TL : Tutupan Lahan

DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal

Sumber Data/Publikasi

1. Media *Briefing* Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLHK 2021);
2. Laporan Kinerja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.menlhk.go.id/site/download>.

Disagregasi

Nasional dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan


Terbitan Pertama.



PROGRAM PRIORITAS 2: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

SASARAN 1: Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat

INDIKATOR: Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui angka potensi kehilangan PDB terkini yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di Indonesia.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dihitung dengan mengurangi potensi kehilangan PDB *existing* terhadap potensi kehilangan PDB terkini dibagi dengan potensi kehilangan PDB *existing* dikalikan 100 persen.

Sumber Data/Publikasi

Rencana Strategis BNPB 2020-2025, BNPB, 2020.

Tautan Publikasi

<https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxMAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Lima tahunan.

INDIKATOR: Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui angka kehilangan PDB sektor yang terkena dampak oleh bahaya iklim di Indonesia.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bahaya iklim dihitung dengan mengurangi potensi kehilangan PDB sektor *existing* terhadap potensi kehilangan PDB sektor terkini dibagi dengan potensi kehilangan PDB sektor *existing* dikalikan 100 persen. Perhitungan penurunan potensi kehilangan PDB per sektor dan per kategori berbeda, lebih detail dapat melihat pada publikasi rujukan.

Sumber Data/Publikasi

Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Iklim (*Climate Resilience Development Policy*) 2020-2045, Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

Tautan Publikasi

https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-5_Pemantauan-Evaluasi-dan-Pelaporan.pdf.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Terbitan pertama (rencana akan diterbitkan tahunan).

INDIKATOR: Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat

Definisi  (Semakin rendah nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini terhadap bencana kepada masyarakat. Sistem peringatan dini merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirene, kentongan, dan lain sebagainya.

Satuan

Menit.

Metode Penghitungan

Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dihitung berdasarkan waktu dalam satuan menit rata-rata melalui berbagai macam platform.

Sumber Data/Publikasi

1. Rencana Strategis BMKG 2020-2024, BMKG, 2020;
2. Rencana Strategis BNPB 2020-2024, BNPB, 2020.

Tautan Publikasi

1. <https://cdn.bmkg.go.id/web/RENCANA-STRATEGIS-BMKG-TAHUN-2020-2024.pdf>;
2. <https://loker.bnpb.go.id/apps/epubreader/?file=%2Fs%2FC58zDNW9FxMAYyz%2Fdownload%3Ffiles%3DRenstra%2520BNPB%25202020-2024.pdf%26path%3D%252F&type=application%2Fpdf>.

Disagregasi

Nasional.


Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 3: Pembangunan Rendah Karbon**

SASARAN 1: Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan

INDIKATOR: Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor energi (termasuk subsektor transportasi dan subsektor energi di bidang industri) dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Tingkat emisi GRK yang tercantum dalam inventarisasi sektor energi dihitung menggunakan Tier 1 metode IPCC 2006 dengan nilai faktor emisi *default* dan data aktivitas dalam unit energi (SBM, setara barel minyak) yang dikumpulkan dari Tabel Kesetimbangan Energi (*Energy Balance Table*) pada *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia* (HEESI), yang dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Metodologi perhitungan sektor transportasi yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan pada aksi PRK transportasi darat khususnya untuk aksi pembangunan ITS, reformasi sistem transit-BRT dan penerapan pengendalian dampak lalu lintas (ATCS) sudah berpedoman pada Petunjuk Teknis Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD GRK bidang energi yang diterbitkan Bappenas dan sejak tahun 2019 telah diintegrasikan ke dalam Sistem Pelaporan AKSARA. Faktor emisi atau serapan GRK menunjukkan besarnya emisi/serapan per satuan unit kegiatan yang dilakukan. Faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi yang dikeluarkan oleh Pertamina (2006) berdasarkan kandungan karbon yang terdapat di dalam jenis bahan bakar.

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2019-2020, Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Lingkungan Hidup, Sekretariat LCDI, 2020;
2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan *Monitoring*, Pelaporan, Verifikasi Tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, tahun 2020.

Tautan Publikasi

1. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf>;
2. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf>.


Disagregasi

- Nasional/sub-nasional (Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2019-2020);
- Nasional (Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan *Monitoring*, Pelaporan, Verifikasi Tahun 2019).

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor kehutanan dan lahan dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya adalah IPCC *Guidelines* 2006 (IPCC, 2006) dengan mengombinasikan faktor emisi *country/site specific* dan faktor emisi *default* IPCC.

Terdapat tiga metode perhitungan emisi untuk sektor kehutanan yaitu: 1) pendugaan emisi/serapan dari perubahan stok karbon, 2) pendugaan emisi dari dekomposisi gambut, dan 3) pendugaan emisi dari kebakaran hutan dan lahan. Peta tutupan lahan yang dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan data aktivitas untuk menghitung emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Terdapat 2 metode untuk sektor pertanian, yaitu: 1) IPCC 2019 *Tier-2*, yang diratifikasi menjadi Metode Penghitungan Mitigasi dan Serapan Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian; dan 2) ISCC 205 *Greenhouse Gas Emissions Version 3.0*

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan *Monitoring*, Pelaporan, Verifikasi Tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, 2020;
2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan *Monitoring*, Pelaporan, Verifikasi (MPV) 2020, Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Lingkungan Hidup, Sekretariat LCDI, 2021; serta
3. Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2019-2020.

Tautan Publikasi

1. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf>;
2. http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/LAP_igrk2020.pdf;
3. <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html>;
4. https://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=619:metodologi-perhitungan-mitigasi-dan-serapan-gas-rumah-kaca-2020&id=1:buku&Itemid=449&start=20;
5. https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2017/02/ISCC_205_GHG_Emissions_3.0.pdf.

Keterangan:

Tahun publikasi 1: 2020

Tahun publikasi 2: 2021

Tahun publikasi 3: 2019

Tahun publikasi 4: 2020

Tahun publikasi 5: 2017

Dokumen Bappenas sedang dalam tahap finalisasi

Disagregasi

Disagregasi 1: nasional

Disagregasi 2: nasional

Disagregasi 3: internasional

Disagregasi 4: nasional


Disagregasi 5: internasional

Disagregasi 6: nasional/sub-nasional

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan

INDIKATOR: Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor limbah dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor limbah mengacu pada metode IPCC *Guidelines* 2006 yang mana tingkat emisi GRK di sektor limbah bergantung pada jumlah limbah yang diolah, karakteristik dan tipe pengolahannya. Emisi GRK yang dihitung juga bergantung pada metode penghitungannya. Terdapat perbaikan untuk mengestimasi emisi GRK dari pengelolaan sampah di TPA yaitu dengan menggunakan metode FOD (*First Order Decay*) yang merupakan perbaikan dari metode *mass balance* yang digunakan pada pelaporan SNC. Selain itu nilai parameter lokal untuk komposisi sampah dan kandungan bahan kering (*dry matter content*) juga telah digunakan dalam estimasi penghitungan emisi menggunakan metode FOD. Perbaikan juga telah dilakukan untuk estimasi emisi GRK dari limbah cair industri, untuk beberapa jenis industri sudah menggunakan parameter yang didapatkan dari industri secara langsung seperti debit air limbah, COD dan tipe pengolahan limbah yang digunakan.

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan *Monitoring*, Pelaporan, Verifikasi Tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, 2020;
2. Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah, Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Lingkungan Hidup, Sekretariat LCDI, 2020.

Tautan Publikasi

Tautan publikasi dapat diakses melalui:

1. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkmrv2019.pdf>;
2. http://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/admincms/downloads/publications/Pedoman_teknis_penghitungan_baseline_emisi_GRK_sektor_pengolahan_limbah.pdf).

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor IPPU dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Estimasi nilai emisi GRK untuk sektor proses industri dan penggunaan produk menggunakan metodologi yang tercantum pada pedoman IPCC 2006. *Tier 1* memerlukan data aktivitas berupa data agregat statistik produksi produk industri, jumlah penggunaan karbon, pelumas, lilin dan lain-lain secara aktual dalam skala nasional. Pengumpulan data berdasarkan pada jenis industri yang pada salah satu proses atau keseluruhan proses pembuatan produk mengemisikan atau berpotensi mengemisikan GRK. Pengembangan menuju *Tier 2* sudah dilakukan untuk industri semen, amonia, dan alumunium. Ketiga industri tersebut sudah mengembangkan faktor emisi lokal spesifik untuk industri mesin melalui penelitian dan proyek *Clean Mechanism Development* (CDM). Adanya pengembangan nilai faktor emisi ini akan mengakibatkan kualitas perhitungan emisi semakin baik, di samping menurunkan nilai *uncertainty*.

Sumber Data/Publikasi

1. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan *Monitoring*, Pelaporan, Verifikasi Tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Lingkungan Hidup, Sekretariat LCDI, 2020;
2. Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2019-2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV, 2020.

Tautan Publikasi

1. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/09/20190828-FINAL-FIX-Buku-Laporan-RAN-GRK.pdf>;
2. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/igrk/lapigrkrmv2019.pdf>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan kelautan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan emisi GRK khususnya pada sektor pesisir dan kelautan dibandingkan dengan posisi *baseline*.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK dari sektor pesisir dan laut dalam hal ini *mangrove* menggunakan pendekatan model *invest* dan metode *stock difference* dalam IPCC 2014 *supplement to IPCC 2006 IPCC Guidelines for National Green Houses Gas: Wetland*.

Sumber Data/Publikasi

Estimating Carbon Emission and Baseline for Blue Carbon Ecosystems in Indonesia, Novi Susetyo Adi et al (2020) yang terdiri atas:

- Novi Susetyo Adi (KKP)
- Mohammad Sumiran Paputungan (Univ. Mulawarman)

- Agustin Rustam (KKP)
- Alfabetian Harjuno Condro Haditomo (Univ. Diponegoro)
- Medrilzam (Kementerian PPN/Bappenas)

Tahun publikasi dari sumber yang digunakan adalah tahun 2020.

Tautan Publikasi

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/530/1/012030/pdf>.

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

PRIORITAS NASIONAL 7

Jumlah Indikator PN

6



15

Jumlah Indikator PP



METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 7

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023


METADATA INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan
Transformasi Pelayanan Publik



SASARAN 1: Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal

INDIKATOR: Indeks Demokrasi Indonesia

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk menakar perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. Memperoleh dasar terukur untuk penyusunan program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru diawali dengan penentuan bobot dari masing-masing aspek dan indikator. Proses tersebut menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang merupakan salah satu metode pembobotan dengan pendekatan untuk menentukan prioritas (untuk menjawab pertanyaan indikator mana yang lebih penting antara satu dengan yang lain). AHP sepenuhnya mengandalkan penilaian ahli dengan mengandalkan kapabilitas, pengalaman, pengetahuan, intuisi, dan kepercayaan ahli yang paham persis tentang subjek/substansi penelitian. Pada proses AHP dilaksanakan oleh 20 orang ahli yang memiliki *teoritical* dan *empirical background* yang bervariasi. Metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga

data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Terdapat 3 sumber metode pengambilan data pada IDI, yaitu (1) *Review* dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita *Online*), (2) *Review* dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I, dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk: (1) mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen; serta (2) eksplorasi dan menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen. FGD akan dipimpin oleh fasilitator yang merupakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi. Peserta FGD merupakan perwakilan pemerintah, aparat keamanan, universitas, pers, tokoh masyarakat, serta OMS.

Indeks bernilai pada rentang 1 – 100 dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu baik (indeks >80), sedang (indeks 60 – 80), kurang (indeks < 60).

Sumber Data/Publikasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), BPS, 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/subject/34/politik-dan-keamanan.html#subjekViewTab2.html>.


Disagregasi

Nasional, pusat, dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Merupakan alat ukur kepercayaan terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Metode perhitungan dilakukan melalui survei. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diterima. Survei dibagi ke dalam 3 aspek: akses informasi, kualitas informasi, dan kepuasan masyarakat. Terdapat beberapa isu prioritas yang dijadikan objek survei (Tahun 2020: Pilkada, COVID-19, *Stunting*, PEN, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi Digital, dan Gerakan Indonesia Bersih). Isu tersebut merupakan konten yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat melalui sejumlah media. Masyarakat yang menjadi responden adalah yang terpapar dengan informasi pemerintah, dengan kriteria:

- Rentang usia 15-39 tahun;
- Laki-laki/perempuan;
- Rutin membaca berita *online* dan tradisional;
- Memiliki dan aktif di media sosial;
- Tidak bekerja/memiliki kerabat yang bekerja di perusahaan riset, media massa, dan institusi pemerintahan.

- Survei dilaksanakan selama 6 minggu, dimulai dari bulan Oktober/November.

Sumber Data/Publikasi

1. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019;
2. Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik terkait Isu Prioritas Nasional pada Masyarakat 2020, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, 2020.

Tautan Publikasi

<https://balitbangsdm.kominfo.go.id/?mod=pencarian&q=indeks&option=main&m=publikasi&st=cc53ee25b9dcea3fe6eb79499542d938976dc16f8d982f92ee0b10c90ce9fe85>.

Disagregasi

Nasional.


Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



SASARAN 2: Optimalnya Kebijakan Luar Negeri

INDIKATOR: Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks yang mengukur pengaruh terhadap pengambilan kebijakan isu-isu bilateral, regional, dan global serta partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Indonesia pada forum regional, multilateral, dan dunia internasional.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indeks ini terdiri dari 2 sub indeks yaitu:

1. Sub indeks 1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral (bobot 70%);
2. Sub indeks 2: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri (bobot 30%).

Rumus:

$(70\% \times \text{realisasi sub indeks 1}) + (30\% \times \text{realisasi sub indeks 2})$

Sumber Data/Publikasi

Kepmenlu No. 07A/B/RO/VII/2021/01 Tahun 2021 tentang Peta Strategi dan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2021, Kementerian Luar Negeri, 2021.

Tautan Publikasi

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tIbWVu dGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjEvU0slMjBNZW5sdSUyM FBldGEIMjBTdHJhdGVnaSUyMDIwMjEucGRm>.


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

**SASARAN 3: Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap****INDIKATOR: Indeks Pembangunan Hukum**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Nilai yang dihasilkan dari pengukuran pilar, variabel, dan indikator pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum nasional.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan*

Pengumpulan data IPH 2020 terdiri dari tiga sumber yaitu data administratif K/L, survei masyarakat, dan survei pakar. Hal ini merupakan pengembangan dari penghitungan IPH tahun 2015-2019 yang baru menggunakan data administratif K/L.

*IPH Tahun 2020 masih dalam proses perhitungan.

Sumber Data/Publikasi

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas, 2021.


Tautan Publikasi

<https://www.bappenas.go.id/files/lampid/Lampiran%20Pidato%20Presiden%202021.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

**SASARAN 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik****INDIKATOR: Indeks Pelayanan Publik Nasional**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Pelayanan Publik menggambarkan kemampuan/kualitas pelayanan publik instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, juga fokus pada pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indeks ini dihitung dari rata-rata Indeks Pelayanan Publik tingkat K/L, ditambah rata-rata Indeks Pelayanan Publik tingkat pemda (provinsi dan kab/kota), hasilnya dibagi dua. Angka indeks tersebut didapatkan dari hasil evaluasi UPP pada instansi pemerintah yang dilakukan berdasarkan PermenPANRB nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keterangan Indeks:

4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima

4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangat Baik

3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik

3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (DC)

2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup

2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (DC)

1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk

1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk

0 - 1,00 : Kategori F/Gagal

Sumber Data/Publikasi

Laporan Kinerja, Kementerian PAN RB, 2020.

Tautan Publikasi<https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/category/564-laporan-kinerja-lakip-2020>.**Disagregasi**

Nasional, provinsi, kabupaten/kota.


Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.



SASARAN 5: Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

INDIKATOR: Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan tentang proporsi luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya dibagi luas wilayah NKRI.

Sumber Data/Publikasi

-

Tautan Publikasi

-

Disagregasi

-

Frekuensi Pengumpulan


-



PROGRAM PRIORITAS 1: Konsolidasi Demokrasi

SASARAN 1: Terwujudnya Stabilitas Politik yang Kondusif serta Komunikasi Publik yang Efektif, Integratif, dan Partisipatif

INDIKATOR: IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kapasitas lembaga demokrasi yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kinerja Lembaga Legislatif, (2) kinerja Lembaga Yudikatif, (3) netralitas penyelenggara pemilu, (4) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, (5) jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, (6) transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, (7) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan (8) pendidikan politik pada Kader Partai Politik.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Skor IDI pada aspek kapasitas lembaga demokrasi diperoleh dari 3 sumber, yaitu (1) *Review* dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita *Online*), (2) *Review* dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I, dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk: (1) mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen; serta (2) eksplorasi dan menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen. Penghitungan nilai masing-masing indikator dilakukan berdasarkan bobot penilaian.

Skor IDI bernilai skala 1 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori baik (indeks >80), sedang (indeks 60 – 80), dan kurang (indeks < 60).

Sumber Data/Publikasi

1. Kementerian PPN/Bappenas;
2. Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

1. <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Buku-IDI-2009.pdf>;
2. <https://www.bps.go.id/indicator/34/637/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>.

Disagregasi

Nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: IDI Aspek Kebebasan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kebebasan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara; (2)

terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat; (3) terjaminnya kebebasan berkeyakinan; (4) terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan; (5) terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat; (6) pemenuhan hak-hak pekerja; dan (7) pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Skor IDI pada aspek kebebasan diperoleh dari 3 sumber, yaitu (1) *Review* dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita Online); (2) *Review* dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I; dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk: (1) mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen; serta (2) eksplorasi dan menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen. Penghitungan nilai masing-masing indikator dilakukan berdasarkan bobot penilaian.

Skor IDI bernilai skala 1 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori baik (indeks >80), sedang (indeks 60 – 80), dan kurang (indeks < 60).

Sumber Data/Publikasi

1. Kementerian PPN/Bappenas;
2. Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

1. <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Buku-IDI-2009.pdf>;
2. <https://www.bps.go.id/indicator/34/637/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>.


Disagregasi

Nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: IDI Aspek Kesetaraan

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kebebasan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kesetaraan gender, (2) partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, (3) anti monopoli sumber daya ekonomi, (4) akses masyarakat pada jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin, (5) kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, (6) akses masyarakat terhadap informasi publik, dan (7) kesetaraan dalam pelayanan dasar.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Skor IDI pada aspek kebebasan diperoleh dari 3 sumber, yaitu (1) *Review* dan Koding Media (Koran Cetak dan Portal Berita *Online*), (2) *Review* dan Koding Dokumen dan Data Resmi K/L/D/I, dan (3) *Focus Group Discussion* (FGD). FGD bertujuan untuk: (1) mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen; serta (2) eksplorasi dan menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen. Penghitungan nilai masing-masing indikator dilakukan berdasarkan bobot penilaian.

Skor IDI bernilai skala 1 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori baik (indeks >80), sedang (indeks 60 – 80), dan kurang (indeks < 60).

Sumber Data/Publikasi

1. Kementerian PPN/Bappenas;
2. Badan Pusat Statistik.

Tautan Publikasi

1. <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Buku-IDI-2009.pdf>;
2. <https://www.bps.go.id/indicator/34/637/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html>.

Disagregasi

Nasional, pusat, dan provinsi.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-Asas Keterbukaan Informasi Publik

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini menjelaskan tentang jumlah regulasi/kebijakan yang terintegrasi sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik. Asas keterbukaan informasi publik terdiri atas (1) terbuka dan dapat diakses siapapun; (2) informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; (3) cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana; dan (4) dapat melindungi kepentingan yang lebih besar.

Satuan

Dokumen.

Metode Penghitungan

Jumlah dokumen yang sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik, dinyatakan dalam jumlah dokumen.

Catatan:

Output indikator ini merupakan turunan dari aturan/regulasi yang ada. *Output* dari indikator tersebut merupakan turunan dari aturan yang sudah ada (UU 14/2008 tentang KIP dan Inpres 9/2015), baik dalam bentuk regulasi/kebijakan/kajian, contoh:

1. Permenkominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo;
2. Permenkominfo No. 14 Tahun 2019 tentang Juknis Jabfung Bidang Kominfo;
2. Kajian Kerangka Komunikasi Publik Nasional.

Sumber Data/Publikasi

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 2008;
2. Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik: 2015.

Tautan Publikasi

-


Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

-

**PROGRAM PRIORITAS 2: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri****SASARAN 1: Meningkatkan Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Pembangunan Internasional****INDIKATOR: Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral**

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator menjelaskan kepemimpinan Indonesia yang dihitung berdasarkan jumlah forum regional dan multilateral yang dipimpin Indonesia pada tahun berjalan, termasuk keberhasilan pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional (OI).

Satuan

Forum.

Metode Penghitungan

Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia + jumlah pencalonan yang berhasil pada tahun berjalan.

Sumber Data/Publikasi

Kepmenlu No. 07A/B/RO/VII/2021/01 Tahun 2021 tentang Peta Strategi dan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2021, Kementerian Luar Negeri, 2021.

Tautan Publikasi

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9B50lQL0tIbWVu dGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDIwMjEvU0slMjBNZW5sdSUyM FBIldGEIMjBTdHJhdGVnaSUyMDIwMjEucGRm>

Disagregasi

Nasional.

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks yang mengukur kesan ataupun pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia di dunia internasional.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

- Indeks citra positif Indonesia diperoleh berdasarkan survei dengan menggunakan model Simon Anholt yang mengukur 6 dimensi (*Governance, Investment and Immigration, Export, Tourism, Culture, and People*) dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada seluruh perwakilan. Responden adalah non-

WNI yang berada di negara/wilayah akreditasi dengan minimal jumlah responden sebanyak 50 responden.

- Responden tersebut berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, pemerintah, parlemen, media, LSM, masyarakat umum setempat, serta *counterpart* terkait lainnya.
- Indeks diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala 0 s.d 5
- Keterangan Indeks:
 - 0: Sangat Buruk (0 - 16.67)
 - 1: Buruk (16.68 - 35.35)
 - 2: Cukup Buruk (35.36 - 50.01)
 - 3: Cukup Baik (50.02 - 66.68)
 - 4: Baik (66.69 - 83.35)
 - 5: Sangat Baik (83.38 - 100)

Sumber Data/Publikasi

Kepmenlu No. 07A/B/RO/VII/2021/01 Tahun 2021 tentang Peta Strategi dan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Tahun 2021, Kementerian Luar Negeri, 2021.

Tautan Publikasi

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0tIbWVu dGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWwh1biUyMDIwMjEvU0slMjBNZW5sdSUyM FBldGEIMjBTdHJhdGVnaSUyMDIwMjEucGRm.>

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Untuk mengukur segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara setempat, serta kebiasaan dan hukum internasional.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI yang Prima dihitung dari pembobotan 4 Sub IKU, yaitu:

- Sub IKU 1: Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri. Bobot: 40 persen
- Sub IKU 2: Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri. Bobot: 15 persen
- Sub IKU 3: Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri. Bobot: 25 persen
- Sub IKU 4: Indeks Diplomasi Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri.
Bobot: 20 persen

Pembobotan Sub IKU didasarkan pada parameter kompleksitas penyelesaian/penanganan, tingkat urgensi, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan Sub IKU.

Rumus:

$((40\% \times \text{Realisasi Sub IKU 1}) + (15\% \times \text{Realisasi Sub IKU 2}) + (25\% \times \text{Realisasi Sub IKU 3}) + (20\% \times \text{Realisasi Sub IKU 4}))$.

Sumber Data/Publikasi

Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri TA 2021, Kementerian Luar Negeri, 2021.

Tautan Publikasi

<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0t1bWVudGVyaWFuJTIwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWwh1biUyMDIwMjEvU0slMjBNZW5sdSUyMFBldGEIMjBTdHJhdGVnaSUyMDIwMjEucGRm>.


Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

**PROGRAM PRIORITAS 3: Penegakan Hukum Nasional**

SASARAN 1: Meningkatkan Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Akses terhadap Keadilan

INDIKATOR: Indeks Perilaku Anti Korupsi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK menggunakan *Explanatory Factor Analysis* (EFA). Rentang indeks 0–5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik.

Sumber Data/Publikasi

Indeks Perilaku Anti Korupsi, BPS, 2021.

Tautan Publikasi

<https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/indeks-perilaku-anti-korupsi-2021.html>.

Disagregasi
Nasional.


Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.



PROGRAM PRIORITAS 4: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

SASARAN 1: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

INDIKATOR: Indeks Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Teknik penilaian indeks pelayanan publik dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik melalui 4 (empat) cara yaitu: (1) *Desk evaluation*; (2) Observasi lapangan; (3) Kuesioner dan/atau; (4) Wawancara. Pengisian kuesioner akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel.

Adapun aspek penilaian indeks pelayanan publik antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan (Bobot 30%);
2. Profesionalisme SDM (Bobot 18%);
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik (Bobot 15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (Bobot 15%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (Bobot 15%); dan
6. Inovasi (Bobot 7%)

Keterangan Indeks:

4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima

4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangat Baik

3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik

3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (DC)

2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup

2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (DC)

1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk

1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk

0 - 1,00 : Kategori F/Gagal

Sumber Data/Publikasi

1. Kementerian PAN RB;
2. Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi

1. <https://www.menpan.go.id/site/lakip/file/6656-lakip-deputi-bidang-pelayanan-publik-tahun-2021>

2. <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/qE3Oh519TpovYWG>


Disagregasi

Nasional (Kementerian/Lembaga).

Frekuensi Pengumpulan

Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Pelayanan Publik Provinsi

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Teknik penilaian indeks pelayanan publik dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik melalui 4 (empat) cara yaitu: (1) *Desk evaluation*; (2) Observasi lapangan; (3) Kuesioner dan/atau; (4) Wawancara. Pengisian kuesioner akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel.

Adapun aspek penilaian indeks pelayanan publik antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan (Bobot 30%);
2. Profesionalisme SDM (Bobot 18%);
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik (Bobot 15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (Bobot 15%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (Bobot 15%); dan
6. Inovasi (Bobot 7%)

Keterangan Indeks:

4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima

4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangar Baik

3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik

3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (DC)

2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup

2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (DC)

1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk

1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk

0 - 1,00 : Kategori F/Gagal

Sumber Data/Publikasi

1. Kementerian PAN RB;
2. Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi

1. <https://www.menpan.go.id/site/lakip/file/6656-lakip-deputi-bidang-pelayanan-publik-tahun-2021>

2. <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/qE3Oh519TpovYWG>

Disagregasi **Frekuensi Pengumpulan**

Provinsi. Tahunan.

INDIKATOR: Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Teknik penilaian indeks pelayanan publik dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik melalui 4 (empat) cara yaitu: (1) *Desk evaluation*; (2) Observasi lapangan; (3) Kuesioner dan/atau; (4) Wawancara. Pengisian kuesioner akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel.

Adapun aspek penilaian indeks pelayanan publik antara lain:

1. Kebijakan Pelayanan (Bobot 30%);
2. Profesionalisme SDM (Bobot 18%);
3. Sarana Prasarana Pelayanan Publik (Bobot 15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (Bobot 15%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (Bobot 15%); dan
6. Inovasi (Bobot 7%)

Keterangan Indeks:

4,51 - 5,00: Kategori A/ Pelayanan Prima

4,01 - 4,50: Kategori A-/Sangat Baik

3,51 - 4,00: Kategori B/ Baik

3,01 - 3,50: Kategori B-/ Baik (DC)

2,51 - 3,00: Kategori C/ Cukup

2,01 - 2,50: Kategori C-/Cukup (DC)

1,51 - 2,00: Kategori D/ Buruk

1,01 - 1,50: Kategori E/ Sangat Buruk

0 - 1,00 : Kategori F/Gagal

Sumber Data/Publikasi

1. Kementerian PAN RB;
2. Kementerian PPN/Bappenas.

Tautan Publikasi

1. <https://www.menpan.go.id/site/lakip/file/6656-lakip-deputi-bidang-pelayanan-publik-tahun-2021>

2. <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-2.pdf>.

Disagregasi
Nasional.

Frekuensi Pengumpulan
Tahunan.

INDIKATOR: Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dan sebagainya) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dan sebagainya) pada waktu malam hari (hari telah gelap).

Satuan

persen (%).

Metode Penghitungan

Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100 persen.

Sumber Data/Publikasi

Statistik Kriminal, BPS, 2021.

Tautan Publikasi

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1312/sdgs_16/1.

Disagregasi

Frekuensi Pengumpulan

Nasional dan provinsi.

Tiga tahunan.

INDIKATOR: Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Definisi  (Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan capaian yang semakin baik)

Indikator ini mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Satuan

(tanpa satuan).

Metode Penghitungan

Indeks Kamtibmas dihitung dari rata-rata terbobot dua dimensi utama pembentuk Indeks Kamtibmas yaitu: Indeks Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan tertib masyarakat) dengan bobot 56%; dan Indeks Gakkum (penegakan hukum) dengan bobot 44%.

Keterangan Indeks:

1-1,9: Perlu pembenahan besar

2-2,9: Perlu pembenahan

3-3,9: Memadai

4-4,9: Baik

5: Istimewa

Sumber Data/Publikasi	Tautan Publikasi
Polri.	-
Disagregasi	Frekuensi Pengumpulan
Polda.	Tahunan.



PENUTUP



Harapan





Masukan dan Saran



PENUTUP

Metadata Indikator Pembangunan RKP Tahun 2023

PENUTUP

Metadata indikator pembangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan data, kami mengharapkan masukan dan saran dari unit kerja sektor serta pihak terkait lainnya.



**Kementerian PPN/
Bappenas**

METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2023